

KOMUNIKASI POLITIK:

**(Memahami dari Sisi Kepribadian dan
Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto)**

KOMUNIKASI POLITIK:

**(Memahami dari Sisi Kepribadian dan
Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto)**

Gatut Priowidodo, Ph.D.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Gatut Priyowidodo

KOMUNIKASI POLITIK: (Memahami dari sisi Kepribadian dan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto)/Gatut Priyowidodo

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2018.

xxx, xxx hlm., 23 cm

Bibliografi hlm. xxx

ISBN 978-602-425-xxx-xx

1. xxxx

I. xxxx

xxx.xx

Hak cipta 2018, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2018.xxxx RAJ

Gatut Priyowidodo, Ph.D.

KOMUNIKASI POLITIK:

(Memahami dari Sisi Kepribadian dan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto)

Cetakan ke-1, xxxxx 2018

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.

Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok

Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl.

Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459

RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No.

1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A

Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp.

Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp.

0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115,

Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 081222805479.

Kupersembahkan karya ini untuk:

*Kedua pewaris generasi masa depan Langga Populinanda dan
Grace Pangentasan, adikku L Djoko Widagdo (1974-2017)*

*“Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak ber-
pengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada
orang muda, baiklah orang bijak mendengar dan menambah
ilmu dan baiklah orang yang berpengalaman memperoleh bahan
pertimbangan”*

(Amsal 1 : 4,5)

The background of the top section features a dark grey horizontal band. Above this band, there are faint, light grey silhouettes of a crowd of people with their arms raised, and a central figure of a person standing on a podium, gesturing with their hands as if speaking. The overall aesthetic is modern and academic.

KATA PENGANTAR

Mengaitkan komunikasi politik dan kepribadian politik bukanlah kajian yang tidak biasa. Beberapa kajian serupa sudah pernah dilakukan seperti dapat ditemukan dalam karya Hargrove, E.C. (1966), Verhulst, B., Valenty, L.O & Feldman, O. (2002). Eaves, L.J., & Hatemi, P.K. (2012), hanyalah menyebut beberapa contoh saja.

Karakteristik kepribadian individu adalah elemen penting, yang bisa dijadikan tolok ukur dari sudut pandang mana kita bisa meninjau kemampuan komunikasi politik seseorang. Tanpa memahami sisi yang demikian tadi, ekspektasi untuk mengungkap komunikasi politik yang dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai tokoh politik nasional pada zamannya akan sangat sulit.

Era Soekarno dan Soeharto meski oleh generasi milineal saat ini dijuluki sebagai generasi *'old'*, tetapi apa saja yang telah mereka perbuat di masa lalu, tetap menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering untuk diadaptasi sesuai konteks kekinian.

Terlepas dari setuju atau merasa keberatan untuk setuju, dua pemimpin bangsa ini dikenal sebagai tokoh yang fenomenal pada zamannya masing masing. Ketika Indonesia membutuhkan pengakuan akan kemartabatan sebuah bangsa yang harus berdiri sejajar dengan bangsa lain, Soekarno dengan kelihaiannya komunikasi politik terus memompa kobaran semangat melalui orasi-orasi politiknya kepada rakyatnya. Tidak heran, di manapun ia berpidato ribuan orang berduyun-

duyun hadir mendengarkan. Api revolusi terus digelegarkan agar jangan sampai padam.

Soeharto lain lagi. Meski tidak serevolusioner Soekarno, Soeharto mampu mengisi celah-celah kebutuhan rakyatnya dengan nuansa komunikasi politik developmentalis. Kepada rakyat, ia selalu berpesan bahwa setelah kemerdekaan dicapai tidak ada cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan kecuali dengan pembangunan. Pembangunan menjadi kata bertuah yang wajib dikonsumsi setiap saat melalui media komunikasi cetak, audio-visual maupun tatap muka.

Strategi komunikasi politik Soeharto yang dianggap paling menonjol adalah melalui Klompencapir (Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa). Strategi di mana ada komunikasi interaktif antara Soeharto dan rakyat ini dilakukan secara periodik dalam kemasan egaliter. Pesan tersirat yang ingin disampaikan adalah relasi pemimpin dan rakyat semestinya tidak berjarak. Apapun persoalan keseharian, dapat dipercakapkan secara langsung kepada pemimpinnya. Topik yang diangkat setiap kali Klompencapir dilakukan sangat variatif. Itu saja sudah membuktikan bahwa rakyat Indonesia pasca kemerdekaan terus bergeliat dalam dinamika yang tidak pernah berhenti.

Periode kepemimpinan bangsa adalah runtutan waktu dalam serial keberlanjutan perjuangan sebuah bangsa yang saling mengisi dan melengkapi. Hingga saat ini (2018), Indonesia paling tidak sudah masuk dalam lima periodisasi yakni masa perjuangan kemerdekaan (era Soekarno), masa pembangunan (era Soeharto), masa transisi (era B.J Habibie) dan masa reformasi (Abdurachman Wahid/Gus Dur, Megawati) serta pasca reformasi (era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo).

Membaca ulang metode dan strategi komunikasi politik Soekarno dan Soeharto dalam buku ini, seolah juga sedang mengalirkan energi positif generasi *old* kepada generasi *now* yang sama sekali secara fisik tidak pernah berpapasan. Bukan saja berpapasan, muncul dalam imajinasi mereka siapa dua tokoh ini dalam sejarah pergerakan bangsa mungkin saja hanya samar-samar terlintas.

Generasi *now*, yang setiap hari tidak pernah lepas dari *gadget*, tentu akan merasa asing siapa dua tokoh ini bila tidak dipaksa untuk tahu dan paham jejak rekam sejarah mereka. Generasi milenial bisa ada seperti sekarang ini, juga atas berkat dan jasa mereka yang telah ada lebih dulu. Tanpa generasi *old*, generasi *now* barangkali tidak pernah ada.

Jujur, ingin penulis katakan di awal, buku ini bukan saja mengajak berpetualang dengan mesin waktu ke beberapa tahun yang silam, tetapi juga sedang membangun kesadaran intelektual bahwa mengerti sejarah itu penting. Tanpa sebuah kesadaran sejarah, maka arah dan orientasi bangsa ini kedepan akan tidak jelas. Maka di situlah esensi buku ini ditulis dengan melakukan reformatisasi dari sebuah karya riset literatur yang pernah penulis lakukan.

Pada sisi yang lain, buku ini sengaja dihadirkan sebagai respons konkrit terhadap pemberlakuan Kurikulum 2017 di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya di mana mata kuliah Komunikasi Politik adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa.

Pada kesempatan yang baik ini pula, patut penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesainya penulisan buku ini. Untuk kedua anak kami Langga Populinanda dan Grace Pangentasan kiranya buku ini menjadi inspirasi untuk berkarya di masa depan. Tak lupa untuk Ari Noerhayati, bunda dari kedua anak kami yang terus mendorong menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pencerahan dan kebaikan bersama, pun disampaikan ucapan terima kasih.

Seluruh kolega dipeminat Komunikasi Massa (Ido, Desi, Fanni, Mega, Daniel, Agusly, ~~Cherry~~, Joanne, Jandy dan Grace) dan dipeminat Komunikasi Korporasi (Inggrit, Tisyah, Fefe, Vita, Vidya) diucapkan terima kasih. Dengan caranya masing-masing mereka telah berkontribusi dalam membangun spirit dan atmosphere akademis yang kondusif di lingkungan Prodi Ilmu Komunikasi. Rekan diskusi yang lain seperti bung Djoko, pak Otto, Prof. Burhan, serta kawan sepelayanan di PHM CKJW Karangpilang, secara tulus disampaikan ucapan terima kasih.

Akhirnya di atas segalanya itu, rasa syukur, hormat dan pujian tak terhingga penulis naikkan kepada Allah Bapa melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan perlindungan, penyertaan dan bimbingannya hingga saat ini.

Surabaya, 14 Februari 2018

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I MEMAHAMI TOKOH POLITK DAN PEMIKIRAN POLITIK

- A. Tokoh Politik: Selayang Pandang
- B. Pemikiran Politik: Selayang Pandang

BAB II KEPRIBADIAN POLITIK

- A. Studi Tentang Kepribadian Politik
- B. Kepribadian Politik dan Pemikiran Politik
- C. Manifestasi Kepribadian dalam Pemikiran Politik

BAB III PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO

- A. Soekarno dan Ideologi Pancasila
- B. Soekarno dan Demokrasi
- C. Soekarno dan Ekonomi
- D. Soekarno dan Politik Luar Negeri

BAB IV PEMIKIRAN POLITIK SOEHARTO

- A. Soeharto dan Ideologi Pancasila
- B. Soeharto dan Demokrasi
- C. Soeharto dan Ekonomi
- D. Soeharto dan Politik Luar Negeri

BAB V PERBANDINGAN PEMIKIRAN SOEKARNO DAN SOEHARTO

- A. Faktor yang Mempengaruhi
- B. Persamaan-persamaan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto
- C. Perbedaan-perbedaan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto
- D. Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto dalam Dichotomi Tradisional dan Modern

BAB VI PENUTUP: MENEBAK TITISNYA RAMALAN

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS



MEMAHAMI TOKOH POLITIK DAN PEMIKIRAN POLITIK

1

A. Tokoh Politik: Selayang Pandang

Tokoh politik sejatinya adalah produsen isu-isu politik. Isu-isu politik adalah jembatan yang merelasikan publik dengan politik dalam berkomunikasi. Maka tidaklah berlebihan bila hendak bertekad untuk melakukan suatu kajian yang amat dalam tentang komunikasi politik baik pada era Soekarno, Soeharto dan reformasi seperti saat ini, persoalan yang akan muncul senantiasa akan merelevansikan semua pembahasan itu paling tidak diseputaran pribadi-pribadi. Meski apapun penghampiran atau perspektif yang akan kita tempuh, tak akan jauh beranjak dari seputar hadirnya sang tokoh tersebut. Sebagaimana disadari oleh Dr. Onghokham seorang sejarawan Indonesia yang mengatakan:

“Kalau orang membicarakan politik Indonesia, selalu berkisar pada tokoh-tokoh, pada pribadi-pribadi perorangan. Lebih-lebih pada zaman Presiden Soekarno (1945–1965), seperti halnya dapat dilihat dari Memoir Jendral AH.Nasution para menteri, Jendral, Politisi, Pejabat tinggi dan lembaga ini dan itu, semuanya akan-akan tunduk terhadap seorang tokoh yang menjadi pucuk pimpinan negara”¹⁾

Sudah barang tentu menyadari akan keterusterangan ahli sejarah tadi, kita diperhadapkan akan kenyataan bahwa gelombang pasang

surut perubahan sistem politik Indonesia selalu bergerak tak lepas dari figur pimpinan nasional. Dus, itu adalah permasalahan politik. Permasalahan politik dapat dikaji melalui berbagai macam pendekatan. Menurut seorang teoritis ilmu politik Alfian²⁾, ia dapat dipelajari dari sudut kekuasaan, struktur politik, partisipasi politik, komunikasi politik, konstitusi, pendidikan dan sosialisasi politik, pemikiran politik dan juga kebudayaan politik.

Tentu dari beberapa penghamparan yang dikemukakan dalam melihat persoalan politik tadi, penulis berasumsi bahwa tak mungkin meneropong problem-problem politik tersebut dari semua aspek dan pendekatan sekaligus. Selain hal itu merupakan kajian yang maha luas jangkauannya, sudah pasti hal tersebut menimbulkan kesangsian reputasi terhadap telaah ilmiah yang sungguh-sungguh. Dengan menjatuhkan pilihan pendekatan dari sudut pandang pemikiran politik yang dikaitkan dengan komunikasi politik, diharapkan pembahasan akan lebih kaya perspektif dan lebih mudah dipahami. Terlebih jika merelevansikan dengan era kekinian di mana komunikasi politik bukan sekedar urusan penguasa atau negara *an sich*, tetapi sudah menjadi percakapan semua anak bangsa yang difasilitasi kemudahan akses media sosial yang beraneka ragam.

Bahkan Mc Nair (2007) dalam bukunya *An Introduction to Political Communication* menyebutkan bahwa komunikasi politik sejatinya bergerak dalam lintasan citizen atau warga-negara, media dan isu politik yang diproduksi oleh organisasi politik, pemerintah, organisasi penekan, organisasi publik bahkan organisasi teroris.

Maka jika tidak cermat, sangat mungkin isu-isu yang beredar justru bukan aktualisasi konsep berpikir yang jernih dan logis tetapi sekedar kepingan-kepingan ide-ide liar yang dipungut secara serampangan dan tidak jelas konstruksi berpikirnya. Nach, inilah yang ramai disebut publik sebagai informasi *hoax* atau bohong yang menyesatkan cara berpikir yang sehat dan rasional.

Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, pemikiran politik adalah suatu bidang yang sangat menarik di dalam ilmu politik. Lebih jauh beliau menegaskan:

“Ia membawa kita tidak saja kepada pemahaman seorang pemikir terhadap suatu masalah politik pusat perhatiannya, tetapi juga

sering menghadapkan kita pada selalu debat antara pemikir tersebut dengan para pemikir lainnya. Malah tidak jarang pemikiran politik menampilkan perbincangan antara seorang pemikir dengan masyarakat secara keseluruhan”.³⁾

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa untuk bisa menelusuri buah pikir seseorang, kita tidak bisa melepaskan diri dari pertautan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya. Sehingga dengan begitu, kita mampu memilah-milah permasalahan-permasalahan tidak hanya politik saja tetapi juga aspek-aspek kehidupan lainnya semacam ekonomi, sosial dan juga budaya secara lebih komprehensif. Justru akan lebih riskan, jikalau kita tidak menaruh perhatian pada realitas semacam itu.

Berdasarkan penelitian Herbert Feith⁴⁾, ditemukan bahwa ada tiga macam generalisasi dari cara berpikir khas Indonesia. Yang *pertama*, adalah bersifat moralis, bercirikan kecenderungan untuk melihat masyarakat sebagai tidak berbeda-beda dan pemikiran ini bersifat optimis. *Kedua*, pemikiran politik Indonesia yang cenderung untuk tidak melihat masyarakat mereka terbagi dalam berbagai golongan yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. *Ketiga*, adalah pemikiran politik Indonesia yang bersifat optimisme dalam bentuk voluntarisme atau anggapan bahwa segala sesuatu akan tercapai, asal dihadapi dengan pikiran yang jernih, itikad baik, penuh keyakinan serta dengan solidaritas yang tinggi.

Sudah selayaknya jikalau hasil penelitian sejarawan Australia tadi kurang relevan dan valid lagi dengan perkembangan alur berpikir Indonesia kini. Namun ia semakin memiliki bobot/arti tatkala kita tempatkan ia dalam kurun waktu yang sinkron. Sebagai instrumen pembantu guna mendekati dasar-dasar pemikiran politik yang ditanam pada masa-masa ia sudah interest pada soal-soal politik hingga menjelang tumbangannya ia dari tahta kekuasaan, sebuah liku-liku kehidupan berpikir yang dialami Soekarno. Dan hal yang sama menimpa juga pada penggantinya, Soeharto. Penelusuran pada minatnya terhadap pemikiran-pemikiran restrukturisasi negara, pada hakikatnya juga banyak meminjam (betapapun dalam variasi tertentu) dari patokan-patokan yang pernah dirumuskan Feith tadi.

Dari kesadaran semacam itu, memang sulit untuk diingkari kalau waktu tidak membawa perubahan apa-apa. Karena pergeseran waktu itulah, menyusul pula hadirnya perbedaan-perbedaan perspektif dalam melihat suatu persoalan khususnya persoalan politik. Betapapun persoalan itu sama, namun lantaran waktu yang telah berganti sudah pasti, model jalan keluar pun tak akan sama. Inilah yang akhirnya melahirkan perbedaan-perbedaan pemikiran politik dari individu-individu yang hidup pada kurun masa yang berbeda.

Soekarno disatu sisi dan Soeharto dilain sisi adalah pilihan penulis, untuk dicoba telusuri guna memperoleh gambaran yang kongkrit akan adanya kesenjangan dan keseragaman-keseragaman berpikir karena adanya rentang waktu mereka menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan. Soekarno yang hidup ditengah hiruk-pikuk kancan revolusi akankah relevan jika kita sandingkan dengan Soeharto yang hidup di masa-masa gelora pengisian kemerdekaan dengan aneka bentuk pembangunan. Di sini kemudian kita akan mempertaruhkan nilai-nilai ketradisionalan dan nilai-nilai kmodern corak berpikir. Sebab kalau memang benar, waktu kita pakai sebagai parameter yang sah untuk mengukur adanya perbedaan-perbedaan sekaligus persamaan-persamaan cara berpikir kedua tokoh tersebut, tentu kita akan menemukan jejak-jejak indikator itu di sana. Hal yang sama kemungkinan akan ditemukan bila studi ini diperluas hingga pasca reformasi misalnya dengan membandingkan model komunikasi politik atau pemikiran politik SBY dan Jokowi.

Dari pemahaman yang demikian tadi, pasti kita akan memperoleh kesamaran pola-pola perbandingan Soekarno dan Soeharto semakin akurat dan jelas. Sebagaimana sedikit disinggung oleh O.G Roeders:

“Prestasinya dalam bidang politik dan ekonomi disebut sepiantas lalu. Pembawaannya kurang gaya keahlian berpidato dan keagungan seperti Soekarno yang mendahuluinya, ia masih dapat dipuji tetapi membosankan, tingkah lakunya sopan, tetapi kaku, pidato-pidatonya menarik tapi hampir tidak dapat menimbulkan emosi dan tepuk tangan yang menggemuruh”.⁵⁾

Secara implisit penilaian subjektif Roeders tersebut mengukuhkan secara eksistensial bahwa memang membandingkan dua profil ini sungguh mengundang pesona. Penulis berasumsi bahwa minat/

keterkaitan mengayak sejumlah perbedaan dan persamaan berpikir dua orang ini tidak semata-mata monopoli kalangan akademisi belaka tapi orang awam pun pasti menaruh perhatian yang cukup besar. Terlebih di era digital media saat ini, informasi tersedia secara melimpah ruah, tergantung bagaimana kita hendak memilih dan memilahnya sesuai kepentingan kita.

Penempatan pengkajian tentang figur pimpinan nasional yang pernah dan memerintah negara Republik Indonesia ini, seakan respon reflektif beberapa pandangan tentang mereka. Pakar politik Indonesia Dr. Nazaruddin⁶⁾ mengatakan bahwa Soekarno adalah ibarat sumur kajian yang tak pernah kering. Sedangkan Alfian⁷⁾ menilai, Soekarno figur yang keranjingan memperkenalkan istilah-istilah, kependekan-kependekan atau jargon baru ke dalam perbendaharaan politik telah sangat mempersulit peneliti ilmiah untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang jangkauan melampaui batas-batas negaranya sendiri. Sementara itu seorang penulis, Roeders⁸⁾ menilai, Soeharto adalah orang yang belum dikenal dan misterius. Dan yang lainnya mengatakan Soeharto kecil bukanlah seorang anak bangsawan yang telah dipersiapkan oleh orang tuanya menjadi pemimpin bangsa. Ia bukan anak yang mempunyai pertanda.⁹⁾ Berangkat dari kabut kerahasiaan semacam itu, penulisan perbandingan komunikasi dan pemikiran politik Soekarno dan Soeharto ini, bermaksud menyingkap barang sedikit ketertutupan-ketertutupan yang masih belum terkuak agak longgar. Dengan lain perkataan pembahasan ini juga diartikan untuk membuka tabir kegelapan kearah cakrawala pengetahuan ilmiah yang lebih luas dan lebar.

Meski penelusuran kajian ini lebih banyak berbekal pada tingkat pemahaman teoritikal penilaian politik, namun hal itu tidak bearti mengabaikan dan mengesampingkan tindakan-tindakan implementatif mereka. Oleh sebab itu interpretasi para pemikir terhadap kehidupan masyarakatnya secara otomatis melibatkan latar belakang mereka masing-masing maka dengan sendirinya pula pemikiran politik merefleksikan liku-liku kehidupan mereka. Begitu pula dengan tanggapan yang juga diwarnai oleh latar belakang kehidupan masing-masing pemikir. Disatu pihak sama dengan pemikiran, tindakan politik yang dilakukan oleh seseorang juga mencerminkan penafsiran dan tanggapannya terhadap keadaan masyarakat serta latar belakang

kehidupannya. Akan tetapi sering kita lihat adanya tingkah laku politik atau model komunikasi politik seorang pimpinan yang berbeda dari pemikirannya. Perbedaan itu bisa mencakup keseluruhan pemikirannya ataupun sebagian daripadanya. Dalam hal tingkah lakunya berbeda dari pemikirannya maka itu berarti bahwa ia telah meninggalkan atau tidak lagi menganut pemikiran yang tengah diketengangkannya. Dan dalam hal tidak mempraktikkan sebagian dari pemikirannya, maka ini berarti bahwa ia telah meninggalkan bagian dari pemikirannya itu.

Barangkali bukanlah kemutlakan bahwa seorang pemikir sekaligus pelaksana politik, akan meninggalkan pemikirannya sama sekali. Jarang sekali kita melihat seorang pemikir sekaligus praktisi mau berkorban melepaskan gagasan-gagasan politiknya secara total begitu saja. Bagaimanapun ia senantiasa berusaha untuk menerapkan pemikiran-pemikiran utamanya, karena hal itu adalah merupakan momentum yang sangat didambakan guna meraih orgasme puncak. Tapi mungkin saja ia melupakan untuk sementara waktu, tapi kemudian dicobanya lagi pada kesempatan lain. Kondisi demikian tadi menurut Nazaruddin¹⁰), disebabkan dua hal yakni pertama berasal dari masyarakat sendiri yang merupakan hambatan-hambatan yang tak dapat dihindarkan oleh si pemikir yang merangkap sebagai pelaku yang merangkap sebagai pelaku politik itu. Kedua adalah adanya perbedaan ruang dan waktu antara saat pencetusan pikiran dan pelaksanaannya.

Bertolak dari kerangka dasar berpijak semacam tersebut di atas, tentu diharapkan akan lahir pemahaman baru untuk mendekati persoalan-persoalan politik dengan penghampiran-penghampiran yang cocok dan akurat tanpa adanya penilaian apriori serta subjektifitas yang berlebihan. Dengan begitu kita mampu menempatkan keduanya dalam posisi yang proporsional serta mengharapakan hasil kajian yang objektif dan senetral mungkin.

B. Pemikiran Politik: Selayang Pandang

Menunjuk pada salah satu sudut pemikiran Soekarno dan Soeharto, semakin terasa jelas untuk kita lihat orientasi dan tindakan implementatif buah pikir mereka. Dalam hal pemikiran tentang kebijaksanaan politik luar negeri, seolah kita diperhadapkan pada

dua realitas yang paling kontroversi. Soekarno misalnya, adalah figur yang senang mengekspresikan kebijaksanaan politik luar negeri secara progresif revolusioner. Sehingga wajar saja jikalau, menempatkan kebijaksanaan luar negeri dengan kecondongan memihak Soviet komunis. Karena disinilah akar strategi kebijaksanaan luar negeri progresif revolusioner terbangun.

Sementara Soeharto lain lagi dalam mengaktualisasikan pemikiran politik luar negeri bebas aktifnya. Ia lebih menekankan upaya menjaga keselarasan dan keharmonisan hubungan dengan negara-negara sahabat. Ia lebih mengesankan sikap kehati-hatian dalam berdiplomasi. Bagi Soeharto, haluan kebijakan politik luar negeri bebas aktif tidak sama dengan bersikap netral. Indonesia tidak menginginkan politik netral ataupun netralisme hanya karena ingin berteman dengan setiap orang. Ia menekan akan adanya kebebasan dalam menentukan pendiriannya berhubungan dengan masalah-masalah dan kejadian-kejadian internasional dan membantu terciptanya perdamaian dunia.

Mencoba menarik suatu kesimpulan sementara awal ini, sudah nampak jelas betapa *policy* (kebijaksanaan) luar negeri yang mereka bangun mempunyai orientasi dan misi yang sangat berbeda, meski dibentuk diatas landasan keseragaman konsep pemikiran yakni politik luar negerinya. Ini berarti sudah mengisyaratkan adanya perbedaan yang amat kuat dalam implementasi pemikiran luar negeri di antara kedua tokoh ini..

Sudah barang tentu menelusuri pemikiran-pemikiran politik mereka, semua itu tak berhenti hanya sampai batas apa yang dicetuskan semata. Tetapi juga perlu dipahami akar penyebabnya. Sehingga akhirnya bisa ditarik satu kesimpulan yang komprehensif. Oleh sebab itu yang menyeluruh penting kiranya digunakan pendekatan-pendekatan ilmiah yang relevan.. Sebab, mengamati kegiatan politik atau pemikiran politik sangat diperlukan adanya perspektif atau kerangka acuan apa yang dipakai. Karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat pengamatan dan penilaian kita. Menurut Vernon Van Dijke¹¹⁾, pendekatan atau *approach* adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Sedang menurut Prof. Budiardjo diberi batasan sebagai:

“Pendekatan adalah mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan”.¹²⁾

Dengan pemahaman di atas barangkali bisa disimpulkan bahwa pendekatan adalah patokan tertentu yang dipakai sebagai parameter dalam menghampiri masalah dengan ukuran dan data yang relevan. Dalam konteks yang demikian, penulis berasumsi bahwa telaah kepribadian politik adalah sinkron jikalau menggunakan pendekatan perilaku, sebagaimana konsep pendekatan resmi yang dimiliki disiplin ilmu politik. Sehubungan dengan pendekatan ini David Apter menegaskan:

“Pendekatan utama tingkah laku terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik termasuk proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik”.¹³⁾

Sementara guru besar ilmu politik Indonesia Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa:

“Pendekatan tingkah laku adalah Untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala-gejala yang benar-benar dapat diamati. Perilaku itu dapat hanya terbatas perilaku perorangan, ataupun mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar, organisasi kelompok elit, gerakan massal atau suatu masyarakat politik”.¹⁴⁾

Membicarakan tingkah laku termasuk di dalamnya bagaimana komunikasi politik dilakukan terlepas dari karakter atau kepribadian seseorang sungguh pekerjaan yang sia-sia. Oleh karena itu dalam pembahasan, dua konsep ini harus dipertemukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan buah pembahasan yang saling terjadi interaksi satu sama lain. Memang semenjak awal disadari bahwa komitmen untuk memperbandingkan kepribadian, sikap, pemikiran dan keyakinan guna menjelaskan perilaku politik adalah merupakan implementasi konsep Psikologi politik¹⁵⁾. Psikologi politik berasumsi bahwa tindakan-tindakan politik, seperti bentuk-bentuk perilaku lainnya adalah hasil interaksi individu terhadap rangsangan lingkungan sebelum membahas permasalahan itu lebih jauh.

Dalam skope objek kajian kepribadian politik memang masih ditemui kendala yang amat menyulitkan, oleh karena belum adanya titik keseragaman yang jelas siapa sebenarnya lebih berhak menggarap lahan kajian ini, para ilmuwan politik atautkah para psikolog. Sehingga masih ditemui dichotomi terminologis dalam menerjemahkan istilah kepribadian (*personality*). Menurut James Drever seorang pakar psikologi berpendapat:

“Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dan tergabung sifat-sifat sosial, moral dan fisik dari seorang individu, yang juga nampak pada orang lain dalam kehidupan masyarakat yang saling memberi dan menerima”.¹⁶⁾

Psikolog yang lain mendefinisikan bahwa:

*“Personality refers to a construct that is introduced to account for the regularities and an individual’s behaviors he responds to diverse stimuli”.*¹⁷⁾

Caprara, dkk (2006) menguatkan bahwa pilihan politik itu sangat tergantung pada preferensi kepribadian yang terkait pada sifat dan nilai pribadi ketimbang karakter sosial.

Sementara dari kalangan ilmuwan politikpun tak mau kalah dalam upaya memberikan batasan tersendiri tentang kepribadian ini. Antara lain dikatakan bahwa:

“Kepribadian adalah pembawaan-pembawaan yang teratur dan berlangsung terus menerus yang mengakibatkan seseorang menanggapi lingkungannya dengan cara-cara khas”.¹⁸⁾

Dari beberapa pengertian yang sempat dikutip di atas baik dari disiplin psikologi maupun dari disiplin ilmu politik agaknya memang tak jauh berkisar dari keberadaan karakter-karakter individual yang terbentuk oleh karena pengaruh dari dalam dan luar diri mereka. Namun persoalan akan muncul jikalau konsep tunggal tersebut harus dijadikan kata majemuk menjadi kepribadian politik. Dari sudut pandang ilmu psikologi tentu kepribadian politik akan lebih banyak dikaji lewat penghampiran-penghampiran disiplin tersebut, sehingga pada akhirnya tentu akan memuaskan para penganut disiplin ilmu semata. Persoalan yang sama akan kita jumpai tatkala ia lebih banyak ditelusuri lewat lensa intelektual ilmu politik. Dan pengupasan permasalahan tentu juga akan

memunculkan titik puas sepihak saja yakni khususnya para penganut disiplin ilmu ini semata. Persoalan yang sama akan kita jumpai tatkala ia lebih banyak ditelusuri lewat lensa intelektual ilmu politik. Dan pengupasan permasalahan tentu juga akan memunculkan titik puas sepihak saja yakni khususnya para penganut ilmu politik.

Berdasarkan belum terjalannya titik kesepakatan ini sudah barang tentu upaya penelaahaan studi ini tidak dimaksudkan guna memperpanjang arus polemik antar dua faksi ini semakin berkepanjangan, melainkan lebih menekankan pada konseptualisasi kepribadian politik yang sudah ada dari sudut pandang ilmu politik. Kepribadian politik menurut definisi Jack C. Plano¹⁹⁾ adalah watak yang membentuk tanggapan terhadap stimuli politik. Merujuk dari pemahaman dasar atas pengertian kepribadian politik tersebut diatas, penulis sampai pada kesimpulan bahwa yang dimaksud kepribadian politik adalah karakter individual yang dimiliki perorangan politik menghasilkan tindakan-tindakan politik.

Oleh sebab itu, agaknya tak bisa dipungkiri langsung atau tidak langsung bahwa kepribadian politik yang sudah terpolakan dalam diri seseorang itu, sedikit banyak akan memberikan andil bagi lahirnya pemikiran-pemikiran politik individu tersebut. Menurut Nazaruddin pemikiran politik diberikan pemahaman sebagai:

“Pemikiran politik itu tidak hanya mengungkapkan pikiran-pikiran politik belaka. Ia mencairkan keadaan suatu masyarakat beserta nilai-nilai yang dimilikinya pada suatu masa, disamping menampilkan bagaimana interpretasi dan tanggapan para pemikir terhadap keadaan dan nilai-nilai tersebut”.²⁰⁾

Dengan demikian semakin jelaslah bahwasannya kehadiran pemikiran politik tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat tersebut. Sehingga dengan begitu dalam merelavansinya dengan pemikiran Soekarno dan Soeharto inipun, penulis berkeyakinan bahwa ia tidak bisa dipisahkan begitu saja dari nilai-nilai kemopdneran dan ketradisionalan suatu zaman. Menurut James A. Bill²¹⁾, polarisasi nilai-nilai ketradisionalan dan kemodernan tersebut meliputi:

Tradisional	Modern
Rural	Urban
Folk	Urban
Agricultural	industrial
Primitive	dynamic
Sacred	seculer
Geimenschaft	Gesellschaft
Traditional	Rational
Traditional	Modern

Sementara itu Deliar Noer²²⁾, mengkategorikan variabel-variabel ketradisional dan kemodern itu adalah sebagai berikut.

Tidak menjaga waktu	dan menjaga waktu
Statis	dan dinamis
Tertutup	dan terbuka
Orientasi pada masa lalu	dan orientasi pada masa hadapan
Status otomatis	dan status karena prestasi
Tidak lugas	dan lugas
Keterikatan primordial	dan keterikatan pada lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan dua pendapat di atas, barangkali tidaklah berlebihan jika penulis menyimpulkan bahwa polarisasi nilai-nilai ketradisional dan kemodernan tersebut tidak terlampaui banyak bergerak dari persoalan-persoalan, statis dan dinamis, status otomatis dan status karena prestasi, peranan mengambang dan peranan spesifik, tertutup dan terbuka, tradisional dan rasional, orientasi primordial dan orientasi non primordial.

Dengan melihat realitas semacam di atas, mungkin kemudian akan membawa kita pada kemudahan gerak analisis dua figur tersebut dalam cetusan-cetusan pemikirannya, oleh karena adanya bantuan sistem nilai yang sudah terpola tersebut. Sebab sistem nilai inilah, yang menurut Alfian²³⁾, dikatakan akan membentuk sikap mental atau pola berpikir manusia dan masyarakat sebagaimana terpantul/tergambar pada sikap dan tingkah laku kehidupan sehari-hari baik itu dari segi kehidupan sosial, ekonomi politik atau lainnya.

Berangkat dari penghampiran nilai tradisional dan modern tersebut di atas, agaknya telah bisa menempatkan posisi refleksi pemikiran Soekarno dan Soeharto terhadap strategi kebijaksanaan politik luar negeri dalam lingkup terbuka dan tertutup. Soekarno, meski pada prinsipnya menganut pola pemikiran politik luar negerinya bebas aktif namun pada tindakan implementatifnya lebih banyak membatasi diri pada hubungan dengan negara-negara sosialis komunis. Sehingga ia menempatkan kecondongan yang memihak secara kentara dan terkesan lebih tertutup. Lain halnya dengan Soeharto meski berangkat dari strategi kebijaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif juga namun ia lebih terbuka dan moderat dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara dikawasan dunia ini. Prinsip tetangga dan menjaga persahabatan sebagai titik tekan utamanya sangat ia perhatikan. Sehingga jalinan hubungan dan kerja sama saling pengertian dan rasa perdamaian.

Dari penjelasan awal ini cukup memberikan petunjuk yang jelas terkait perbedaan-perbedaan dalam berpikir dan mengaktualisasikan hasil pemikiran mereka. Penulis yakin, semakin banyak variabel cetusan pemikiran yang terekspresikan semakin mempermudah kita melihat kesamaan dan perbedaan hasil pemikiran-pemikiran politik mereka.



KEPRIBADIAN POLITIK

2

Manusia sebenarnya bukanlah kesatuan yang jelas. Ia tidak dapat dilepaskan dari pola-pola sosial dan lingkungan sekitar. Dengan demikian manusia itu baru berarti jikalau dia sudah memahami eksistensi dan mampu berinteraksi dengan sekitarnya. Oleh sebab itu, makna eksistensi manusia pertama-tama harus dipandang sebagai suatu kerangka acuan yang menyeluruh bagi pelbagai fenomena yang tidak mungkin berdiri sendiri. Fenomena-fenomena serupa itu seolah-olah harus ditafsirkan dalam rangka situasi yang menyeluruh seorang manusia yang berbuat, yang terarah pada sesuatu dan memaksudkan sesuatu. Karena itu pencirian, karakteristik (perwatakan) dan langgam pola hidup merupakan totalitas komponen-komponen fisik dan psikis yang tersimpul dalam satu kesatuan kepribadian manusia. Dan sah saja, jikalau dikatakan bahwa kepribadian itu samar-samar dan disamakan dengan peran apa yang harus dimainkan dalam kerangka yang lebih luas¹⁾.

Tanpa perkaitan itu, seorang diri saja kepribadian sebenarnya tak berarti apa-apa. Ia sama saja dengan lingkup sosio-mistis²⁾. Itulah sebabnya, tidak mungkin pula meneliti kepribadian semata, terlepas dari peran apa yang dimainkan, begitu pula sebaliknya.

A. Studi Tentang Kepribadian Politik

Betapapun belum sepopuler kajian semisal tentang kebudayaan politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, sosialisasi politik, namun studi tentang komunikasi politik yang dikaitkan dengan kepribadian dan pemikiran politik tetap wilayah kajian yang menarik minimal dilihat dari dua area yakni ilmu komunikasi dan ilmu politik. Tentu ini seolah memberi justifikasi yang kuat bahwa dalam mempelajari ilmu politik yang pada hakikatnya adalah bagaimana memperoleh kekuasaan dan pengambilan keputusan, maka kepribadian seseorang pemimpin yang notabene adalah pemilik kekuasaan itu sendiri sangatlah menentukan orientasi, pemikiran, pola perilaku serta bagaimana semua itu diekspresikan dalam model komunikasi politik sehari-harinya.

Penelitian studi kepribadian politik secara mendalam memang belum banyak dilakukan. Diawali dengan pengkajian oleh Harold D. Lasswell (*Psychopathology and Politics*, 1930), rupanya masih belum juga merangsang ilmuwan-ilmuwan politik untuk semakin menambah semarak khasanah kepustakaan ilmu politik. Baru, 30 tahun kemudian Richard S. Lazarus, (*Personality and Adjustment*, 1963) menyusul beberapa waktu kemudian Fred I Greenstein (*Personality and politics ; problems of Evidence, Inference and Conceptualization*, 1969). Agaknya buku yang terkakhir itulah yang masih digunakan sebagai buku pegangan (*handbook*) bagi sejumlah mahasiswa/sejumlah kalangan yang berminat mendalami studi kepribadian politik. Di Indonesia buku yang representatif mengupas kajian tersebut juga belum ada.

Studi kepribadian politik merupakan objek kajian yang masih dipertengkarkan³⁾ antara para pakar psikologi dan para ilmuwan politik tentang batas-batas kewenangan pembahasannya. Pertengkaran itu belum bisa terselesaikan, oleh karena belum tercapainya titik kesepakatan antara dua kubu tersebut. Kondisi itu diperkuat oleh adanya sejumlah indikasi terkait sejumlah dikotomi terminologis dalam menerjemahkan istilah kepribadian (*personality*). James Drever⁴⁾ misalnya, mendefinisikan kepribadian sebagai:

“Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dan tergabung sifat-sifat sosial, moral dan fisik dari seorang individu yang juga nampak pada orang lain dalam kehidupan masyarakat yang saling memberi dan menerima”.

Sementara dari kalangan ilmuwan politik, Jack C. Plano⁵⁾ pun tak mau kalah dalam upaya memberikan batasan tersendiri tentang kepribadian ini. Antara lain dia mengatakan demikian:

“Kepribadian adalah pembawaan-pembawaan yang teratur dan berlangsung terus menerus yang mengakibatkan seorang menanggapi lingkungannya dengan cara-cara khas”.

Berangkat dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kepribadian itu terbentuk oleh karena pengaruh yang sudah terpola dari lingkungan internal dan eksternal dalam diri seseorang dan anggota masyarakat, sementara pengertian kedua cuma membatasi dalam ruang lingkup dirinya sendiri. Hal demikian tentu saja bisa dipahami oleh sebab latar belakang lensa penglihatan dari disiplin ilmu yang memang tak sama.

Namun begitu untuk memperoleh gambaran yang agak lebih terang guna memasuki pembahasan tentang kepribadian politik maka terlebih dulu perlu diketahui teori-teori tentang kepribadian tersebut.

1. Menurut Carl Rogers⁶⁾ menurutnya kepribadian itu dapat dipahami lewat tiga elemen penglihatan:

1) Organisasi yaitu keseluruhan individu, 2) medan *phenomenal* yaitu keseluruhan pengalaman dan yang ketiga ‘*self*’ yaitu bagian medan *phenomenal* yang terdiferensiasikan dan terdiri dari pola-pola pengamatan dan penilaian sadar dari ‘*I*’ dan ‘*me*’.

1. *Organism* memiliki sifat:

- a. *Organism* bereaksi sebagai keseluruhan terhadap medan *phenomenal* dengan maksud memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- b. *Organism* mempunyai satu motif dasar yaitu mengaktualisasikan, mempertahankan dan mengembangkan diri.
- c. *Organism* mungkin melambungkan pengalamannya, sehingga hal itu disadari atau mungkin menolak pelambangan itu sehingga pengalaman-pengalamannya.

2. Medan *Phenomenal* punya sifat disadari atau tak disadari tergantung apakah pengalaman yang mendasari medan *phenomenal* itu dilambangkan atau tidak.
3. *Self* mempunyai bermacam-macam sifat:
 - a. *Self* berkembang dari interaksi organisme dengan lingkungannya.
 - b. *Self* mungkin mengintegrasikan nilai-nilai orang lain dan mengamatinya dalam bentuk yang tidak wajar.
 - c. *Self* mengajar (menginginkan) *consistency* (kebutuhan/kesatuan, dan keselarasan).
 - d. *Organism* bertingkah laku dalam cara yang selaras yang selaras (*Consistent*) dengan *self*.
 - e. Pengalaman-pengalaman yang tak selaras dengan struktur *self* diamati sebagai ancaman.
 - f. *Self* mungkin berubah sebagai hasil pematangan (*maturation*) dan belajar.
2. Sigmud Freud⁷⁾ melukiskan teori kepribadian adalah terdiri atas struktur kepribadian, dinamika kepribadian dan perkembangan kepribadian.
 1. Struktur kepribadian disini harus didasarkan pada adaptasi dengan lingkungan yang terdiri atas tiga aspek yaitu
 - a. *Das Es (the id)* atau aspek biologis yakni merupakan sistem yang original di dalam kepribadian berisikan hal-hal yang terbawa sejak lahir dan bersifat subyektif.
 - b. *Das Ich (the ego)* atau psikologis yaitu timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan (*reality*).
 - c. *Das Ueber Ich (the super ego)* atau aspek sosiologis yakni merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya yang dimaksudkan dengan berbagai perintah dan larangan.

2. Dinamika kepribadian yakni menganggap organisme manusia sebagai suatu kompleks sistem energi, yang memperoleh energi dan makanan serta menyalurkannya lewat penafsiran, berpikir dan sebagainya.
3. Perkembangan kepribadian yaitu bahwa kepribadian sebenarnya terbentuk sejak usia lima tahun dan perkembangan selanjutnya merupakan penghalusan struktur dasar saja.

Sampai disini sudah semakin jelas bahwa untuk memahami studi kepribadian politik memang tidak bisa jauh terlepas dari penghampiran-penghampiran disiplin psikologi. Dalam pengertian psikologi, kepribadian politik memang mencakup tiga hal yaitu *personality*, *attitude* dan *behavior*. Tiga hal tersebut (kepribadian, sikap dan tingkah laku) mengintegrasikan dalam satu kesatuan yang utuh.

Namun begitu penekanan kata ‘politik’ dibelakang kata ‘kepribadian’ merupakan aksentuasi disiplin ilmu yang menuntut suatu konsekuensi ilmiah yang tidak ringan. Sebab itu guna mempermudah pembahasan dalam buku ini, penulis memang tidak hendak menawarkan suatu polemik pendapat antara dua disiplin ini melainkan lebih memberi titik tekan pada pengertian-pengertian yang sudah ada dalam disiplin ilmu politik. Kepribadian politik menurut Jack C. Plano⁸⁾ adalah watak yang membentuk tanggapan-tanggapan terhadap stimulasi politik. Sedangkan dalam pengertian yang agak longgar menurut sarjana ilmu politik Inggris. Greenstein⁹⁾ antara lain mengatakan.

“My most primitive assumption is that politics is influenced in important ways by factors that are commonly summarized by term “personality”. I am regularly struck by how, as one’s perspective on political activity becomes closer and more detailed, the political actors begin to loom as full-blown individuals who are in fleeced in politically relevant ways by the various strengths weakness to which the human species is subject ... “

Berpangkal tolak dari dua pendapat diatas dapat kemudian ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya yang dimaksud kepribadian politik adalah karakter individual yang dimiliki perorangan dalam interaksi dengan lingkungannya akibat stimulasi-stimulasi politik menghasilkan tindakan-tindakan politik. Definisi inilah yang penulis pakai sebagai definisi operasional dalam pembahasan telaah kepribadian politik. Dengan harapan bisa lebih merelevansikan secara pas dan

jelas sebagai pedoman buku guna memandu setiap pembahasan agar terhindar dari pengkajian pedoman baku yang mengambang.

B. Kepribadian Politik dan Pemikiran Politik

Sudah dapat dipastikan, jikalau kepribadian politik seseorang tersebut (tokoh politik atau pemimpin politik) akan juga mewarnai cetak gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran politik yang dilahirkan. Hal ini terjadi oleh karena erat kaitannya dalam kehidupan adaptasi serta sosialisasi pribadi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Proses sosialisasi membuat seseorang menjadi tahu bagaimana ia semestinya bertingkah diantara anggota masyarakat. Proses sosialisasi juga membawa seseorang dari keadaan tak tahu atau belum tersosialisir menjadi manusia bermasyarakat. Lewat sosialisasi pula, manusia secara pelan-pelan bisa mengenal tuntutan dan persyaratan-persyaratan hidup di lingkungan budayanya. Selanjutnya dari proses belajar dan berlatih tersebut. Seseorang akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya,

Sulit sekali saat sekarang ini, untuk menemukan standar yang baku guna mendeteksi bahwa faktor-faktor keturunan, geografis, kebudayaan dan pengalaman sosial itu bersatu untuk membentuk suatu corak kepribadian tertentu. Paling-paling yang bisa dikatakan hanyalah memang ada salah satu elemen atau faktor yang dominan terhadap kepribadian seseorang namun inipun sifatnya sangat substansial. Untuk itu kita akan sampai pada pernyataan bahwa faktor-faktor penentu corak kepribadian itu terintegralisasi dalam diri seorang/individu. Atau meminjam istilah Arnold Green¹⁰, ini dikatakan sebagai pengalaman-pengalaman khusus (*particular experience*). Menurutnya pengalaman-pengalaman khusus ini terdiri atas dua hal yakni pertama pengalaman yang berasal dari hubungan yang berlangsung secara terus-menerus dan yang kedua pengalaman yang timbul secara tiba-tiba serta terjadi secara kebetulan dan tak akan terulang lagi. Jenis yang pertama terjadi oleh karena proses bersosialisasi dan belajar lewat pergaulan dan lingkungan kesekitarnya serta berlangsung cukup lama. Sementara jenis yang kedua, terjadi oleh karena kondisi-kondisi yang memang menuntut demikian.

Menurut beberapa ahli¹¹⁾ bahwa kepribadian itu dapat terbentuk, dipertahankan dan mengalami perubahan sewaktu terjadi proses sosialisasi. Ada empat faktor yang memengaruhi pembentukan kepribadian seseorang antara lain:

1. Faktor keturunan yaitu manusia dilahirkan dengan suatu struktur anatomi, fisiologis dan urat syarafnya. Kesemuanya itu memberi andil terhadap pembentukan kepribadian, oleh karena faktor-faktor tersebut secara relatif tetap tidak mengalami perubahan.
2. Faktor lingkungan alam (geografis) yang mana mencakup atas empat aspek utama yaitu lokasi, iklim topografi dan sumber-sumber alam. Aspek-aspek ini secara kualitas juga memberi pengaruh terhadap kecenderungan-kecenderungan manusia bersikap dan berperilaku yang pada gilirannya juga akan turut memberi corak terbentuknya kepribadian.
3. Faktor lingkungan kebudayaan yaitu secara normatif manusia telah diperhadapkan pada pilihan-pilihan pranata kebudayaan tertentu sehingga langsung atau tidak langsung akan bermuara terhadap pemolaan individu berdasarkan karakteristik sistem nilai budaya yang berlaku.
4. Faktor lingkungan sosial yakni bertalian pada tingkat sosialisasi individual dalam pergaulannya dengan anggota masyarakat.

Keempat faktor ini memang tidak secara simultan mendominasi kepribadian seseorang melainkan ada faktor yang menonjol sementara yang lainnya kurang menonjol. Pendominasian terhadap salah satu faktor tersebut selain ditentukan oleh pembawaan alamiah seseorang juga dipengaruhi oleh tingkat frekuensi pengaruh eksternal yang masuk dalam diri seorang individu. Oleh sebab itu agar bisa memperoleh pemahaman yang representatif termasuk faktor-faktor mana yang paling menonjol dalam kepribadian seseorang memang perlu kejelian.

Dalam disiplin psikologi pemikiran merupakan salah satu fungsi kejiwaan tertinggi yang dapat dicapai manusia¹²⁾. Karena ketinggian kemampuan mental inilah sehingga manusia dapat mencapai kebudayaan yang tinggi pula, yang selalu berkembang dan bertumbuh dalam proses kemajuannya. Ada beberapa unsur yang sangat penting sehubungan dengan pemikiran sebagai fungsi mental ini yakni:

1. Merupakan suatu kekuatan yang memiliki daya pendorong.
2. Kekuatan ini terorganisasi secara sistematis.
3. Yang diorganisasikannya adalah unsur-unsur psikis atau rohani.
4. Mempunyai dasar kesadaran dan tujuan menciptakan.
5. Apa yang diciptakan itu nampak dalam wujud konsep-konsep materi ataupun gerak-gerak perbuatannya.

Berdasarkan kelima unsur tersebut, dapat dirumuskan pengertian pemikiran dalam arti sebagai fungsi psikis. Pemikiran tak lain adalah kekuatan psikis yang mengorganisasikan secara sistematis unsur-unsur psikis yang lain, sehingga ia dapat mengontrol dan mengendalikan dengan sadar untuk mencapai tujuan menciptakan sesuatu yang baru balik yang bersifat konseptual, material maupun bersifat gerak-gerak perbuatan. Sementara dari sudut pandang ilmu politik, pemikiran (pemikiran politik) adalah merupakan hal yang amat penting dalam upaya melakukan eksplorasi terhadap permasalahan-permasalahan politik. Dr. Nazaruddin Syamsuddin¹³⁾ lebih jauh mengatakan:

“Pemikiran politik adalah suatu bidang menarik di dalam ilmu politik. Ia membawa kita tidak saja kepada pemahaman seorang pemikir terhadap sesuatu masalah politik yang menjadi pusat perhatiannya, tetapi juga sering menghadapkan kita pada suatu debat antara pemikiran dengan para pemikir lainnya”.

Dari dua pengertian yang telah disebut di atas yang satu melihat dari sisi pandang psikologi dan yang kedua dari sisi lihat sudut ilmu politik. Pada hakikatnya sudah dapat memberikan gambaran yang jelas bahwasannya pemikiran politik adalah suatu proses yang berangkat dari asumsi bahwa masing-masing orang, dengan memahami diri mereka bekerja dalam dunia praktis serta mampu beradaptasi, belajar dan menciptakan (hal-hal yang bernilai plitis).

Sampai disini kita akan segera tahu bukan hanya terhadap apa-apa yang difikirkan oleh para pemikir politik itu, melainkan juga mengapa masalah itu mereka fikirkan. Apa dan mengapa ini sebenarnya tidaklah hanya mencerminkan alam pemikiran masing-masing pemikir, malah lebih jauh daripada itu sering melambangkan perkembangan keadaan dan pemikiran yang ada dalam masyarakat luas. Mengapa sesuatu masalah

menjadi pusat perhatian seorang pemikir, tidak lain karena keadaan masyarakat yang memang sedang merisaukan atau mempersoalkan tentang dirinya. Masyarakat yang sedang menghadapi sesuatu masalah politik menghendaki agar para pemikir politik (apalagi yang juga sebagai penentu kebijaksanaan) memikirkannya secara mendalam, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang diperlukan masyarakat di dalam membuat pilihan-pilihan politik.

C. Manifestasi Kepribadian dalam Pemikiran Politik

Seorang ilmuwan politik Walter Lippmann pernah mengatakan demikian¹⁴⁾ *“to talk about politics with our political thinking”*. Apa yang dikemukakan oleh Lippmann ini seolah memperlihatkan dengan sungguh-sungguh sesuatu yang pernah terjadi berdasarkan pengalaman bahwasannya merupakan kekeliruan besar dalam pemikiran kita jikalau kita berbicara politik (dalam arti mengemukakan gagasan/ide politik) dengan mengabaikan begitu saja keberadaan kemanusiaannya itu (kepribadiannya). Jelas, dari tesis yang diperkenalkan Walter Lippmann ini seakan memberi legalisasi ilmiah betapa kepribadian individu memegang peran yang penting dalam melahirkan pemikiran-pemikiran politik seseorang.

Pemikiran politik yang ditampilkan seorang aktor politik memang tidak jauh terlepas dari manifestasi kepribadian politik apa yang tertanam dalam dirinya. Sebab itu setiap aktor/tokoh senantiasa menampilkan penampakan pemikiran politik yang saling berlainan antara yang satu dengan yang lainnya. Kenyataan ini sah saja, oleh karena latar belakang sosio budaya dan sosio ekonomis sangat dominan untuk dijadikan pertimbangan terhadap terbentuknya kepribadian politik seseorang.

Menurut Eduard Spranger¹⁵⁾ manusia itu bisa dicandra berdasarkan masing-masing tipe secara lebih luas guna mengenali hasil pemikiran bagaimana yang akan dihasilkan. Iktisar tipe-tipe tersebut dapat digambarkan demikian:

No.	Nilai (latar belakang yang dominan)	Tipe	Orientasi pemikiran
1.	Ilmu pengetahuan	Manusia teori	Berfikir
2.	Ekonomi	Manusia ekonomis	Bekerja
3.	Kesenian	Manusia estetis	Menikmati keindahan
4.	Keagamaan	Manusia agama	Memuja
5.	Kemasyarakatan	Manusia sosial	Berbakti/berkorban
6.	Politik/keanekaragaman	Manusia kuasa	(ingin) berkuasa/ memerintah

Penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Manusia teori adalah seorang intelektual sejati, manusia ilmu. Cita-cita utamanya ialah mencapai kebenaran dan hakekat dari benda-benda. Mengusahakan ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan tanpa mempersoalkan faedahnya (*La Science pour la science*).
2. Manusia ekonomi adalah manusia yang kaya akan gagasan-gagasan praktis, mengabaikan tindakan yang dilakukan sebab perhatiannya tertuju pada hasil dari pada tindakannya itu, hasilnya bagi diri sendiri. Sangat memerhitungkan nilai ekonomis dan bersifat egosentris.
3. Manusia estetis adalah menghayati kehidupan tidak hanya sebagai pemain tapi juga penonton. Selalu impresionis dan menghayati kehidupan secara pasif dan bersifat sangat subjektif serta kecenderungan individualistis.
4. Manusia agama berinti pada pencarian terhadap nilai tertinggi daripada keberadaan ini. Segala sesuatunya diukur berdasarkan artinya bagi kehidupan rohani, berkepribadian yang ingin mencapai keselerasan antara pengalaman batin dengan arti daripada hidup ini.
5. Manusia sosial adalah menekankan pada besarnya kebutuhan akan adanya resonansi dari sesama manusia, butuh hidup diantara manusia-manusia lain dan ingin mengabdikan untuk kepentingan umum.
6. Manusia kuasa adalah bertujuan untuk mengejar kesenangan dan kesadaran akan kekuasaannya sendiri, dorongan utamanya adalah ingin berkuasa mengejar penguasaan atas manusia.

Berpijak dari kerangka pemikiran Spranger ini, memang disadari dalam dunia praktik tidak akan secara secara murni (*pure*) ditemukan perincian yang sedemikian ekstrem seperti di atas. Mungkin nilai-nilai yang akan tercipta justru adalah kombinasi-kombinasi daripada keenam itu secara saling bergantian. Dari penghampiran seperti ini, segera kita tahu bagaimana hal ini teraplikasi pada kepribadian Soekarno dan Soeharto dalam mengimplementasikan pemikiran-pemikiran politik bahkan juga strategi-strategi komunikasi politiknya sebagai tema pokok yang dibahas dalam buku ini.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KONSEP-KONSEP PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO

3

A. Pemikiran Politik Soekarno

1. Soekarno dan Ideologi Pancasila

Apapun alasannya lahirnya konsep tentang pemikiran ideologi Pancasila, memang tak bisa sepenuhnya terlepas dari konsep-konsep ideologi lain yang pernah ia munculkan semasa tahun 1920-an. Penyusuran surut kebelakang agaknya merupakan metode yang paling representatif untuk bisa secara jernih memahami apa yang dimaksudkan dengan ideologi Pancasila. Sebab itu pola berpikir dialektis Hegel menjadi penuntun utama untuk mengenalinya. Gagasan agung yang dituliskan secara mendalam dan termuat dalam artikelnya pada harian “Suluh Indonesia Muda” tahun 1926 berjudul: Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, seakan menempatkan cetusan pemikiran awal itu sebagai sokoguru yang maha dahsyat bagi berkembangnya pemikiran ideologis dia selanjutnya. Kolonialisme dan imperialisme hanya bisa dienyahkan, jikalau ketiga bentuk aliran berpikir ini bisa dipahami secara terpadu dan menyeluruh oleh rakyat Indonesia. Lebih jauh dijelaskan Soekarno demikian:

“Mempelajari, mentjahari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan, bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri djadjahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha

besar dan maha kuat, satu ombak taufan yang tak dapat ditahan terjadinya, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya”.¹⁾

Dengan asumsi terjadinya persatuan penganut tiga faham ini secara simultan niscaya impian Indonesia merdeka akan terkabul. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah pula bagaimana persatuan itu, akan tetapi tetaplah bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka adalah kapal persatuan adanya. Yang terpenting di sini adalah terciptanya saling bahu membahu dan kerja sama. Bukannya mempertengkar dan memunculkan terjadinya salah faham sebagai mana ia katakan:

“Bukannya kita mengharap itu berubah paham menjadi atau marxis, bukannya maksud kita menjuru jang dan islamis itu berbalik menjadi nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara golongan itu”?

Lewat contoh yang kongkrit bahwasanya masing-masing paham dengan penganutnya itu harus bisa menunjukkan saling kerja sama. Dia tegaskan lagi:

“Partai Budi Oetomo, “Marhua” National Indiche Partij jang kini masih, Partai Sarekat Islam, Perserikatan Minahasa, Partai Komunis Indonesia dan masih banyak partai-partai lain... itu masing-masing yang mempunyai roh nasionalisme atau roh marxisme adanya. Dapatkan roh-roh ini dalam politik diadjudkan bekerja bersama-sama menjadi satu roh yang besar-roh persatuan, jang akan membawa kita kelapang, kebesaran’.³⁾

Sebab itu kemudian Soekarno tidak merasa pesimis mengenai tugas mempersatukan aliran-aliran itu. Tampak dari pernyataannya yang sambil lalu bahwa semua aliran itu tujuannya sama. Dengan demikian, maka pertama-tama mereka harus menjauhi percekocokan diantara sesama mereka. Setelah negara kolonial dibuka kedoknya, motif yang sebenarnya dari penjajahan dijelaskan dan setelah ada pengidentifikasian yang sadar diseluruh Asia, maka ditemukan lawan mereka bersama adalah bangsa-bangsa Eropa terutama sekali Eropa Barat. Mereka adalah lawan kaum nasionalis, karena mereka menguasai wilayah-wilayah Asia, mereka musuh golongan Islam karena kegiatan-kegiatan misi Kristen mereka. Dan akhirnya mereka lawan kaum marxis, karena mereka pendukung sistem kapitalis yang merintang meluasnya sosialisme.

Namun yang menjadi persoalan sekarang serta membingungkan para sarjana Barat adalah mungkinkah hasil sintesis tiga aliran ini bisa dipadukan? Kenyataan memang demikianlah adanya. Soekarno yang orang Jawa sangat antusias dalam melakukan ini. Patron pemikirannya adalah pola dasar tradisional Indonesia yang selalu melihat dan mencari persatuan dan kesatuan yang lebih dalam dan lebih tinggi antara unsur-unsur yang saling bertentangan. Pola dasar yang demikian ini, menempatkan harmonisasi, keselarasan dan keserasian dalam diri sendiri serta masyarakat sekitarnya sebagai pantulan keseimbangan dan keserasian kosmos. Prinsip orang Jawa adalah tidak senang mencari pertentangan melainkan, yang selalu dicarinya adalah kebersamaan, kerukunan, keselarasan dan keharmonisan dengan alam/lingkungan sekitar.

Oleh sebab itulah, Soekarno nampaknya begitu ambisius mengkompilasi ide-ide atau aliran-aliran yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang kemudian diolahnya sendiri menjadi ide tunggal yang baru, yang dianggap bisa diterima oleh semua pihak. Menurut Benard Dahm⁴⁾ proses berpikir demikian ini disebut Sinkritisme Jawa. Sebagai titik tolak lahirnya ide-ide politik yang tercermin di dalam konsepsinya mengenai tri ideologi yaitu Pancasila, Nasakom dan Marhaenisme. Yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya Pancasila dijadikan topik telaah utama terhadap pemikiran ideologi Soekarno. Sinkretisme itu merupakan obsesi pokok Soekarno untuk mengkompromikan semua gagasan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat menjadi suatu ide baru dan yang lebih tinggi tempatnya sebagai ide yang bisa diterima oleh semua unsur penting yang ada. Sebab itu Soekarno dengan terbuka serta bersedia mengambil yang dianggapnya baik atau positif dari masing-masing aliran. Ia bersedia memberi dan menerima dari masing-masing aliran atau ideologi yang ada. Sebagaimana ia tegaskan, bahwa kita harus menerima, tetapi kita harus juga memberi. Inilah rahasianya persatuan itu. Persatuan tak bisa terjadi kalau masing-masing pihak tak mau memberi sedikit-sedikit pula.

Penegasan di atas adalah komitmen Soekarno sendiri. Ia telah mengambil materialisme filosofis dari marxis dan memberinya Allah. Ia telah mengambil paham Islam beban masa lampau dan memberinya gagasan marxis tentang kemajuan. Dari kaum nasionalis ia mengambil

pandangan mereka yang sempit dan memberinya kepada mereka nasionalisme luasnya dan juga sekutu-sekutunya⁵). Dalam pemahaman yang demikian inilah upaya Soekarno itu bisa dimengerti dalam hubungannya untuk menyatukan tiga aliran besar menjadi satu kekuatan dasyat guna mengusir kolonialisme. Baginya dengan perasaan skeptis amat sulit melepaskan diri dari lilitan penjajahan dengan mengabaikan begitu saja manunggalnya tiga kekuatan itu secara padu.

Sebab itu, perkembangan ideologi dari Soekarno yakni Pancasila tidak lain merupakan rekayasa atas konsep-konsep pemikiran ideologis yang pernah dimunculkan sebelumnya. Kekonsistenan terhadap Nasakom misalnya, merupakan keyakinan berpegang teguh pada kekuatan tiga aliran besar tadi yang harus bisa manunggal dalam parade perjuangan kemerdekaan serta penyelesaian revolusi Indonesia. Kendati pada masa demokrasi terpimpin diperkenalkan konsep 'Naskom' tidak lain merupakan refleksi terhadap komitmennya kepada cita-cita dan renungan pemikiran yang telah digelutinya sejak tahun 1920-an. Metode Soekarno menangani masalah kemasyarakatan yang majemuk tetapi tidak berubah. Titipan santiajinya tetap sama: menentang imperialisme sampai titik terakhir disatu pihak, sedang dipihak lain membangun sebuah orde baru dengan jalan mengawinkan (*blending*) ideologi-ideologi yang berbeda ke dalam suatu keseluruhan yang harmonis⁶).

Beberapa minggu sebelum Soekarno dipecat (1966) Dahm⁷) bertanya tentang nasionalisme ini: apakah ia masih merasa yakin bahwa konsepnya mengenai Nasakom, konsep pemersatu golongan-golongan nasionalis, agama dan komunis pada dasarnya benar. Ia menjawab, 'ya'. Ia berbicara tentang keharusan historis, untuk menggabungkan semua kekuatan revolusioner (artinya kekuatan anti imperialis) seperti ditahun-tahun sebelum terjadinya kup. Kenyataan ini menunjukkan secara kongkrit, ia masih tetap berpegang teguh gagasan awalnya tahun 1926.

Oleh karena keyakinan pada cita-cita awal itulah yang telah menyebabkan Soekarno luput menyadari perkembangan di dalam diri bangsanya sendiri dan dalam fora internasional, akibatnya ia termakan oleh ambisi dan cita-citanya secara mencengangkan. Tak juga dapat disangkal bahwa telah terjadi kesenjangan yang jelas antara pemikiran politik Soekarno dengan kenyataan perkembangan politik di Indonesia.

Obsesi Soekarno untuk memadukan nasionalisme, Islamisme dan marxisme dalam realitas, terbentur oleh suatu fakta yang tidak bisa digantinya seperti pertentangan antara Islam dengan marxisme, demikian pula sulitnya mempertemukan persepsi yang seragam antara golongan santri dan abangan (dalam interen Islam sendiri).

Lewat hasil pemilu tahun 1955 serta terjadinya adu argumentasi yang sengit di Dewan Konstituante semakin menjadi petunjuk yang jelas bahwa di sana pertentangan ideologi yang ada kian mengeras, dan ini sangat kontras dengan ide politik dasar Soekarno yang justru malahan ingin mengawinkan ke dalam suatu ideologi baru yang harmonis⁸⁾. Hasil kelengahannya mengikuti perkembangan situasi di dalam negeri sendiri, Soekarno terjebak. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dimaksud partai progresif revolusioner⁹⁾, di mana ia selalu hadir, di dalam barisan perjuangan kemerdekaan, akhirnya menikam Soekarno dari belakang tanpa ia sendiri menyadarinya. Akibatnya Soekarno tumbang.

Jikalau, mengikuti kronologis perkembangan jiwa versi Soekarno¹⁰⁾, maka sebetulnya perkembangan pemikirannya tahun 1926-an itu ia telah memasuki putaran windu ketiga di mana sudah mencapai taraf pematangan diri. Itu berarti output pemikirannya sudah stabil. Fase kematangan inilah yang dijadikan landasan pijak dasar-dasar politiknya. Karena kekontroversialnya yang canggih dalam meletupkan gagasan itulah, sehingga banyak ahli yang belum bisa memahami secara cermat, buah sintesisnya antara tiga aliran tersebut. Soekarno sendiri maklum akan hal ini, sehingga ia kemudian menegaskan akan apa yang dicemaskan orang itu. Dikutipnya orang bilang tentang dirinya:

“Mau disebut dia nasionalis, dia tidak setuju dengan apa yang biasanya disebut dia Islam, dia mengeluarkan yang tidak sesuai dengan pemahannya banyak orang Islam. Mau disebut marxis dia ... sembahyang. Mau disebut dia bukan marxis dia gila terhadap marxisme itu”.¹¹⁾

Lantas apa jawab Soekarno terhadap pandangan-pandangan semacam itu. Dia utarakan begini:

“Saya tetap nasionalis, tetap Islam, tetap marxis. Sintesis dari tiga hal inilah yang memenuhi saya punya dada, satu sintesa yang menurut anggapan saya sendiri adalah satu sintesa yang geweldig”.¹²⁾

Doktrin, teori dan ajaran marxisme begitu memikatnya adalah sebuah fakta. Lewat renungan-renungan Engels, Karl Marx, Lenin, Soekarno berkenalan dengan ajaran-ajaran asing itu, sewaktu masih sekolah di Surabaya. Belum lagi di persahabatannya dengan tokoh-tokoh ISDV, semakin jelas memperkuat pemahamannya tentang-tentang dogma-dogma marxis¹³⁾. Nasionalisme ia petik dari ajaran-ajaran HOS Cokroaminoto. Selain itu periode ini juga merupakan situasi yang tepat untuk mendalami tauhid Islam. Sementara tingkah lakunya dalam praktik politik sangat ditunjang oleh kehadiran organisasi-organisasi menyusul lagi adanya pertingkaian politik (pertentangan-pertentangan intern Serikat Islam) yang kemudian terbagi menjadi SI beraliran nasionalisme, Marxis Sosialisme dan Islamisme. Selain itu petualangannya lewat bacaan-bacaan hasil pikir orang-orang besar juga turut memberi sumbangsih cakrawala berpikirkannya. Sebagaimana ia akui:

“Didalam dunia pemikiranku akupun berbicara dengan Gladstone di Britania, ditambah dengan Sidney dan Beatrice Webb yang mendirikan gerakan buruh Inggris akupun berhadapan Mazzini, Clavour dan Garibaldi dari Italia. Aku berhadapan dengan Karl Marx, Frederic Engels dan Lenin dari Rusia. Dan aku ngobrol dengan Jean Jaques Rosseou, Aristide Brian dan Jean Jaures ahli pidato terbesar dalam sejarah Perancis. Aku sebenarnya adalah Voltaire. Aku menjadi tersangkut secara emosional dengan negarawan-negarawan besar itu”¹⁴⁾

Prinsip keempat yang dikemukakan Soekarno tentang kesejahteraan sosial beresensi sama dengan inti ide politik marhaenisme Soekarno dalam mana merupakan pilihan lain terhadap konsep proletarnya analisis marxis. Marhaenisme menurut pemahaman Soekarno adalah:

“Marhaenisme adalah asa yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang didalam segala halnya menyelamatkan marhaein. Marhaenisme adalah cara perjuangan mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu cara perjuangan yang revolusioner. Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme”.¹⁵⁾

Istilah di atas, cukup kuat mendominasi perdebatan politik di Indonesia sejak sekitar tahun 1932. Sebelumnya istilah itu boleh dikatakan tak dikenal sama sekali. Kalangan elite politik, untuk pertama

kalinya mendengar istilah itu dalam pidato pembelaan Soekarno, di mana ia menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sebagai akibat dominasi imperialisme selama berabad-abad adalah khas masyarakat orang kecil. Sebagaimana ia jelaskan demikian:

“Susunan pergaulan hidup Indonesia sekarang adalah pergaulan merk kromo, pergaulan hidup merk marhaen pergaulan hidup yang sebagian besar sekali adalah terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pelajar kecil, pendek kata... kaum kromo dan kaum marhein yang apa-apanya semua kecil.”¹⁶⁾

Hingga akhir tahun 1930-an sebutan orang kecil yang biasa terdengar adalah kromo. Namun lantaran, dari awal istilah tersebut sering kali dipakai PKI dalam propagandanya yang baru untuk menunjuk kepada kaum proletar, ini memaksa Soekarno untuk mengotak atik pikiran guna menemukan istilah yang baru. Ditemukanlah istilah tersebut dengan kata khas Indonesia yaitu marhaein (sebuah nama yang ia peroleh dari nama seorang petani di Bandung Selatan¹⁷⁾). Akar bahasa ini barang kali saja tidak benar, tetapi sekedar merupakan rekayasa pemikirannya yang penuh daya imajinasi. Namun apapun istilahnya, yang jelas ini telah memberikan petunjuk bagaimana kecermatan Soekarno dalam mengamati kehidupan nyata bangsanya sehingga akhirnya menghasilkan suatu formulasi marhaenisme khas pribumi. Meski kenyataannya kaum Proletar sebagai bagian dari kaum marhaein kurang jumlahnya namun ia secara aktif ambil bagian dalam setiap kegiatan aksi revolusi. Dia tegaskan menyangkut dua pemikiran ini demikian:

“Bahwa marhein kaum proleter (kaum buruh) sahadj, tetapi ialah kaum proleter dan kaum petani melarat dan kaum melarat Indonesia Jang lain-lain, misalnya kaum dagang kecil, kaum tukang kaleng, kaum gerobag, kaum nelayan dan kaum lain-lain”.¹⁸⁾

Dalam hal ikut berpartisipasi di medan perjuangan kemerdekaan bangsa, sungguh proletarlah yang sangat aktif terlibat langsung dengan jumlah yang cukup besar. Lebih jauh Soekarno berkata:

“Bahwa didalam bersama daripada kaum proleter dan kaum tani dan kaum melarat lain-lain itu, kaum proletarlah mengambil bagian yang besar sekali, marhein seumumnja sama berdjung, marhein seumumnja beriktir mendatangkan masyarakat jang

menjelamatkan marhejn seumumnja pula, namun kaum proletarlah jang mengambil bagian jang besar sekali".¹⁹⁾

Pemikiran bahwa kaum buruh tidak boleh diabaikan adalah inspirasi dari Das Kapital yang memberi uraian bahwa buruh akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan meletupkan revolusi tatkala tindasan industrialisasi akibat kapitalisme semakin terasa meletihkan, sebagaimana kenyataan di Rusia. Imperium Tsar Nicholas pada awal abad ini (1917) tumbang oleh karena gerakan sporadis massa buruh tani, akibat tajamnya doktrinasi marxisme oleh Lenin. Ilham kesuksesan inilah yang ingin ditiru oleh Soekarno dalam membangun basis kekuatan massa agar dapat digerakkan menjadi instrumen revolusi yang radikal. Namun demikian disadari pula bahwa pergerakan kaum buruh marhaein tidak akan menang jikalau kekuatan tersebut masih tetap dalam kepingan-kepingan. Perlu didirikan Serikat Buruh. Dari sinilah kemudian timbul kesadaran mengenai pentingnya peran partai pelopor, di mana sebagai wadah massa aksi atau *machtsvorming*. Menurut Soekarno, masa aksi bukanlah perkara yang terjadi kemudian.²⁰⁾ Massa aksi adalah aksinya massa. Massa artinya rakyat marhaein yang bermilyar-milyar itu.²¹⁾ Jadi ia bukan suatu yang belum terjadi melainkan kini telah terjadi dengan segala percikan-percikannya. Sebab itu massa yang demikian banyaknya perlu dipayungi dengan suatu asas perjuangan. Bagaimana asas perjuangan itu yaitu asasnya adalah sosionasionalisme dan sosio demokrasi. Sementara alat perjuangannya adalah non koperasi, aksi massa atau *machtvorming*, *maacrrsannwending* dan tak tik.

Berhubungan dengan asas nasionalisme ini, Soekarno dengan tegas berkata bahwa sosialisme adalah nasionalisme masyarakat, nasionalisme yang mencari selamatnya seluruh masyarakat dan bertindak menurut wet-wetnya masyarakat dan tidak bertindak melanggar wet-wetnya masyarakat itu²²⁾.

Dua prinsip dasar tersebut adalah merupakan konsep teori dan tindakan implementatifnya sosionasionalisme bertindak untuk mengorbankan semangat kaum buruh, sementara sosio demokrasi berfungsi melandasi cita-cita yang hendak dicapai yaitu bebas dari kemeklut/konflik politik semata tetapi juga harus bisa mengatasi problem-problem ekonomi. Dengan cara demikianlah pintu gerbang mas kemerdekaan bukan sekedar halusinasi belaka tetapi realita yang harus diterima.

Karena itu perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya dilihat dalam kerangka mikro demi mengusir penjajahan dari Indonesia saja tetapi adalah dalam konteks makro, mengenyahkan kolonialisme dari negeri-negeri jajahan di kawasan dunia ini. Lewat lensa pandang yang demikian ini, barangkali bisa dipahami kenapa komunisme diintegrasikan kepatron perjuangan nasionalisme.

Sila keempat Pancasila tempo dulunya Soekarno marhaenisme sebetulnya mempunyai posisi yang jelas terhadap perjalanan sosialisme Indonesia yang dimimpikan Soekarno dalam pergulatan perjuangannya. Sebagaimana ia uraikan kepada penulis biografinya Cindy Adam demikian:

“Sosialisme kami adalah sosialisme yang dikurangi dengan pengertian materialistisnya yang ekstrim. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terutama takut dan cinta Tuhan. Sosialisme kami adalah campuran. Kami menarik perasaan politik dari Declaration of Independence, menarik perasaan spiritual dari Islam dan Kristen. Kami menarik persamaan ilmiah dari Marx. Kedalam campuran yang ketiga ini kami tambahkan kepribadian nasional marhaenisme. Kemudian kami memercikkan kedalamnya gotong royong yang menjadi jiwa, inti dari pada bekerja sama, hidup bersama dan saling bantu membantu. Kalau ini dicampurkan semua, maka hasilnya adalah sosialisme Indonesia”.²³⁾

Sekarang kita sampai pada formulasi Pancasila hasil sistematisasi Soekarno sendiri. Dengan demikian asumsi persoalan Pancasila adalah sesuatu yang rumit karena belum jelasnya apa yang dimaksud sebagai dasar negarakah atau sekedar lantaran sebuah ide perlu diabaikan dulu.²⁴⁾ Sehingga ada ruang yang agak longgar terhadap relevansi even, kenapa Soekarno melontarkan gagasan demikian dengan kejadian politik pada masa itu. Hal ini perlu dikemukakan lebih dulu agar ada ukuran yang sama terhadap ada pula yang dipikirkan oleh Soeharto sebagai subyek pembandingan yang lain.

Dalam sidang pertama (tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945) Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (atau dalam bahasa Jepang: *Dokuritsu Junbi Cosakai* dilafalkan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau *Dokuritsu Junbi Chōsakai*) ini muncul aneka ragam gayanya mengesampingkan usulan-usulan yang telah diberikan sebelumnya, memulai pidatonya dengan menawarkan akan kebersamaan yang diutamakan. Sebagaimana yang ditegaskan:

“Kita hendak mendirikan suatu negara semua untuk semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya. Tetapi semua buat “.25)

Oleh karena negara itu untuk semua orang perlu ada ikatan paham yang sama. Sebagai “*Philosophische grondslag*” suatu fondamen filsafat pikiran yang di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi²⁶⁾ Sebab itu kita harus mencari persetujuan *philosophische grondslag*, mencari *weltanschauung* yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju.²⁷⁾

Dengan pendahuluan yang demikian tadi, dia mengusulkan dasar yang nomor satu yaitu dasar kebangsaan. Kita mendirikan suatu Negara kebangsaan Indonesia.²⁸⁾ Dalam pengertian bukan “kebangsaan dalam arti sempit”. Melainkan bukanlah sekedar satu golongan yang hidup dengan “*Le desir d’entre ensemble*” di atas daerah kecil seperti Minangkabau, atau Madura atau Yogya atau Sunda atau Bugis tetapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik telah ditentukan oleh Allah Swt., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian seluruhnya.²⁹⁾

Dan sebetulnya bertolak dari lantaran ide untuk semua itulah lahir pergerakan Indonesia yang berlandaskan mufakat sehingga golongan-golongan minoritas pun memiliki hak suara. Hal mana pertama kali dimunculkan 1927 dengan nama Permusyawaratan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Pijakan berpikir ini pula yang memberi ilham bagi Soekarno untuk tidak mengabdikan pada tahun 1940-an ini usul Ki Bagoes Hadikoesoemo cs dari golongan Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Guna menjustifikasi apa sebenarnya pengertian kebangsaan tersebut ia lagi-lagi pertaruhkan orang/sarjana Barat sebagai referensinya. Berkatalah Ernest Renan, bangsa yaitu suatu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya, bangsa yaitu suatu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu atau Otto Beur menjawab pertanyaan, *was ist eine nation?* Yaitu *eine nation ist au schikasalsgemeinschaft erwachsene charaetergemeins* atau bangsa adalah satu perangai yang timbul karena persatuan nasib.³⁰⁾ Karena pengertian yang tidak tegas tersebut sebab tak sekalipun disinggung tempat (*location*) sebagai orang dan tempat

tak dapat dipisahkan. Dengan mengambil contoh seorang anak kecil sekalipun akan menunjuk bangsa Indonesia sekalian dengan tempatnya. Jikalau ia melihat peta dunia, yang pasti ia tunjuk adalah kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara dua lautan besar dan dua benua. Oleh karena itu, pemahaman persatuan wilayah harus pula diselaraskan dengan adanya pemahaman karakter. Dan ini bisa menjadi realita bila terdiri atas pijakan yang sama yaitu asas kebangsaan.

Selanjutnya dasar yang kedua adalah Prikemanusiaan atau Internasionalisme. Secara tak langsung disini ia menginginkan kerja sama antar bangsa dengan modal dan saling menghargai satu sama lain. Bukannya saling meremehkan dan merasa di atas dari semuanya. Tidak boleh ada chauvinisme atau Indonesia Uber Alles. Seperti dia kutip pendapat Ghandi: *My nationalism is humanity*. Asas kedua ini seakan mengisyaratkan sebuah pesan untuk membentuk suatu dunia baru yang juga merupakan suatu unsur yang kuat dalam nasionalisme Indonesia dan sebagai mana harapan keselamatan India melalui humanitarianisme, suatu asas yang mengklaim Barat terkungkung dalam kemelut materialisme.

Kemudian dasar yang ketiga adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Atas asumsi bahwa negara Indonesia bukan suatu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan/perwakilan.³¹⁾ Pemikiran semacam ini muncul atas antisipasinya terhadap golongan Islam agar tak bersikeras menuntut pembentukan sebuah negara Islam, yang tidak akan memungkinkan adanya kerja sama yang efektif dari golongan-golongan agama lain. Dikawasan dunia ini, banyak sudah contoh-contoh konkrit akan adanya pertikaian-pertikaian intern, seperti dikatakannya pada tahun 1932, tatkala ia berusaha keras mempersatukan kaum nasionalis. Namun karena kebijaksanaan dan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia, maka Soekarno mengusulkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya tersebut dalam forum perwakilan. Lebih jauh dia berkata:

“Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah candrawimuka. Baik dalam staat Islam, maupun di dalam Kristen perjuangan selamanya ada.”³²⁾

Hal yang keempat yang diusulkan adalah kesejahteraan sosial. Dengan mengutip lagi pendapat-pendapat negarawan barat seperti Jean Jaures tahun 1893, ia kembali mengutuk kesia-siaannya diberlakukannya sistem demokrasi parlementer yakni purbasangka-purbasangka anti Barat terhadap Liberalime, yang memberikan jaminan terhadap hak-hak politik tetapi merintangangi keadilan sosial. Demokrasi penting, tetapi kalau tidak mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat. Tetapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.³³⁾ Sampai disini semakin menjadi terang betapa dunia barat diasingkan Soekarno dalam mengolah sintesa pemikirannya. Titik tekannya tetap pada penggalian nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Sehingga dengan demikian sikap yang konfrontatif dengan dunia barat yang identik dengan imprealisme kolonialisme tidak melulu bersifat negatif belaka. Kalau sistem barat dipakai, sudah barang tentu cita-cita keadilan sosial menjadi hal yang otupia, karena sistim ekonomi yang dikembangkan disana kapitalistik yang mempunyai asumsi dasar menindis yang lemah dan mengokohkan yang kuat. Dan kondisi di atas mengukir kembali bayangan kejayaan masa lalu akan datangnya sang Mesias-ratu adil. Pada waktu mana akan tiba suatu kurun masa, di mana di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan sang Ratu Adil. Sebab itu katanya, jikalau memang kita betul-betul mengerti, mengingat dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima *sosiale rechvaadingheid* ini.³⁴⁾

Dasar kelima yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu hal yang logis oleh karena landasan spiritual bangsa Indonesia yang memang religius. Ini bukan berarti negara agama tapi hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tanpa egoism agama. Jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara berkeadaan. Apakah cara berkeadaan itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.

Demikianlah secara rentet, asas demi asas ia sistematisir sedemikian rupa, hingga menjadi bingensel negara kita. Selanjutnya apa istilah yang tepat untuk lima asas ini? Tanya Soekarno. Panca Darma, bukan. Sedang yang kita bicarakan adalah asas. Tapi menurut petunjuk ahli bahasa teman kita, ia bernama Pancasila. Panca-lima sila-dasar. Tapi Soekarno tetap memberi peluang perdebatan, jikalau masih diragukan/

tidak disukai. Bila point itu kurang tepat, mungkin biasa diganti dengan Trisila yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan ketuhanan. Tapi kalau dengan tiga sila ini masih ada yang keberatan iapun masih menawarkan alternatif kompromistis. Sebagaimana sedari awal semua untuk semua. Maka usul yang terakhir adalah gotong royong. Indonesia mempunyai weltanchaung gotong royong.

B. Soekarno dan Demokrasi

Suasana umum periode kabinet Juanda (9 April 1957-5 Juli 1959) adalah batu ujian yang cukup berat, sebab pada periode inilah gaung konsepsi demokrasi ala Soekarno muncul. Instabilitas pemerintah terjadi di mana-mana. Friksi-friksi dan konflik terjadi tidak hanya dalam tubuh partai-partai politik semata tapi juga pada organisasi Angkatan Bersenjata. Dan tidak jarang pula pertentangan itu timbul karena, antara pemerintah dan satuan-satuan Angkatan perang. Hal-hal mana terungkap dalam peristiwa 17 Oktober 1952, peristiwa 14 Desember 1955. Perbedaan sikap dan pendapat, baik karena pertimbangan ideologis maupun alasan praktis yang menjadi sumber pemecahan itu, menggejala pula didalam gerakan-gerakan kekerasan dan bersenjata. Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan tahun 1950, tentang DI/TII³⁵). Gerakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan tahun 1951, Amir Fatah di Jawa Tengah dan lain-lain pemberontakan aksi makar Angkatan Perang di daerah dengan membentuk Dewan Gajah, Dewan Garuda dan Dewan Manguni, agaknya merupakan variabel nyata ketak puasan daerah atas pusat.³⁶

Mengamati peta politik yang demikian ini, secara agresif kekuatan-kekuatan politik yang ada cepat mengambil sikap. Dengan dukungan mayoritas dari rakyat luar pulau Jawa Masyumi yang memang oposan dengan Soekarno memberikan simpatinya terhadap gerakan-gerakan kedaerahan ini. Begitu pula dengan partai-partai politik yang lain seperti Parkindo, PSI dan partai Katolik. Fokus *issue* kemudian menggelembung cepat dengan upaya dikembalikannya 'Hatta' sebagai wakil presiden yang telah mengundurkan diri sejak tanggal 1 Desember 1956. Fenomena-fenomena tersebut di atas adalah merupakan start awal pemulihan kabinet kesistem presidential. Kesulitan politik sebetulnya bukanlah akibat persoalan daerah semata, melainkan lebih merupakan

operasionalisasi sistem multi partai serta pihak-pihak yang berkuasa di pusat. Sebagaimana penilaian Herbert Feith bahwa sistem multi partai hanya melahirkan pemerintahan koalisi yang amat lemah hanya mampu *survive* dalam waktu singkat. Lagi pula sistem ini memburuk segala bentuk konflik didalam masyarakat dan cenderung mempolitisir seluruh kehidupan masyarakat.³⁷⁾

Dalam situasi yang demikian, Soekarno mengambil sikap super hati-hati oleh karena kekuatan oposisi demikian kuatnya, sehingga kemudian dimunculkannya adalah usulan kongkritnya. Suatu konsepsi alternatif yang diharapkan dapat dijadikan jalan keluar dari kemelut politik ini. Dihadapan pemimpin-pemimpin politik dalam musyawarah nasional mereka tanggal 21 Februari 1957, diuraikannya konsepsinya tersebut³⁸⁾. Lebih dahulu dalam pengaitan pidatonya tersebut, Soekarno menggambarkan peranan yang dititahkan Tuhan padanya. Selain ia merupakan sosok seorang hamba, tapi juga mengklaim dirinya sebagai salah seorang yang harus mempersembahkan buah-buah pikirannya dengan segala kesehajaan. Karena itu lebih jauh ia menegaskan posisinya sebagai pemimpin, maka konsekuensi logisnya adalah harus mampu dengan wewenang yang istimewa menyuarakan suara hati nuraninya serta menjadi pelita bangsanya keluar dari kemelut yang multidimensi.

Sebagaimana yang sudah-sudah, Soekarno tak habis-habisnya menuding bahwa demokrasi barat bukanlah model demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsanya. Tirani mayoritas terhadap minoritas tidak dikenal di sini. Bahwa dalam masyarakat kita mufakat dalam musyawarah adalah perlu. Suatu ulangan prinsip 'semua untuk semua' menegaskan bahwa golongan minoritas pun harus diberi tempat untuk hidup. Sepanjang kelompok kecil ini belum sepakat, maka musyawarah harus tetap dijalankan lewat tuntunan pemimpinnya. Mekanisme sistem yang demikian inilah satu-satunya cara yang bisa mentolerir hak minoritas itu ada. Dan sebetulnya demokrasi model demikian inilah yang khas Indonesia. Penekanan kebersaan atas kepelbagian itulah yang harus hidup dalam atmosfer Indonesia. Oleh sebab itu hendaknya/demokrasi bentuk demikian ini tidak cuma demokrasi politik tapi demokrasi sosial juga.³⁹⁾

Terhadap asal mulanya konsepsi Soekarno tersebut, sebetulnya merupakan rakitan pengembangan berpikir atas berpikirnya pemikiran-

pemikiran awalnya. Terekspresi di sana bahwa ada tiga pengesahan penting yaitu kesatu, adanya sistem pemerintah dan gaya kepemimpinan model demokrasi terpimpin. Kedua, kabinet gotong royong. Dan yang ketiga adalah Golongan-golongan fungsional pun harus terwakili dalam Dewan Nasional. Gagasan yang demikian ini bukanlah suatu hal yang baru oleh karena pada tahun 1932 lewat artikelnya dalam koran Fikiran Rakyat telah dikemukakan renungan-renungan awalnya atas demokrasi politik tersebut. Sehingga dengan demikian menjadi jelas sudah, bahwa demokrasi yang ia artikan sebagai pemerintah rakyat adalah cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. Tapi model demokrasinya jangan meniru saja demokrasi-demokrasi yang kini dipraktikkan didunia luaran.⁴⁰⁾

Menerjemahkan tesis-tesisnya tersebut, tentu dasar tolaknya adalah risalah pertamanya dulu yakni berjudul: Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Dalam kabinet gotong royong Komunis, Partai Burung harus mendapat tempat yang sama sebagai duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dan menurut Soekarno, PKI adalah partai yang sah dalam revolusi Indonesia sebab itu hidup mutlak harus diberikan kepadanya Sehingga nantinya, pemerintahan yang ada harus dijalankan lewat partai kaki empat secara simultan (PNI, MASYUMI NU dan PKI). Soekarno yakin dengan cara demikian gangguan oposisi dapat di tawarkan/redam. Menyangkut gotong royong memang ada kata khas Indonesia tulen, yang sangat akrab pada telinga masyarakat kita. Holopis kontul nbaris buat kepentingan bersama.⁴¹⁾ Kabinet gotong royong ini dimaksud bisa Dewan National yang ia maksud adalah suatu model komite Nasional Indonesia Pusat yang sudah ada sejak tahun 1946, tetapi lebih diperluas jangkauannya. Sebagaimana ditegaskan Soekarno memang sangat anti demokrasi karena di sana yang ada cuma demokrasi politik semata, sementara demokrasi ekonomi diabaikan. Kenyataan ini semakin terlihat jelas ketika tanggal 3 Nopember 1945 wakil presiden Muhammad Hatta menanda tangani maklumatnya. Munculnya kemudian partai-partai politik antara lain: Masyumi, PKI, PBI, Partai-partai Rakyat Jelata, PSI, PRS PKRI, Permai dan PNI dalam perjalanan sejarahnya tidak mengukir benih-benih persatuan justru mengiring bangsa ke arah keretakan persatuan. Jatuh bangun kabinet demikian menjadi kultur politik yang tak sehat.

Sebagai tanggung jawab moral dan etisnya, pemerintah Soekarno turut bertanggung jawab atas kegagalan kehidupan kepartaian ini. Dwi tunggal Hatta, memang yang menandatangani berdirinya partai tapi tanggung jawabnya adalah ditangan Soekarno-Hatta berdua. Akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1956. Ada isyarat bahwa Soekarno ingin mengubur partai-partai ini sedalam-dalamnya. Menurutny, sistem kepartaian telah menggagalkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu perlu adanya perombakan. Soekarno meski dalam pidatonya tersebut kurang eksplisit menjelaskan, tapi secara terus menerus mencoba memperjuangkan siasat politik barunya tersebut. Bermucullah kemudian reaksi-reaksi dari beberapa pemimpin partai. M. Natsir memberikan pendapatnya terhadap penguburan partai sebagai tindak ketidaktatoran. Selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai harus ada, dengan keputusan pemerintah atau tidak. Sementara PNI, memulai ketua partainya menekan pada kewajiban untuk mengoreksi diri bagi partai-partai. Sedang PKI bisa menerima tetapi tidak perlu menghapuskan sama sekali keberadaan partai.

Menanggapi reaksi yang cepat menyebar tersebut, 30 Oktober 1956 Soekarno menegaskan:

“saya bukan presiden direktur dari Republik Indonesia dan saya tidak ingin jadi diktator, karena ini berlawanan dengan kesadaranku. Saya adalah seorang demokrat, tapi tidak ingin demokrat liberal. Sebaliknya, yang saya inginkan ialah demokrasi terpimpin⁴²⁾

Penegasan inilah yang kemudian menjadi semacam peruncing niatnya untuk mempraktikkan jalan demokrasiya. Belum lagi fakta, dalam Dewan Konstituante tak pernah habis dari kemelut. Oleh karena hingga pertengahan tahun 1959 Dewan Konstituante tersebut tak mampu menyelesaikan tugasnya, menyusun Undang-undang Dasar menggantikan UUDS 1950, yang pada gilirannya mendorong Soekarno untuk mengambil tindakan, dengan mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959. Dan peranan parlemen sekarang bergeser sepenuhnya ketangan Soekarno. Partai politik dimata Soekarno, sama jeleknya dengan penyakit seperti diucapkannya dalam pidatonya tahun 1956, penyakit kepartaian lebih parah dari pada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan kita selalu cacar-cakaran satu sama lain. Karena itu ia mengajak sekarang marilah

kita bersama-sama mengubur semua partai. Namun begitu, gagasan menengahkan empat puluh partai yang ada itu mendapat tentangan keras, karena mereka tak mau dienyahkan sebagian, maka seluruhnya harus dienyahkan. Namun begitu, peluang bagi partai yang besar masih ada, sehingga pada tahun 1960 hanya ada beberapa partai yang masih diijinkan hidup yaitu NU, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, PERTI, PKI, MURBA sedang PSI dan Masyumi terpaksa dilenyapkan karena mereka disinyalimen mendukung pemberontakan.

Dengan begitu Demokrasi Terpimpin era Soekarno, tetap memberikan sejumlah partai hidup, dan yang ada tidak merupakan partai tunggal. Hal ini mungkin didasarkan atas pertimbangan untuk keseimbangan kekuatan yang masih lebih antara presiden Soekarno dan militer. Beberapa partai mampu ia peralat sebagai kekuatan pengimbang. Sementara dengan modal ikatan ideologis, dihimpunlah partai-partai yang lainnya dalam satu kekuatan tambahan yangbekerja mendukung dirinya. Dengan begitu suara partai tidak mencerminkan kepentingan kelompok atau golongan lagi. Pada zaman ini pula Soekarno seakan sebagai kekuatan-kekuatan sentral yang mampu merebut dari semua unsur kekuatan politik. Tapi kondisi ini belum juga menciptakan suatu posisi lembaga politik yang stabil serta mekanisme dan tatanan politik yang dicita-citakan.⁴³⁾

Selain itu pula demokrasi terpimpin hasil konsepsi Soekarno ternyata tidak mampu meniadakan pengkotakan dibidang politik dan ideologi, yang memang melekat dalam negara ini. Upaya yang bisa ditempuh hanyalah sekedar memperjelas masalah dengan menyederhanakan menjadi sebuah pertarungan antara dirinya yang dicap sebagai diktator dengan kekuatan lain yang berhasil dimanipulasi seolah-olah melawan kebijakan yang dibuatnya.

C. Soekarno dan Ekonomi

Keberhasilan Tjokroaminoto membawa rujuk serta memberikan penyelesaian terhadap aliran-aliran yang saling bersaing dalam Syarikat Islam tahun 1920 yakni SI Merah dan SI Putih rupanya membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan pemikiran politik Soekarno. Selain itu pengamatannya terhadap situasi sosial politik

menambah semarak nuansa kecerdikannya dalam melibatkan dirinya dalam aktifitas-aktifitas politik praktis. Belum lagi ditambahkan petualangan keilmuan berkenalan dengan pemikir-pemikir besar sosialis Eropa seperti: Kautzky, Bauer, Karl Marx, Pieter Jelles Iroelstra, Jean Jaeres, HN Brailsford, Fredrik Engels,⁴⁴⁾ jelas merupakan sumber inspirasi utamanya terhadap konsepsi sintesanya terkait Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme dalam Suluh Indonesia tahun 1926. Selain itu tentu filosofis Jawa tentang Ratu Adil dan Eru Cakra.

Dari penggambaran yang demikian luasnya tersebut rupanya berhasil memberikan tema dasar pemikiran untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya melalui issue sentralnya yakni anti kolonialisme, elitism dan imperialism. Menurutnyanya hanya melalui tiga landasan juang inilah rakyat Hindia Belanda bisa keluar dalam kungkungan penjajahan. Apa yang tersirat dalam tulisan tersebut adalah keinginan Soekarno untuk menggerakkan massa guna bangkit merebut kemerdekaan. Sebab itu sebelum langkah tersebut ditempuh perlu kiranya ada landasannya yakni sosialisme dengan semangat nasionalisme yang mencari selamatnya seluruh masyarakat dan bukannya nasionalisme *ngalamun*, tapi harus nasionalisme yang anti feodalisme.⁴⁵⁾

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Alfian dalam memberikan ulasannya atas buku Paget:

“Semenjak tahun 1926, ia telah mengemukakan dalam tulisannya tentang keperluan untuk mengikis mentalitas *nrimo* ini. Karena hanya dengan begitu, masyarakat Indonesia bisa memerdekakan diri dari kolonialisme, imperialism dan kemelaratan.⁴⁶⁾

Oleh sebab itu bagi Soekarno, *mental nrimo* dilihat sebagai kelemahan mendesak masyarakat Indonesia. Ia sebagai sisa-sisa masa lampau. Untuk itu kalau memang kita bertekad merdeka kita perlu memodernisir atau merombak masyarakat. Cara yang ditempuh, menurut Soekarno adalah dengan membangkitkan nasionalisme. Nasionalisme (rasa kebangsaan) sebagaimana diikuti Soekarno dari Mustafa Kamil adalah:

“Oleh karena, rasa kebangsaanlah maka bangsa-bangsa yang terbelakang lekas mencapai peradapan, kebesaran dan kekuasaan.

Rasa kebangsaanlah yang menjadi darah yang mengalir dalam urat-urat bangsa yang kuat dan rasa kebangsaanlah yang memberi hidup kepada tiap-tiap manusia yang hidup”.⁴⁷⁾

Sondar nasionalisme tiada kemajuan, sondar nasionalisme tidak ada bangsa. Kata Sun Yat dalam San Min Chu I-nya dibilang:

“Nasionalisme adalah milik yang berharga yang berharga memberikan suatu negara tenaga untuk mengejar kemajuan dan memberi kepada suatu bangsa untuk mempertahankan hidup”.⁴⁸⁾

Dan bagi Indonesia, bagaimana membangkitakan nasionalisme menurut dia ada tiga jalan yang harus ditempuh:

- Pertama : kami menunjukkan kepada rakyat, bahwa ia mempunyai hari adalah hari yang indah.
- Kedua : kami menambah keinsyafan rakyat bahwa ia punya hari sekarang adalah hari sekarang yang gelap.
- Ketiga : kami memperlihatkan kepada rakyat sinarnya hari kemudian yang berseri-seri dari terang cuaca beserta cara-caranya mendatangkan hari kemudian yang penuh janji-janji itu.⁴⁹⁾

Selama kita masih dijerat penjajahan, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri. Kolonialisme bukanlah persoalan politik semata. Tapi juga merupakan problema ekonomi, karena disitulah terjadi penghisapan yang besar-besaran atas tanah lama-lama makin layu tapi imperialism tua atau klasik makin lama makin layu tapi imperialism moderen telah menggantikannya. Perubahan yang terjadi adalah semakin menyengsarakannya. Perubahan yang terjadi adalah semakin menyengsarakan dan malah terjadi pengeringan. Kesadaran akan hal inilah yang perlu diinsafkan menurut pendapat Soekarno. Selanjutnya dapat di simak, betapa persoalan ekonomi juga menjadi beban mental pemikirannya. Dalam harian ‘Fikiran Rakyat’ dapat ditemui risalahnya tentang Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Kapitalisme Bangsa Sendiri? orang Indonesia Tjukup nafkahnya Sebenggol Sehari? Sekali lagi Tentang Sosionalisme dan Sosio demorasi dan Mentjapai Indonesia Merdeka. Hampir secara keseluruhan Soekarno memberikan penilaian negatifnya terhadap praktik-praktik kolonialisme serta demokrasi yang berlaku meremehkan aspek-aspek

humanisme–ekonomisnya. Sebab demokrasi di sana adalah demokrasi politik semata dan hak individu belaka.

Dengan menjelaskan latar belakang revolusi Penjara Bastille tahun 1789, sungguh merupakan suatu ketakadilan jikalau dengan semboyan *liberté, égalité, fraternité* menyamaratakan hak dan kewajiban kaum rakyat jelata dengan kaum borjuis dalam seluruh aspek kehidupan.⁵⁰⁾ Dari sini kemudian mencuat semangat individualisme yang pada gilirannya bermuara terhadap tumbangannya feodalisme serta memberi peluang yang lebar atas konsesei *self determination* bagi setiap orang. Atas dasar pemahaman yang demikian inilah demokrasi barat memperoleh penilaian yang negatif dimata Soekarno. Dengan asumsi yang seperti tadi itu secara otomatis bidang ekonomi tetap tak akan tersentuh akan suatu perubahan. Semangat individualisme yang tumbuh dari atmosfer bebas demokrasi politik tentu tak mengherankan jikalau konsep, siapa kamu siapa saya demikian besarnya tumbuh. Alhasil kesejajangan perekonomian (pemilikan) terjadi antara klas berkuasa dan klas proletar. Rakyat banyak yang sengsara, sebagaimana Soekarno tegaskan:

“Tetapi disemua negeri modern itu kapitalisme subur dan merajalela! disemua negeri modern itu, kaum proletar ditindas hidupnya. Disemua negeri modern itu kini hidup milyunan kaum penganggur, upah dan nasib kaum buruh adalah upah dari nasib kokoro, disemua negeri modern itu rakyat tidak selamat, bukan sengsara sesengsara-sesengsaranya. Inilah hasil demokrasi yang dikeramatkan orang?⁵¹⁾

Disatu sisi memang secara faktual itulah yang terjadi namun juga tak bisa dipungkiri kalau semangat individualisme hasil revolusi 1789 tersebut juga membebaskan manusia dari kungkungan kaum feodal serta melahirkan kemerdekaan berpikir sehingga pada akhirnya akan menyumbang terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan meletusnya revolusi individual ini, selang beberapa waktu muncul pula revolusi industri di Inggris. Dan hasilnya, terjadilah perkawinan antara dua revolusi ini yang pada akhirnya menjadi titik awal munculnya imperialism modern. Semangat persaingan individu mengilhami terjadinya liberalisasi politik dan liberalisme bidang politik ini memperkokoh dan memberi stimuli semangat kapitalisme.

Dengan semboyan *Laissez Faire, Laissez Passer* artinya (segala kegiatan ekonomi diserahkan ke pasar) atau merdeka berbuat dan merdeka berjualan inilah, maka meletup persoalan baru yakni lahirnya kekuatan kapitalisme. Ini berarti akan terjadi penanaman modal yang sudah tentu akan menembus benteng wilayah dan waktu. Perkembangan yang terjadi di Eropa tersebut tak luput dari antisipasi Soekarno. Dan betul, tatkala akhirnya terjadi proses penyaluran modal-modal ke luar negeri, disana sudah terlihat adanya praktik imperialisme dan kolonialisme. Indonesia tak lepas dari percikannya. Lewat VOC (*De Verenigde Oost Indische Compagnie*) modal-modal mereka tertanam. Tentu pula bahwa VOC ini berhasil menghisap sekian juta gulden dari bumi Indonesia. Rakyat menderita kian terus menerus. Jaringan perusahaan-perusahaan dagang Belanda ini tak puas bergerak dalam monousaha terus mengembangkan diri menjadi multi usaha, bergerak dalam bidang sosial, politik dan militer. Dan juga berhasil menciptakan suatu sistem perekonomian yang kian memperkokoh pendudukan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Belanda dan upah-upah minimum di tanam di mana-mana. Petani tidak semakin sejahtera hidupnya, melainkan semakin sengsara.

Kondisi dan situasi yang demikian memprihatinkan inilah akhirnya yang juga memberi inspirasi risalah berjudul: *Mentjapai Indonesia merdeka*.⁵²⁾ Mengawali tulisan tersebut ia mengutip pendapat Tilak; Hanya rakyat yang mau merdeka bisa merdeka menjadi titik landas mengupas kenapa Indonesia tak merdeka, diseberang Jembatan Emas hingga Mencapai Indonesia Merdeka.

Tak luput dari perhatiannya adalah tentang konsepsi sosialisme, ia lebih berorientasi terhadap pengimplementasian sosialisme ala Indonesia yakni menyelaraskan praktik sosialisme dengan kultur bangsa Indonesia. Sehingga kita bisa mengerti kenapa istilah proletar sebagai pemeran utama dalam iklan sosialisme diganti dengan istilah pribumi yakni Marhaen. Semua ini tentu ingin membuktikan bahwasannya kaum marhaen adalah kelompok masyarakat yang posisi sosialnya lebih baik ketimbang proletar, sebab mereka juga memiliki alat-alat produksi sendiri, meski dalam jumlah yang amat terbatas. Dengan alat-alat produksi tersebut mereka ingin menghidupi dari mereka sendiri. Jadi disini eksploitasi manusia atas manusia terelakkan. Namun mereka tetap hidup dalam kondisi di bawah standar karena adanya penetrasi

imperialism modern yang diluncurkan Barat. Melalui cetusan-cetusan idenya di atas, ingin Soekarno membangkitkan kesadaran manusia bangsa agar cepat siuman bukan semakin terlena. Oleh sebab itu ia merintis tentang sosionasionalisme dan sosio demokrasi⁵³⁾ yang pas buat bangsa Indonesia. Gagasan tersebut berisi pesan bahwa kita harus memperbaiki keadaan-keadaan dalam masyarakat. Sehingga tidak ada kaum tertindas, tidak ada lagi kaum sengsara dan menoleh kehadiran borjuisme.

Setelah lahirnya kesadaran nasional tersebut rakyat harus menghancurkan imperialism dan kapitalisme melalui gerakan aksi massa. Dari situ melalui pirantinya, Partai Pelopor ingin segera dicapai Indonesia merdeka. Ungkapan dan pola strartegi yang bagaimana yang dikembangkan Soekarno terhadap bidang ekonomi, memang tidak sejelas aspek politik dan demokrasinya. Diilhami *Dan Min Chu I* Dr. Sun Yat Sen yang ketiga yakni *min-sheng* atau sosialisme Soekarno rupanya berusaha keras mengsingkronkan pola pemikiran tersebut dengan kultur Indonesia. Didepan sidang BPUPKI Soekarno bertanya:

“Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan-cukup pakaian hidup dalam kesejahteraan merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya.⁵⁴⁾

Kondisi itulah yang diimajinasikan bangsa Indonesia. Dalam membicarakan pemikiran ekonominya ini tak luput pula dengan hadirnya sang ratu Adil. Ratu adil sebetulnya adalah faham *Social Rechtvaardigheid*. Rakyat ingin sejahtera. Dan keyakinannya kesejahteraan rakyat hanya bisa dicapai lewat politiek-economische democrasie. Dan demokrasi ekonomi dalam dasar negara kita tercantum pada sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Isi pesan yang dikumandangkan disini adalah prinsip keadilan dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Prinsip kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa merdeka merupakan jawaban bahwa Indonesia merdeka ditemui atau tumbuh semangat kapitalisme.

Butir kelima dari Pancasila tersebut itulah yang terus ia kembangkan dalam memahami persoalan-persoalan ekonomi kerakyatan bangsanya.

Dan iapun teramat yakin pula bahwasannya pemikiran demikian digumuli juga oleh tokoh-tokoh pergerakan lainnya seperti Hatta, Ratulangi, Syahrir dan lain-lain. Hanya melalui cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat dicapai kesejahteraan dan keadilan yang merata. Hal mana secara rinci berkaitan dengan sistim perekonomian di Indonesia tercantum juga pada pasal 33 UUD 1945. Menyimak isi pasal tersebut sudah jelas bahwa landasan yuridis formal ini dijadikan sokoguru utama bagi politik perekonomian dan masalah sosial di Indonesia ini. Oleh sebab, kemelaratan bangsa Indonesia waktu itu, maka dasar perekonomian rakyat mestilah berupa usaha bersama yang dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Hatta, menamakan kegiatan yang bercirikan ini dengan nama koperasi. Asumsi dasar berdirinya koperasi adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamentalis. Fahaman koperasi yang ingin dibangun adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada tradisi, adat istiadat bangsa Indonesia yang murni, tetapi kemudian terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Sementara bagi Soekarno, hanya lebih memberikan tekanan pada landasan operasionalnya bahwa yang demikian itu disebut kerja gotong-royong.

Oleh karena itu, selanjutnya melalui pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959, menindak lanjuti dekrit presiden dengan memperkenalkan lahirnya demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Betapapun ini kelihatannya tidak mungkin, namun para tokoh dan pemikir ekonomi sipil dan militer pun turut mendukung praktik daripada ekonomi terpimpin ini. Sebagaimana nampak dalam dukungan Hatta yang menerima pelaksanaan ekonomi dan demokrasi terpimpin disebabkan pada dasarnya ekonomi terpimpin merupakan pula aktualisasi makna daripada isi pasal 33 UUD 1945. Tujuan ekonomi terpimpin adalah mencapai kemakmuran yang sebesar mungkin bagi rakyat dengan tenaga produktif yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dari pihak militer lebih banyak memfokuskan dukungannya pada demokrasi terpimpin, yang mana nanti akan menciptakan suatu demokrasi yang didukung oleh situasi yang aman dan tertib. Dan menjaga kebutuhan bangsa dari rongrongan gerakan-gerakan separatis seperti PRRI/Permesta dan lain-lain yang pada gilirannya akan berpengaruh bagi kelancaran pembangunan dibidang ekonomi.

Dalam kondisi dan situasi yang amat keruh sekalipun, Soekarno masih sempat pula menuangkan ketegangan pilihan yang sungguh amat riskan yaitu *to hell with American aid*.⁵⁵⁾ Pondasi yang dibangun sejak semula menentang imperialism Barat memang memperhadapkan dia bersitegang dengan realitas yang ada. Konsep Persetan dengan bantuan Amerika adalah bukti nyata bahwa sosio ekonomi Indonesia harus bisa dibangun diatas semangat juang gotong royong bangsa Indonesia. Meskipun itu toch harus berhadapan dengan bahaya besar *vivere pericoloso* semante sebisa mungkin dihindari, tapi toch kalau tidak bisa mau apa lagi. Semangat berpikir semacam ini, sebetulnya adalah inspirasi yang tumbuh dari penjelasan Ir. Juanda berkaitan dengan keengganan Kennedy membangun Indonesia pada tahun 1963 yang oleh Juanda di tegaskan demikian:

“Kalau kita harus makan batu, ya kita makan batu, akan tetapi saya kira tak akan sampai begitu. Sudah barang tentu tanpa bantuan Amerika, keadaan sukar sekali. Yang berarti ikat pinggang harus dikencangkan, akan tetapi dalam hal ini perjuangan kita akan tergantung dari sumber-sumber nasional sendiri, kesetiaan nasional dan tak usah memperdulikan bantuan luar, bagaimanapun perjuangan kita bisa fatal dan bila kita berusaha mendapat bantuan luar negeri tapi tidak menemukan jiwa kita sendiri”.⁵⁶⁾

Oleh karena landasan tolak pikir yang demikian inilah seolah semakin meyakinkan komitmen Soekarno memelihara terus kekonsistenan bahwa perjuangan bangsa Indonesia hendaknya tetap berpegang pada kekuatan sendiri. Berkaitan dengan pernyataan, Amerika persetan dengan bantuan Amerika itu tidak cuma-cuma. Ia bukan sebagai hadiah dari seorang ayah yang kaya kepada anaknya yang melarat. Ini adalah suatu pinjaman dan harus dibayar kembali. Meminjam uang bukanlah bantuan. Soekarno jauh-jauh hari telah mengantisipasi bahwa perhatian Amerika terhadap negara-negara Asia yang melarat dalam bidang ekonomi karena dua faktor yang berkaitan dengan kepentingan negara Amerika Serikat sendiri.

- Pertama : Negara kami merupakan pasaran yang baik untuk barang mereka. Kami membayar kembali dengan memakai bunga.
- Kedua : Mereka ini takut, kami menjadi komunis. Ia mencoba membeli kesetiaan kami kepadanya. Ia membagi-bagikan kesana kemari karena dikejar-kejar oleh bayangannya

sendiri. Lalu, kalau kami tidak mengikuti jalan yang dibentangkan dihadapan kami, dia mencabut kembali pinjaman yang diberikan dan memperingatkan: “Kami tidak berikan lagi, kecuali jika engkau berkelakuan baik!”

57)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penegasan akan pilihan yang amat riskan tersebut adalah merupakan penentuan sikap. Dalam mana penentuan sikap ini berhubungan dengan komitmen nasionalisme Soekarno untuk membangun semua konstruksi rumah bangsa di atas kaki sendiri dan menempatkan ia sebagai kepala rumah tangga yang harus mengayomi seluruh anggota keluarga yang bertanggung jawab atas lapar dan kenyangnya anggota keluarga tersebut.

D. Soekarno dan Politik Luar Negeri

Menyusuri pijakan-pijakan awal terhadap pemikiran politik luar negerinya, maka keterkaitan antara pikiran tentang kesadaran nasionalisme yang dibangun sejak masa mudanya tak begitu saja bisa kita lepaskan. Menyongsong kehadiran kebangkitan Pan Asianisme yaitu paham yang melintasi batas-batas negeri tumpah darah sendiri baru aktif dalam proses interaksi dengan bangsa lain. Sebagaimana ditulis dalam Suluh Indonesia Muda tahun 1928, secara jelas dia ungkapkan tentang nasionalisme itu:

“Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit. Ia bukan nasionalisme yang timbul dari pada kesombongan belaka, ia adalah nasionalisme yang lebar, nasionalisme yang timbul dari pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat. Ia bukanlah jinggo nasionalisme atau chauvanisme, dan bukanlah suatu copie atau tiruan dari pada nasionalisme barat. Nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu bukti. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang didalamnya kelabaran dan keleluasaannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa.⁵⁸⁾

Kesadaran inilah yang kemudian membekas terus untuk senantiasa ia ciptakan kesinambungannya antara gagasan politik luar negeri pada awal-awalnya dengan realitas kebijaksanaan pada masa-masa akhir hidupnya. Sisi pemikiran politik luar negerinya, memang tidak begitu saja ditinggalkan dari tantangan-tantangan yang ia hadapi dalam praktik

politik. Sehingga dengan demikian praktis ide tersebut kita jadikan titik awal daripada tuangan politik luar negerinya secara konsepsional dan implementasinya baru dimulai dalam rentang demokrasi dan parlementernya.

Meskipun pada masa demokrasi Parlementer ia tak lebih dari presiden tanpa portofolio (tanpa kekuasaan riil), namun obsesinya ingin tampil sebagai penentu kebijaksanaan politik luar negeri melampaui kewenangan konstitusional amat begitu besar. Satu-satunya kesempatan yang ingin ia tunjukkan pada dunia luar dan lawan politik dalam negerinya adalah pada tahun 1956, sewaktu ia mengunjungi negara barat meliputi AS, US, Eropa Timur dan RRC. Hal yang amat membuat gusar pemerintah Jakarta adalah pendekatan-pendekatannya personalnya yakni dengan melakukan apa yang disebut diplomasi pribadi dengan membuat pernyataan-pernyataan politik bahkan komunike bersama tanpa lebih dulu mengkonfirmasi dengan perdana menteri di Jakarta, sebagai pemegang kekuasaan politik operasional. Namun begitu, baru pada masa operasionalisasi Demokrasi Terpimpinlah seluruh ide-ide politik luar negerinya dapat ia implementasikan secara kongkrit. Oleh sebab ia merupakan pusat kekuasaan yang utama (*centrum of power*). Kekonsistenan mengibarkan issue sentral tetaplah sama. Dulu garis dasar perjuangan politik luar negerinya adalah mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme dari negeri Hindia Belanda, namun sekarang hanyalah dengan mengganti perjuangan membebaskan negara Indonesia dari Nekolin (Neo Kolonialisme dan imperialisme). Semangat juang sebagai modal utama tetap seperti dulu yakni dengan radikalisme, non cooperation.

Memang politik luar negeri adalah juga merupakan kesinambungan politik luar negeri, oleh karena desakan kebutuhan dalam negerilah setiap negara mengharuskan diri berinteraksi dengan negara lain. Tanpa relasi yang demikian, niscaya suatu negara itupun akan terkecil. Kondisi demikian itulah yang sangat diabaikan pada demokrasi liberal. Di mana persatuan dan kesatuan sebagai asset utama penyelenggaraan politik luar negeri tercabik-cabik karena sebelum dewasa kita mempraktikkan demokrasi parlementer tersebut. Tak ayal jikalau Soekarno amat kecewa, namun apa daya waktu itu ia hanyalah presiden simbolik. Kemampuan yang ia punyai cuma sekedar mengkritik sembari berusaha keras membedol batasan sekedar mengkritik sembari berusaha

keras membedol batasan kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Sehingga dengan ambisius Soekarno ingin sekali melakukan terobosan-terobosan politik. John D. Legge⁵⁹⁾ melukiskan bahwa terobosan politik yang dilakukan adalah dengan reinterpretasi konstitusi, yang kadang-kadang disertai meminta langsung kepada rakyat dengan melangkahi dan berlawanan dengan keinginan pemerintah, telah menimbulkan tuduhan sabotase terhadap wewenang politik anggota kabinet.

Mengamati perilaku politiknya, Soekarno senantiasa pada masa demokrasi parlementer tersebut terus mencoba masuk dalam lingkaran kekuasaan. Dengan mempergunakan sebaik mungkin setiap momentum yang ada, Soekarno senantiasa mengumandangkan gagasan-gagasan politiknya. Dalam peringatan lima tahun Indonesia merdeka umpamanya Soekarno⁶⁰⁾ menyinggung agar agar secepat mungkin Irian Barat diselesaikan. Sebab pada hakikatnya apa yang dipraktikkan Belanda disana tak ubahnya dengan praktik kolonialisme yang melanggar perjanjian bilateral KMB tetap tidak dipatuhi maka Soekarno mengusulkan kepada kabinet Natsir yang berkuasa saat itu untuk segera membatalkan secara sepihak. Menyusul kemudian pemberian sangsi-sangsi ekonomi kepada Belanda.⁶¹⁾

Selain pada rapat-rapat umum, Soekarno juga semakin gencar mengorbitkan gagasan-gagasannya lewat media massa. Pada pertemuan dengan para wartawan di istana merdeka misalnya, Soekarno juga mengemukakan kebenarannya ia turut serta dalam penyelesaian Irian Barat tersebut. Iklim politik semakin baik tatkala kabinet Natsir diganti oleh kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952), di mana ada ruang gerak yang longgar bagi presiden simbolik ini menawarkan ide politik luar negerinya seperti, bagaimana persepsinya tentang terbentuknya Uni Indonesia-Belanda, serta kritikan-kritikan atas sisa-sisa kolonialisme Belanda yang belum tuntas. Walaupun penetapan kebijaksanaan politik luar negeri yang netral telah dikomitmenkan, namun kecenderungan memihak ke Amerika tetap kentara. Paling tidak ada dua peristiwa yang turut mendukung kecenderungan di atas yakni, kesediaan Indonesia menghadiri konferensi perdamaian dengan Jepang di San Fransisco serta persetujuan atas embargo pengiriman bahan mentah ke Cina. Selain itu keteledoran pemerintahan Sukiman dengan menerima bantuan militer dan ekonomi dari AS tahun 1952, berikut ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam undang-undang keamanan bersama-MSA (*Mutual*

Security Act) di mana ini berarti suatu deviasi terhadap prinsip-prinsip luar negeri bebas aktif.⁶²⁾

Kasus akta keamanan bersama tersebut, semakin memberi peluang besar bagi Soekarno untuk melancarkan kritikan-kritikan pedasnya atas sikap pemerintah yang mulai mengkhianati prinsip tidak memihak kita. Merespon kecaman pedas Soekarno tersebut pemerintahan Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) sebagai pengganti pemerintahan Sukiman yang telah jatuh, berusaha keras memperbaiki citra buruk tersebut. Bantuan Amerika tidak lagi mencakup bantuan militer (*military assistance*) lagi, melainkan sebatas bantuan yang meliputi soal teknis dan ekonomi semata. Prinsip pintu terbuka agak longgar terkuak dengan iktiar menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Sementara tindak lanjut solusi konflik Irian Barat dijanjikan segera diselesaikan secepat mungkin. Alhasil dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo ini, Soekarno tidak banyak melakukan kecaman. Namun begitu kekonsistenan Soekarno mengulang issue Irian Barat tetap saja intens. Ditambah lagi himbauannya agar pemerintah sekarang, lebih berwibawa (sebab pemerintahan dilanda krisis *Gezag*, krisis kewibawaan).

Setelah kabinet Wilopo jatuh tahun 1953 karena tidak mampu keluar dari krisis politik, duet Ali Sastroamidjoyo sebagai Perdana Menteri dan Soenario sebagai menteri luar negerinya seakan menjadi pasangan yang serasi melambungkan reputasi Indonesia dalam fora internasional. Pada bulan 28 April – 2 Mei 1954 dilaksanakan Konferensi Colombo di Sri Lanka yang merupakan awal dari suatu ide untuk menciptakan solidaritas yang lebih luas bagi negara Asia Afrika. Konferensi itu membahas keprihatinan negara-negara Asia agar bisa keluar dari ketergantungan/ketegangan-ketegangan dengan negara barat akibat penjajahan. Waktu itu Indonesia diwakili oleh Ali Sastroamidjoyo. Pertemuan awal ini semakin berkembang hingga kemudian dilanjutkan pada pertemuan Bogor delapan bulan kemudian yang menghasilkan suatu kesepakatan untuk mengadakan konferensi Asia-Afrika I di Bandung tahun 1955. Soekarno menilai, KAA ini adalah moment penuh signifikan di mana Indonesia harus bisa menampilkan dirinya sebagai pelopor negara-negara Asia-Afrika disatu pihak, dan dipihak lain diartikan sebagai suatu kesepakatan untuk menunjukkan kepaiwaiannya dalam masalah-masalah politik luar negeri.

Dalam pidato pembukaan konferensi Asia-Afrika tersebut Soekarno menekankan pentingnya persatuan negara-negara Asia-Afrika agar bersatu, bangkit melawan kolonialisme. Konsep Bhineka Tunggal Ika ia pakai untuk mempersatukan kelompok-kelompok dalam negeri juga diangkat pada tataran internasional, tatkala ia mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan diantara bangsa-bangsa Asia-Afrika seperti agama misalnya bukanlah penghalang bagi persatuan bahkan memberi kekuatan spiritual yang mendukung penampilan fisik yang dipunyai. Keterpesonaan pemimpin-pemimpin Asia-Afrika yang hadir waktu itu mendengar pidato pembukaan Soekarno terdorong kuat, guna memperoleh dukungan serta legitimasi dari dunia luar bagi dirinya untuk dukungan serta legitimasi dari dunia luar bagi dirinya untuk secara sah melibatkan diri dalam mencetuskan pemikiran-pemikiran politik luar negerinya sekaligus aplikatifnya konferensi Asia-Afrika ini bagi Soekarno juga, seolah membawa segar untuk mengkritik segala hal berkaitan dengan praktik demokrasi parlementer di dalam negeri seraya mengangkat dirinya sebagai pemimpin dunia ketiga. Selain Indonesia naik pamornya ditingkat internasional, bagi perdana menteri Ali ini juga merupakan kesempatan baik, karena ia banyak memperoleh undangan keluar negeri, antara lain ke Cina oleh Mao Tze Tung. Pada bulan Mei 1955 dia ditunjuk sebagai mediator dalam pertikaian antara Cina, Philipina dan Muangthai bahkan dengan Amerika Serikat.⁶³⁾ Jalanan diplomatik juga diadakan dengan Uni Soviet pada tahun 1953, sehingga secara otomatis ini merupakan dukungan di PBB dalam penyelesaian Irian Barat.

Walaupun dalam kebijaksanaan politik luar negeri kabinet Ali berhasil, tapi rupanya tak didukung oleh Stabilitas domestik, sehingga selang beberapa waktu saja Kabinet Ali ini jatuh dan digantikan dengan Burhanuddin ini dianggap sebagai pemerintah beraliran garis keras dengan ditandai pengunduran diri secara sepihak Uni Indonesia-Belanda tanggal 13 Februari 1956, namun tidak berarti Soekarno mendukung tindakan tersebut. Bahkan Soekarno menolak menandatangani Akta tersebut menjadi undang-undang yang berkekuatan hukum. Tak lama kemudian, kabinet inipun jatuh dan diganti oleh Ali Sastromidjoyo lagi (Kab. Ali II). Pada masa kabinet Ali II ini, Soekarno mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat selama 17 hari (dikenal pula sebagai misinya yang pertama), di mana ia mampu memikat publik Amerika

Serikat. Dalam setiap moment Soekarno selalu menyinggung masalah kolonialisme yang terjadi di negara-negara Asia-Afrika serta menampilkan diri sebagai wakil negara-negara dunia ketiga. Terhadap Irian Barat, Soekarno juga menyatakan bahwa penyelesaiannya tak cukup melalui perundingan konvensional saja.

Beberapa bulan kemudian Soekarno berkesempatan pula mengunjungi Uni Soviet, sejak 23 Agustus hingga 13 September 1956. Dalam kunjungan ini, Soekarno mulai dengan move-move politiknya, hal mana sangat disayangkan Jakarta karena sebagai presiden simbolik, Soekarno tidak boleh melampaui batas-batas kewenangan konstitusional. Namun begitu, sebenarnya apa yang dilakukan Soekarno pada hakikatnya adalah upayanya menekan krisis politik dalam negeri serta menaikkan suhu politik di Jakarta.⁶⁴⁾ Terdapat tiga hal yang paling mendasar yang senantiasa diulang-ulang oleh Soekarno⁶⁵⁾ dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran lewat pidato-pidatonya yakni: 1) Pengutukan kolonialisme Belanda, 2) Pernyataan bahwa demokrasi barat bukanlah jalan yang benar untuk diikuti Oleh Indonesia, 3) Penghormatan kepada Uni Soviet yang penuh kedamaian. Tak seorangpun dalam rombongan resminya yang terdiri dari wakil-wakil lima partai besar dan kecil, berusaha untuk menghentikannya. Lebih daripada itu, dalam pertemuan terbatas pada hari Senin tanggal 10 September 1956, sewaktu ia mengadakan pertemuan dengan presiden Voroshilvo di Kremlin, disepakatilah untuk mengadakan komonike bersama. Indonesia diwakili oleh Ruslan Abdulgani, sedangkan Soviet diwakili oleh Gromyko. Akhirnya disepakatilah pernyataan bersama yang terdiri dari enam pasal tersebut.

Terbetiknya berita mengenai penandatanganan tentang pernyataan bersama ini sampai kekalangan politik di Jakarta dampaknya terasa begitu eksplosif. Baik pemerintah maupun partai-partai politik berpendapat, bahwa pernyataan bersama itu dibuat menyimpang dari wewenang dan ketentuan parlemen.⁶⁶⁾ Pemimpin-pemimpin partai politik yang turut dalam rombongan presiden seperti Sukiman dari Masyumi, Zainal Arifin dari NU, Arudji dari PSII, Leimena dari Parkindo dan Sutarto dari Partai Katholik, walaupun menentang penandatanganan tak dapat berbuat apa-apa, karena mereka rak diikut sertakan dalam perundingan-perundingan politik, sehingga harus menerima pernyataan bersama itu sebagai semacam *fait accompli*.

Setelah selesai kunjungan ke Uni Soviet, rombongan Soekarno meneruskan perjalanan ke Yugoslavia. Betapapun mendapat tekanan untuk tidak membuat komonike bersama lagi Soekarno tetap tak kehabisan akal untuk menyampaikan pandangan-pandangan umum tentang masalah-masalah internasional. Lewar pidato umum, sewaktu perpisahan dengan presiden Titio, ia disatu sisi memuji dan menyanjung pribadi presiden Tito dalam memimpin Yugoslavia menuju ke arah sosialisme, tapi dilain pihak walaupun secara tidak langsung dinyatakan pribadi sosialis-Sutan syahrir yang kebarat-baratan, sekurang-kurangnya telah menjalin hubungan dengan Yugoslavia, bila tidak dapat hubungan persahabatan yang erat sama sekali waktu itu. Lebih jauh dia berkata:

“Saya yakin, penduka Yang Mulia Presiden bahwa sistem sosialis yang progresif, penuh dinamika revolusioner, yang dimiliki oleh negara ini adalah jawaban yang tepat untuk memberikan dan isi yang bernilai bagi kehidupan dan pola kehidupan bangsa anda. Saya merasa amat senang melihat

Saya merasa amat senang melihat, bahwa sosialisme disini berlainan sama sekali dari sosialisme yang dianut Barat. Sosialisme di Barat sudah tidak ada apa-apanya, sudah usang polanya karena tidak mempunyai cita-cita yang revolusioner dan karena tidak dapat menyediakan suatu platform yang diperlukan rakyat sebagai landasan kerja.

Inilah sebabnya, Paduka Yang Mulia Presiden apa sebab sosialisme barat tidak dapat berkembang di Asia dan Afrika, nasionalisme masih merupakan sumber pokok dan cita-cita kami. Nasionalisme artinya tekad untuk menentukan masa depan dalam tangan kita sendiri, sama seperti sosialisme progressive dinegeri ini yang telah mencapai hasil-hasil yang positif untuk Yugoslavia”.⁶⁷⁾

Sekembali dari kunjungan ke beberapa negara tersebut Soekarno semakin percaya diri, apa lagi situasi politik didalam negeri makin rapuh ini makin menambah keyakinannya bahwa cukup waktu untuk tampil dalam pentas politik lebih riillagi. Terobosan pertama dilakukan, sepulang ke tanah air yaitu pada peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1956, ia membuat pernyataan politik yaitu untuk bersama-sama menguburkan partai-partai politik.⁶⁸⁾

Setelah mengecam praktik demokrasi liberal yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa ia kemudian menawarkan satu model demokrasi

alternatif yang disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin. Dalam pidatonya tanggal 21 Februari 1957, ia menyampaikan pandangan-pandangannya yang pernah dilontarkan sebelumnya. Dia mengajukan tantangan filosofis yang masuk akal atas system demokrasi liberal yang bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia. Respon terhadap gagasan inipun bervariasi. Pada bulan Maret 1957 misalnya Panglima Wilayah Militer untuk Indonesia Bagian Timur mengumumkan keadaan perang dan siaga serta menuntut otonomi yang luas bagi daerahnya. Disusul beberapa bulan kemudian. Perdana Menteri Ali menyatakan pengunduran diri atas pemerintahannya dan Soekarno mengumumkan kepada seluruh bangsa bahwa Negara dalam keadaan darurat perang dalam usaha mengatasi dengan cara yang legal tantangan dari Indonesia Bagian Timur. Tindakan ini semakin meruyamkan posisi partai-partai politik yang identik dengan kepentingan daerah. Akibatnya, terciptalah hubungan kerja sama yang serasi antara militer dan Soekarno yang kemudian bermuara pada perubahan karakteristik politik Indonesia dan arah kebijaksanaan luar negeri. Kemudian melalui Dekrit Presiden tanggal 8 April 1957 dibentuklah kabinet kerja yang ekstra parlementer dengan Perdana Menteri Ir. Juanda dan Dr. Subandrio sebagai menteri luar negerinya. Lewat kabinet baru inilah suara-suara dan pemikiran politik luar negerinya, terutama melalui sidang-sidang PBB dikumandangkan. Sewaktu diplomasi paksaan⁶⁹⁾ dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan kekhawatiran Amerika atas pengaruh komunis di Indonesia, untuk menekan Belanda.

Perkembangan semakin memburuk, karena konflik politik dalam negeri yang tidak kunjung reda, Soekarno berusaha membuat jarak dan melonggarkan jalan agar pertingkaian-pertingkaian itu tetap berjalan di luar dirinya. Pada bulan November 1957, tatakala masalah Irian Barat mulai dibahas dalam forum PBB, ia sengaja meninggalkan Jakarta untuk kemudian melakukan kunjungan ke Indonesia Bagian Timur dan berpidato secara mendalam mengupas ikwal Irian Barat. Dengan mengawali pidatonya, dengan sebuah pernyataan politik ingin mengubah hubungan dagang dengan Belanda dan Jerman Barat, seraya mengalihkan kerja sama dagang tersebut dengan pihak Eropa Timur, Cina, India dan Jepang⁷⁰⁾. Inilah peringatan keras Soekarno apabila resolusi itu gagal disetujui. Seperti ia katakan⁷¹⁾, kita akan menggunakan cara baru dalam perjuangan kita yang akan mengejutkan bangsa-bangsa di dunia. Dengan

nada yang sama Dr. Subandrio di PBB juga menggemakan pandangan militan presidennya serta memperkirakan akan terjadinya prospek ketegangan perang dingin tengah diundang ke Asia Tenggara jikalau Indonesia dirintangi. Menyusul statmen politiknya tersebut, Soekarno dengan mengorganisir kampanye-kampanye umum sepanjang bulan November dengan melontar slogan-slogan anti Belanda, tindakan agitasi serta seruan-seruan pemboikotan atas perusahaan-perusahaan Belanda. Walaupun Natsir, Hatta menyangkan hal ini terjadi namun mereka tak bias mengendalikan emosi masyarakat untuk mendukungnya. PKI sendiri lekas-lekas memanfaatkan kesempatan ini untuk mengonsolidir organisasi-organisasi serikat buruh yang berafiliasi padanya. Sementara disisi lain kejadian amat tragis hamper saja menimpa dirinya tatkala sebuah granat dilempar kearahnya sewaktu mengunjungi anaknya yang sedang dirawat (peristiwa Cikini).

Apa yang dialami Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat menemui jalan buntu, ibarat menyulut api dalam minyak. Demonstrasi dan aksi kekerasan terjadi di mana-mana, bahkan Soekarno seakan memberi restu kepada bekas tentara pelajar untuk mengambil alih kantor pusat perusahaan pelayaran Belanda-KPM di lapangan Merdeka Jakarta.⁷²⁾ Pada puncaknya Soekarno sendiri melakukan tindakan penertiban dengan mengambil alih seluruh saham Belanda dan menjadikannya perusahaan milik Negara. Adapun pengelolaan daripada usaha baru ini tidak diberikan kepada partai-partai politik (professional), melainkan kepada pemimpin-pemimpin elite militer yang disukainya⁷³⁾. Langkah-langkah ini dinilai sebagai terobosan kedua yang dilakukan Soekarno untuk menggalang dan mempengaruhi militer.

Dobrakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia serta deportasi puluhan warga Belanda disusul 30.000 tenaga ahli Belanda⁷⁴⁾ menimbulkan reaksi keras di dunia internasional. Terutama reaksi tersebut berasal dari Australia dan Belanda. Sedangkan hal yang sama juga ditujukan oleh lawan-lawan politiknya yang kemudian mereka memilih untuk bergabung dengan PRRI di Sumatera Barat pimpinan Syarifuddin Prawiranegara. Mengantisipasi keadaan yang memburuk ini tak ada cara lain kecuali menekankan pentingnya menumbuhkan wawasan kebangsaan yang lebih mengental. Untuk itulah garis demarkasi kelautan sebagai pembatas teritorial kepulauan Indonesia selekasnya ditegakkan untuk menjamin tegaknya stabilitas

negara dari kesewenangan pihak luar negeri. Oleh karena itu tanggal 13 Desember 1957 lewat deklarasi kelautan kita, diberikanlah batas laut itu sejauh 12 mil dari garis pantai. Deklarasi ini merupakan sebuah tuntutan dengan yurisdiksi yang sama atas perairan sekeliling serta menyilang yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang terpencar-pencar tersebut.

Dalam kemelut politik yang belum surut tersebut, kegoncangan terjadi lagi sewaktu Soekarno tidak ada di tanah air, dengan meletusnya berbagai pemberontakan separatis bulan Februari 1958an yang disponsori oleh Masyumi dan partai Sosialis. Namun berkat persekutuannya yang harmonis dengan pihak militer, pemberontakan tersebut dapat digagalkan. Sehubungan dengan hal ini AS sangat sulit untuk menghindari dari tuduhan konspirasi. Sebab seorang bernama Allen Lawrence Pope yang bertindak sebagai seorang tentara bayaran yang ditugasi CIA dalam berbagai misi di Asia Tenggara di antaranya saat pertempuran di Dien Bien Phu, Vietnam dan pada saat pemberontakan PRRI/Permesta di Indonesia, dia tertangkap oleh TNI ketika usahanya mengebom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pesawat pembom B-26 Invader AUREV gagal dan akhirnya berhasil ditembak jatuh. Dalam sidang peradilan 28 Desember 1959, dia dijatuhi hukuman mati.

Mengeliminir citra buruk ini, pihak Gedung Putih dengan sigap menggusur Sterling Cotrell dengan Howard P Jones sebagai duta besar AS di Indonesia kala itu. Berkat kelihaihan Jones, memainkan peran mendekati Hartini, isteri keempat Soekarno, sikap Soekarno yang keraspun mulai melunak, apalagi dengan bantuan berupa bahan makanan dan lisensi ekspor senjata ke Indonesia. Hubungan buruk yang diwariskan mantan duta besar Cotrell berangsur membaik. Setelah memperoleh kewenangan mutlak, dalam penetapan politik luar negeri Soekarno lebih kokoh mengaplikasikan gagasan-gagasannya dalam demokrasi terpimpin. Ada tiga yang senantiasa ia ulang sebagai landasan konsepsional pemikiran politik luar negerinya yaitu:

1. Bebas aktif yang ditujukan untuk perjuangan menantang kolonialisme dan imperealisme.
2. Solidaritas Asia–Afrika yang ditujukan untuk menumbuhkan kepribadian nasional.

3. Bertetangga baik untuk persahabatan dan perdamaian antarbangsa.⁷⁵⁾

Bertolak dari dasar pemikiran politik luar negeri seperti itu, maka perjuangan merebut kembali Irian Barat tidak lebih sebagai kontinuitas perjuangan melenyapkan kolonialisme yang masih tersisa. Dalam forum Internasional nama Soekarno semakin disegani, oleh karena militansinya yang radikal menentang segala macam anasir-anasir imperialisme.

Berkaitan dengan penataan lembaga-lembaga politik dan penetapan Soekarnoisme sebagai ideologi nasional, masalah penyelesaian Irian Barat juga semakin mendesak dan harus segera diselesaikan. Dalam pidato 17 Agustus 1959 dengan judul, Penemuan Kembali Revolusi Kita berisi tiga kerangka revolusi dan lima persoalan revolusi Indonesia yang dikenal dengan Manipol-USDEK. Belum cukup sampai di situ Soekarno menambahkan dengan konsepsi *RIL (Revolution, Ideology dan Leadership)* atau Resopim (Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan) yang diperkenalkan pada HUT Republik Indonesia tahun 1961. Dua konsepsi dasar ini akhirnya terkristal dalam ajaran Soekarnoismenya. Terciptanya sosialisasi politik melalui doktrin Soekarnonisme ini berpengaruh kuat terhadap kebijaksanaan politik luar negeri. Sementara untuk menyalurkan kepentingan ideologisnya dilaksanakan lewat kepemimpinan tunggal Soekarno sendiri.

Dalam pada itu, perjuangan atas Irian Barat sudah barang tentu sudah memperoleh legalitas konstitusional via Manipol dan Resopim ini. Tak berhenti di sini setelah mengadakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960, sebulan kemudian di depan forum PBB Soekarno mengulangi tekadnya yang semula, yakni jika masalah Irian Barat belum memperoleh penyelesaian secara implisit akan dipertegas dengan cara lain. Lebih jauh Soekarno berkata:

“Kami telah berusaha untuk menyelesaikan Irian Barat dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertahun-bertahun. Kami telah berusaha dan tetap berusaha. Kami telah berusaha menggunakan alat-alat perserikatan Bangsa-bangsa dan kekuatan pendapat dunia yang

dinyatakan disini. Kami telah berusaha, dan dalam hal inipun kami tetap berusaha. Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransinyapun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberi alternative lainnya, sejarah, maka kita tidaklah dapat diersalahkan. Akan tetapi akibat dari kegagalan mereka ialah timbulnya ancaman terhadap perdamaian dan sekali lagi, hal ini menyangkut pula Perserikatan Bangsa-bangsa".⁷⁶⁾

Selain dengan retorika bahasa yang bernada ancaman tersebut Soekarno juga mempersiapkan diri dengan perangkat keras persenjataan. Setelah gagal memperoleh bantuan persenjataan dari Amerika Serikat, misi Indonesia yang dipimpin oleh Nasution mengadakan negosiasi dengan Uni Soviet dan berhasil. Melihat kenyataan ini sikap keras Amerika kian melemah karena takut komunis merambat ke Asia Tenggara khususnya Indonesia yang strategis. Akhirnya setelah pergantian presiden ke tangan Kennedy dari Eseinhover, muncullah suasana agak lebih longgar, sehingga dijakilah selain membantu upaya penyelesaian kasus Irian Barat secepat mungkin juga bantuan dalam bentuk ekonomi.

Selain di Forum PBB usaha penumpasan Irian Barat juga dilakukan Soekarno lewat hubungan pribadi dengan Kennedy agar ia berusaha keras mendesak Belanda keluar dari Irian Barat dengan cara damai, jika tidak Indonesia akan menggunakan kekerasan.⁷⁷⁾ Oleh sebab itu pada tanggal 12 Desember 1961 dibentuklah dewan pertahanan Nasional Indonesia dengan kendali puncak dipegangnya sendiri. Munculah kemudian pengumuman Trikora dari Soekarno yang berisi; gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan bendera Merah Putih di Irian dan bersiaplah untuk mobilisasi umum. Meskipun telah berlangsung *clash* fisik antara militer Indonesia dengan angkatan perang kerajaan Belanda, akhirnya jasa baik Kennedy mengirim Jones Kenny seorang jaksa agung AS agar pertingkaian tersebut dihentikan Belanda kemudian diajak berunding di forum PBB. Peta kekuatan telah berubah, Australia dan AS tidak lagi mendukung Belanda sehingga dengan demikian tercapailah kesepakatan berdamai. Selanjutnya badan internasional tersebut membentuk UNTEA (*United Nations Temporary Executive Administration*) yang bertugas mengawasi peralihan administrasi dari pemerintahan kerajaan Belanda kepada Indonesia tanggal 4 Mei 1963. Dengan demikian berakhirilah perjuangan mewujudkan amanat proklamasi 1945.

Belum berhenti sampai disitu, kerja politik Soekarno disusul dengan babak konfrontasi dengan Malaysia untuk membentuk negara merdeka dengan memasukkan wilayah-wilayah bekas jajahan Inggris. Philipina ternyata menentang keras ketika Sabah akan dimasukkan kebagian Malaysia. Sementara Indonesia sendiri memang tidak pernah setuju sejak tahun 1957 sewaktu pembentukan Malaya, lebih-lebih setelah diketahui negara tersebut juga mendukung Belanda dalam kasus Irian Barat.

Kasus Malaysia memang memperoleh perhatian khusus tatkala masalah Irian Barat sudah rampung. Apalagi tuduhan Malaysia yang menyatakan pemberontakan Brunei 8 Desember 1962 di bawah komando Sultan Ashari juga melibatkan Indonesia. Justifikasi dari aksi konfrontasi ini adalah asumsi yang berkembang bahwa ini menyangkut ancaman keamanan secara langsung akibat kekacauan yang terjadi di daerah tapal batas. Sementara ada asumsi lain yang menyatakan, adanya *issue* kolonialisme dan imperialisme gaya baru yang disebut dengan Nekolim (Neo Kolonialisme, kolonialisme dan imperlisme) yang bertentangan dengan pemikiran Soekarno, bertetangga baik untuk persahabatan dan perdamaian dunia. Apalagi image Soekarno mengental bahwa Malaysia negara boneka buatan Inggris yang identik dengan Nekolim.

Selain melakukan diplomasi paksaan, Soekarno juga melakukan upaya diplomasi kawasan di mana ia berusaha keras untuk mendekati Manila guna menyokong langkah implementasi politiknya tersebut. Pada bulan Maret 1963, diadakanlah pertemuan komisi PBB untuk Asia dan Timur jauh di Manila, dalam mana kesempatan ini diartikan sebagai jembatan awal pertemuan tiga kepala pemerintahan untuk menyelesaikan masalah. Pertemuan ini, membuahkan hasil yaitu dicapai kesepakatan untuk mempertahankan keamanan di wilayah ini, dan basis-basis tentang asing hanyalah bersifat sementara dan Malaysia memperoleh hak '*self determination*' yang terlebih dulu harus memenuhi verifikasi *independence* sebagai prasyarat keabsahannya.

Betapun ini dinilai sebagai keberhasilan diplomatik yang mengesankan tapi sempat tercoreng oleh karena ulah Tengku Abdul Rahman yang lekas mengumumkan pendirian negara Malaysia tanpa lebih dulu menunggu hasil akhir observasi tim peninjau PBB atas

Sabah dan Serawak. Soekarno merasa dipermainkan, timbullah aksi-aksi brutal di Jakarta memprotes di Kedubes Inggris dan Malaysia. Bahkan Soekarno mengirim pasukannya untuk menyerang di daerah perbatasan. Setelah Soviet tak mau membantu penyediaan senjata lagi, Soekarno memperoleh keberuntungan dengan upaya Robert Kennedy menyelesaikan konfrontasi tersebut. Soekarno mendesak Amerika agar menekan Inggris selekasnya mengakhiri konflik ini. Kejengkelan bertambah sewaktu pihak Manila membuka perwakilannya di Kuala Lumpur. Kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, membuat Soekarno mengalihkan perhatiannya ke negara-negara Asia-Afrika dan Non Blok. Di bulan Mei 1964, dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia (Operasi Dwikora). Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Kolaga dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dani sebagai Pangkolaga.

Soekarno semakin kecewa, sewaktu dukungan yang sedianya datang dari negara-negara Asia-Afrika juga tak kunjung diperoleh. Pada bulan Oktober 1964 di Kairo, Soekarno kembali mengemukakan gagasannya mengenai NEFOS dan mengancam imperialism yang merusak koeksistensi damai. Hal yang amat menyakitkan adalah tatkala negara baru tersebut diterima sebagai anggota dewan keamanan pada bulan Desember 1964 akibatnya ia mengancam untuk mengundurkan diri dari dewan keamanan PBB. Namun ini juga tetap tidak memperoleh dukungan dari negara-negara Asia-Afrika keadaan ini semakin memperlicin hubungan dengan RRC dan terbentuklah poros Jakarta-Hanoi dan Peking.

Perjalanan aktifitas politik luar negerinya kendati agar tersendat oleh serangkaian kegagalannya melobi negara-negara sekutu dari Asia-Afrika namun sedikit terhibur atas keberhasilannya memperoleh simpati dari negara-negara Asia-Afrika dalam konferensi Asia -Afrika tahun 1955 di Bandung. Hal ini juga merupakan momentum terpenting bagi kekokohan tekadnya untuk lebih aktif mengaktualisasikan gagasan konsepsionalnya tentang politik luar negeri yakni menumbuhkan kepribadian nasional dengan meningkatkan kerja sama dan solidaritas Asia-Afrika. Keterlibatannya dalam kegiatan dalam negara-negara berkembang mendorong munculnya konsepsi Soekarno tentang pembelahan kekuatan-kekuatan dunia tidak lagi atas blok Timur dan

Barat tapi telah mengalami pergeseran yang cukup berarti/kuat menuju kearah pengelompokan negara-negara yang baru bangkit. Atau dengan kata lain Oldefos melawan Nefos. Pemikiran yang berbau Marxis ini dikemukakan dalam KTT Non Blok di Beograd bulan September tahun 1961.⁷⁸⁾

Meskipun kurang mendapat sambutan hangat, aktualisasi gagasan kembali ia manfaatkan sebaik mungkin, tatkala Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games, Indonesia menolak atlet-atlet dari Taiwan dan Israel yang dicap berasal dari negara-negara Oldefos. Ketegangan terjadi karena MN Sondhi wakil presiden federasi Asian Games memprotes, akibatnya Indonesia diskors oleh panitia olimpiade (IOC). Soekarno menggunakan kesempatan yang ditimbulkan oleh penolakan ini untuk menentang penguasa olah raga internasional dengan cara mensponsori suatu pesta olahraga yang bersifat *revolusioner* atau GANEFO (*Game of the new emerging force*) yang diselenggarakan di Jakarta tahun 1963.⁷⁹⁾ Peristiwa GANEFO ini berlangsung dengan partisipan, dalam jumlah yang memadai untuk menyebut usaha ini sebagai sukses politik. Keberhasilan ini juga mendorong Soekarno untuk membentuk forum yang lebih luas diantara negara-negara Asia-Afrika dengan wadah CONEFO (*The Conference of the Emerging Force*) Ikwal tentang ide dan gagasan CONEFO merupakan perluasan dari konsepsi KTT Non Blok dan KAA, karena konferensi yang diajukan ini meliputi semua negara yang bersedia bersatu untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan sosial dan menentang penghisapan manusia atas manusia oleh bangsa lain dalam bentuk apapun.⁸⁰⁾

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KONSEP-KONSEP PEMIKIRAN POLITIK SOEHARTO

4

A. Soeharto dan Ideologi Pancasila

Ideologi sebetulnya merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dengan keyakinannya, yang dalam hal tertentu dapat digolongkan ke dalam ideologi. Sebagaimana pendapat dapat didukung oleh banyak orang, demikian pula pengetahuan seseorang tentang keyakinan dan ideologi yang dianutnya bisa kurang ataupun banyak. Seperti pula dalam ilmu pengetahuan ahli-ahli merupakan panutan. Demikian pula dalam hal ideologi ada juga pihak yang menjadi ikutan. Biasanya ikutan adalah seorang pemimpin. Namun kalau disebutkan bahwa panutannya adalah pemimpin maka dalam diri pemimpin tersebut (dalam hubungannya dengan ideologi) bertemu pemikiran (cita-cita ideologi) dan perbuatan (program dan pelaksanaan program). Ideologi memang untuk dilaksanakan bukan sekedar teori atau pemikiran. Ideologi pada pokoknya menurut Zhigniev K. Brezezinski sebagaimana dikutip pendapatnya oleh Deliar Noer⁸¹⁾ adalah suatu program aksi untuk konsumsi massa. Selanjutnya dalam kaitan ini persoalan ideologi sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara cukup dibatasi dalam substansi skope ideologi Pancasila. Oleh karena hanya Pancasila yang menonjol dalam pemikiran Soeharto mencakup ikwal ideologi. Obsesinya terhadap ideologi bukan semata-mata berhenti pada pemahaman teoritikal kehidupan berbangsa. Lebih jauh ia menegaskan:

“Pancasila bukan sekedar angan-angan indah, melainkan harus dapat kita wujudkan dan kita rasakan kehidupan nyata sebagai kebahagiaan lahir dan batin”.⁸²⁾

Secara orisinitas ideologi Pancasila bukanlah hasil/produk pemikiran politik Soeharto, sehingga aksentuasi persoalan dalam pembahasan sub bab ini pun tidak lagi mempermasalahkannya, melainkan lebih menekankan bagaimana perspektif Soeharto terhadap ideologi Pancasila itu. Lebih lanjut Soeharto mengatakan:

“Kita tidak mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita tidak menyampaikan sejujurnya mengenai ketetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yang dapat memberi bimbingan bagi kemajuan, kesejahteraan dan keselamatan bangsa kita. Ajakan saya adalah menjabarkan Pancasila itu dalam rumusan-rumusan yang sederhana dan jelas untuk dipakai pedoman sikap hidup manusia Pancasila. Jangan terulang lagi misalnya, Pancasila lalu berubah menjadi nasakom yang membawa bencana itu”.⁸³⁾

Benar memang membicarakan ideologi paling tidak kita diperhadapkan pada dua hal yang saling berimpitan. Pertama ideologi dilihat sebagai pilihan dan yang kedua ideologi dilihat sebagai keharusan oleh karena ia berkaitan dengan kehidupan suatu bangsa. Keharusan ini sangat ditentukan oleh kekuatan politik nasional kita sendiri. Dalam hubungan itu, ternyata kaitan ideologi dengan politik erat sekali, dan tidak mengherankan jikalau analisis terhadap ideologi pada umumnya berada dalam ruang lingkup politik.

Kalau ideologi itu hanya semata-mata masalah politik, kuat dan tahannya akan sangat tergantung kepada kekuatan politik itu sendiri. Ia akan kurang mendapatkan daya lekatnya dibidang kejiwaan. Apabila ideologi itu diinginkan untuk mendapatkan daya perekatnya dalam bidang kejiwaan, sehingga benar-benar merupakan suatu keyakinan, ideologi itu harus pula terwujud dalam kebudayaan. Dalam kenyataan ini, pernyataan ketetapan MPR No.II/MPR/1978 sangat tepat sebab Pancasila tidak saja dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga pandangan hidup bangsa, kepribadian ataupun jiwa bangsa kita sendiri. Hal itu juga berarti bahwa Pancasila mengandung makna tidak saja semata-mata masalah politik, tetapi juga masalah kebudayaan. Sehubungan dengan asumsi-asumsi diatas, maka tidaklah terlibat di dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan negara ini

dan bahkan selanjutnya memimpin proses jalannya sejarah negara ini, Pancasila merupakan pusat segala perhatiannya. Sebagai seorang tentara ia banyak terlibat dalam perjuangan dan pertempuran untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai pemimpin Orde Baru ia tampil dengan komitmen tunggal menyelamatkannya dari situasi yang kritis, meluruskan dan memurnikan pelaksanaannya. Dan sebagai kepala negara ia berusaha keras mewujudkan masyarakat Pancasila melalui usaha-usaha pembangunan.

Pemahamannya terhadap ideologi Pancasila tidak lain yang dimaksud di sini adalah yang bersumber pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Hal mana yang telah disyahkan oleh pendahulu kita tanggal 18 Agustus 1945 serta selanjutnya dikukuhkan oleh ketentuan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menegaskan bahwa:

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila, sebagai dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan karena tak dapat dirubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilihan umum Karena merupakan isi pembukaan berarti pembubaran negara”.⁸⁴⁾

Pijakan pemikiran terhadap dua ketentuan dasar dalam melihat penafsiran Pancasila sebagaimana tersebut diatas tadi, mengantar kita dalam pemahaman bahwasannya penjabaran pertama lebih menitikberatkan pada hal-hal yang sifatnya resmi dan mengikat seluruh warga negara guna mengatur kehidupan bersama dalam republik ini. Pancasila dipahami sebagaimana ia ada dalam UUD '45 beserta penjelasannya. Ia tidak boleh diganggu gugat sebagai sumber dari segala sumber hukum atau semata-mata yuridisial. Lantas yang kedua adalah lebih bersifat sebagai pedoman-pedoman dasar yang amat fleksibel sebagai pegangan untuk menjawab setiap tantangan zaman.

Bertalian dengan hal yang terakhir tadi, obsesi Soeharto amat kuat agar dalam memahami Pancasila harus terlebih dulu dikenang dan dikenal kembali sejarah perjuangan bangsa. Oleh sebab dengan cara begitulah akan ditahu langkah-langkah yang penting untuk mengenal dan menghayati nilai-nilai dasar sikap mental dan kebulatan tekad rakyat, untuk menjadi bangsa yang merdeka. Dengan latar belakang

sejarah ini pula akan dapat dipahami mengapa kemerdekaan nasional telah menjadi nilai bersama yang menempati kedudukan tertinggi.

Munculnya semangat kemerdekaan dan kesatuan Indonesia, merupakan proses yang panjang yang telah ada unsur-unsurnya sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, diperkuat oleh persamaan pengalaman dan penderitaan dibawah penjajahan asing yang kejam. Semangat kemerdekaan mendapat tambahan kekuatan baru dalam masa pendudukan Jepang yang singkat. Di mana waktu itu terjadi penstransferan pengetahuan dan ketrampilan militer oleh sebab banyak pemuda-pemuda yang dilatih untuk itu. Akibatnya muncul sejumlah pemberontakan dan gerakan-gerakan dibawah tanah yang kemudian bermuara pada lahirnya Indonesia merdeka. Maka tak heran jikalau tempaan waktu dan pengalaman itumemodifiaksi sebuah kepribadian khas Indonesia. Soeharto lebih lanjut mengatakan:

“Bangsa baru telah lahir dan sebuah negara baru telah dibangun. Ia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, ia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri. Sebab itu ia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu ditetapkannya menjadi pandangan hidup dan falsafah negaranya; Pancasila”.⁸⁵⁾

Atas dasar kenyataan di atas menjadi jelas bagi kita bahwasannya Pancasila tersebut lahir dalam pergulatan waktu yang relatif lama dan merupakan usaha yang intens. Didepan massa HUT Parkindo tahun 1969 di Surabaya ia berkata:

“Jadi, Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri dan ide besar bangsa kita sendiri”.⁸⁶⁾

Dalam kapasitasnya selaku pejabat presiden waktu itu, ia juga menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan kepribadian kita, adalah pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, pandangan hidup yang disetujui wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan kita, oleh karena itu, Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup yang dapat pula mempersatukan kita. Pancasila adalah

perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus selalu kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya.

Bukannya tanpa alasan itu ia tegaskan, bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa mengandung arti bahwa ia menunjukkan dirinya sebagaimana adanya. Sebagai diri pribadi, seseorang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang membedakan dirinya dengan orang lain. Dan kalau dikatakan sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa itu berarti bahwa pandangan itu mementingkan adanya persatuan. Hal ini tampak dalam sila ketiga yang berbunyi: persatuan Indonesia. Walaupun tujuan bangsa Indonesia telah tercapai, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, tidaklah dibenarkan adanya perpecahan didalamnya. Masyarakat yang adil dan makmur itu tetap berada dalam kerangka Persatuan Indonesia.

Adanya pendapat seperti yang dilontarkan pada masa orde lama yang mengatakan Pancasila itu alat pemersatu adalah suatu pendapat yang mengandung bahaya, sebab kalau kita telah bersatu, alat itu bisa diganti dengan paham lain, komunisme misalnya. Pendapat ini tak bisa dibenarkan. Dan kalau dibilang sebagai perjanjian luhur bangsa itu karena tatkala merumuskan dasar negara, para pendiri negara kita dengan keluhuran budi dan kesadaran yang dalam mencari rumusan yang dapat bertahan lama. Dan sesuai dengan suara hatinya agar negara yang didirikan akan tetap berlanjut dan lestari. Kesepakatan itulah yang dimaksud sebagai perjanjian luhur, oleh karena ia bukan perjanjian dalam rangka jual beli atau perjanjian yang bersifat menarik keuntungan material. Ia lebih bertendensi atau tujuan demi keselamatan bangsa di dalam wadah negara yang akan mengayomi hidup bersama.

Sebab itu kalau kita mengagungkan Pancasila, bukan lantaran ia ditemukan kembali dan dirumuskan oleh seseorang dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya, juga telah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Lebih jauh Soeharto mengatakan:

“Kekuatan Pancasila seperti telah terbukti sampai saat ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan milik seseorang, bukan milik sesuatu golongan, bukan sekedar penemuan satu orang, melainkan benar-benar mempunyai akar didalam sejarah dan batangnya seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita dengan tegas

mengatakan bahwa Pancasila adalah wujud kepribadian seluruh bangsa Indonesia”.⁸⁷⁾

Dasar pemikiran tadi, jugalah yang kemudian berujung pada suatu kegelisahan serta keprihatinan Soeharto yang seterusnya melahirkan sebuah kebijaksanaan fusi partai politik tahun 1973. Kelonggaran berpartai yang pada Pemilu tahun 1971 dinilai malah semakin membawa instabilitas, maka satu-satunya cara 10 partai politik yang ada tersebut harus disederhanakan. Maka muncullah PPP yang mewakili Islam fusi dari NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi, PERTI dan PSII. Dan PDI fusi dari PNI, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo dan IPKI serta Golkar. Tapi sayang, perbedaan orientasi visi dan ideologis tidak semakin menunjang tatanan demokrasi Pancasila malahan semakin membawa perpecahan. Pada tahun 1982 kemudian diusulkanlah sebuah gagasan penyeragaman asas partai politik. Dalam mana gagasan seperti ini merupakan salah satu bagian dari paket upaya Soeharto untuk mewujudkan stabilitas politik yang yaitu dengan menghapus asas ciri yang terdapat dalam kedua partai politik, selain Pancasila, PPP dan dengan Islamnya atau PDI dengan demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosialnya.

Asas ciri partai dipandang sebagai sumber polarisasi yang akhirnya dapat menimbulkan keresahan karena adanya fanatisme golongan. Sebab solidaritas kelompok sangat kuat maka fanatisme golongan menimbulkan sikap-sikap ekstrim terhadap golongan lain yang tidak seaspirasi. Penyeragaman asas menurut Soeharto dimaksud untuk mengurangi fanatisme golongan secara sempit agar terwujud stabilitas politik, dalam rangka pembangunan bangsa. Kenapa harus Pancasila yang harus diutamakan? Oleh karena Pancasila adalah jiwa dari bangsa Indonesia. Karena itu, setiap usaha merenggutnya dari bangsa ini akan mendapat perlawanan yang hebat dan berakhir dengan kegagalan.⁸⁸⁾ Sebab itu konsekwensi moral kita harus menerimanya sebagai aturan main. Dalam peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1967 di Jakarta ia berkata:

“Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa maka ia terima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam rumusan yang agak berbeda namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 45 dalam mukadimah konstitusi RIS dan dalam mukadimah UUDS RI (1950), Pancasila itu tetap tercantum didalamnya”.

Terhadap penetapan Pancasila sebagai dasar negara, pemikiran Soeharto demikian:

“Kebulatan sila-sila didalam Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi dan keadilan sosial, semuanya itu telah merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadian bangsa kita. Pancasila menyatukan semua lapisan dan golongan masyarakat bukan saja tidak ada golongan yang dirugikan, malahan semua gabungan terjamin dalam Pancasila itu. Makin jauh kita berjalan, makin kuat keyakinan kita akan kebenaran Pancasila itu, makin banyak ujian zaman, makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”.⁸⁹⁾

Oleh sebab itu sebagai suatu ideologi, Pancasila mempunyai kekhasan tersendiri. Kekhasan itu berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan sehubungan dengan posisinya sebagai sari dari pandangan hidup bangsa kita. Kekhasan yang pertama, sebagaimana tercermin dalam sila kesatu, mengandung arti bahwa kita percaya akan adanya Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Seperti dia katakan demikian dalam bahasa Jawa:

“Pangeran iku siji, ana ing ngendi paran, langgeng, sing nganaake jagad iki saisinem dadi sesomahane wong sak alam kabeh nganggo carane dewe-dewe. Pangeran iku kuwoso tanpo piranti, akaryo alam saisine, kang katon lan ora kasat mata”.⁹⁰⁾

Kekhasan kedua ialah penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya, sebagai umat manusia kita sama dihadapan Tuhan. Hal ini sesuai dengan sila kedua. Yang berarti adil adalah perlakuan yang sama terhadap sesama manusia dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Perlakuan ini harus menghargai hak-hak asasi manusia, seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian harmoni antara hak dan kewajiban adalah penjelmaan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kenyataan tersebut Soeharto melihat pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia tidak menghendaki penindasan manusia oleh manusia lain baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Baik oleh bangsa sendiri atau bangsa lain. Atas dasar prinsip ini pula maka kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan

pri keadilan. Sebab itu pula kita menolak rasialisme, sebab keinginan kita adalah kebahagiaan individu yang dicapai dengan tidak merugikan orang lain, melainkan kebahagiaan yang adil.⁹¹⁾

Ciri khas yang ketiga bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerja sama yang harmonis, yang melampaui kepentingan diri sendiri, namun itu tidak berarti bahwa kehidupan pribadi diingkari sebagai umat ciptaanNya. Kehidupan pribadi juga ada tempatnya tersendiri. Atau berarti bahwa hakikat sila ketiga ini mengandung prinsip nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dalam abad modern ini. Sebab tanpa perasaan nasionalisme suatu bangsa akan hancur dan terpecah belah dari dalam. Nasionalisme Pancasila mengharuskan kita menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit.⁹²⁾ Pijakan pemikiran itu juga dipertegas bahwa rasa kebangsaan itu perlu sebagai wujud kesatria sebuah negara. Lebih jauh Soeharto berkata:

“Bangsa iku minangka sarana kuwating negara mulo aja nglirwaake kebangsaniro pribadi, supaya kanugragan bangsa kang handaro atau dalam terjemahannya bangsa itu sebagai sarana untuk kuatnya suatu negara, oleh karena itu jangan mengabaikan rasa kebangsaan sendiri agar memiliki bangsa yang berjiwa kesatria”.⁹³⁾

Lebih daripada itu ambisinya untuk mengaktualisasikan kebijaksanaan pembaharuan juga berangkat dari konteks pemikiran yang demikian ini, khusus untuk menciptakan suatu integrasi nasional yang kokoh antara suku dan ras. Serta menjembatani kesenjangan ekonomi antara WNI Cina dan pribumi. Kejadian menjelang perayaan HUT Kemerdekaan 17 Agustus '73 misalnya, klimaks keprihatinan terhadap masalah ras semacam ini. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dasar utama terwujud integrasi dalam masyarakat adalah adanya kebulatan keyakinan mengenai nilai-nilai bersama yang dianggap luhur dan persamaan harapan mengenai masa depan. Persamaan harapan mengenai masa depan harus dipupuk makin kuat, melalui pembangunan diberbagai bidang khususnya pembangunan ekonomi. Sebab apabila berhasil dalam menciptakan integrasi dengan berbagai usaha tadi, maka sekaligus akan terciptalah ketahanan nasional dalam bidang-bidang

ideologi, politik, ekonomi dan Sosbud⁹⁴), Tentang masalah Cina tersebut dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan isu pribumi dan non pribumi yang dipermukaannya tampak sebagai masalah ekonomi namun sebenarnya mengandung permasalahan yang kompleks antara lain menyangkut integrasi bangsa tadi.

Menyangkut sila keempat tidak lain yang dimaksud adalah demokrasi. Demokrasi arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berarti bahwa tindakan bersama diambil sesudah ada keputusan bersama.⁹⁵ Aktualisasi demokrasi ini termanifestasi dalam bentuk demokrasi Pancasila yang mana berintikan kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lain. Hal ini juga berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan menurut keyakinan agama masing-masing haruslah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, dan haruslah dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong royong.⁹⁶ Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ini, kita mementingkan musyawarah. Musyawarah itu tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas atau minoritas melainkan yang dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri. Lebih jauh Soeharto mengatakan:

“Demokrasi Pancasila bukan ditentukan oleh kemenangan jumlah suara, bukan ditentukan oleh paksaan kekuatan, melainkan kebulatan mufakat yang dikedepankan sebagai hasil hikmah kebijaksanaan. Tak satupun golongan boleh apriori mempertahankan atau memaksakan kehendak atau pendirinya. Jelas didalamnya menolak diktator klas, diktator perseorangan, diktator golongan maupun diktator militer. Jelas didalamnya menolak liberalisasi, menolak diktator mayoritas terhadap minoritet”.⁹⁷

Sementara sila keadilan sosial mengandung arti bahwa keadilan dan kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau. Sistem pemerintahan yang kita anutpun bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Sebab itu keadilan sosial juga menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat, bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh

kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial juga tidak berarti yang lemah boleh tidak kerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenangan dari yang kuat dan mengayomi adanya keadilan⁹⁸).

Menyikapi tekad di atas tak ada jalan lain selain bekerja keras memberantas kemiskinan. Lebih jauh dia mengatakan:

“Kita harus memberantas kemiskinan itu langsung dari sumber dan akar-akarnya baik kemiskinan lahir maupun kemiskinan rohani. Dan satu-satunya jalan untuk itu adalah dengan melaksanakan pembangunan yang dapat memberi kesempatan bekerja pada setiap orang. Pembangunan yang mampu memberikan perluasan lapangan pekerjaan, pembangunan yang dapat menaikkan penghasilan semua orang, juga pembangunan yang mencerminkan keadilan sosial dan meninggikan martabat manusia”⁹⁹)

Apa yang harus dipenuhi jikalau pembangunan/pemberantasan kemiskinan itu dilaksanakan? Paling tidak ada dua prasyarat yang mutlak harus dipenuhi. Antara lain menurut Soeharto dalam pidato kenegaraan Agustus 1974 adalah *pertama*, adanya kemauan yang sungguh dan tekad bulat yang tak tergoyahkan dari seluruh bangsa untuk melaksanakan pembangunan itu. Segala pikiran dan usaha harus dipusatkan dan dicurahkan untuk berhasilnya pembangunan itu. Seluruh bangsa ini harus meningkatkan diri secara utuh kepada pelaksanaan pembangunan itu karena kemauan dan tekad membangun itu bukan sekedar slogan politik maka rencana pembangunan itu harus masuk akal, dan ditilik dari perhitungan ekonomi rencana pembangunan itu harus mungkin dilaksanakan dan secara sosial mendapat dukungan yang tidak mendua dari seluruh rakyat. *Kedua*, adanya stabilitas nasional yang mantab, baik stabilitas politik, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi. Orang tidak mungkin melaksanakan pembangunan, apabila tak dapat tenang memusatkan pikiran dan kemampuannya untuk pembangunan, karena selalu diganggu oleh keadaan yang goncang dan tidak menentu, apabila ia selalu disibuki dengan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi keriuhan dan pergolakan yang tak kunjung henti.

Selanjutnya obsesinya terhadap cita-cita membangun masyarakat moderen yang berkepribadian khas Indonesia adalah keinginan Soeharto yang utama. Di depan musyawarah Nasional I Golkar tahun 1973 dia berkata:

“Masyarakat modern yang kita cita-citakan haruslah tetap berjiwa dan berwajah Indonesia juga. Tanpa jiwa Indonesia kita akan merasa asing dan dalam masyarakat kita sendiri, mungkin kita akan merasa asing terhadap diri kita sendiri. Dan ini akan membuat kita rapuh, barangkali akhirnya akan runtuh. Dan itu bukanlah cita-cita dan tujuan kemerdekaan nasional”.

Penekanan terhadap tekad pembangunan masyarakat modern tersebut harus bisa diselaraskan dengan Pancasila yang di cita-citakan. Atas asumsi dasar yang demikian itulah perlu ditemukan sebuah formulasi yang relecvan dan jelas. Sebab itu kemudia muncul rumusan yang sederhana tentang masyarakat berasaskan kekeluargaan dan religius. Ikwal istilah itu sebetulnya produk orde lama yang berasal dari gagasan Bung Karno sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Pak Harto demikian:

“Pada waktu Bung Karno menjelaskan revolusi Indonesia, Pancasila dan sebagainya, saya mengajukan pertanyaan pada Bung Karno, ‘Masyarakat Pancasila itu masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang sosialis, masyarakat yang religius atau masyarakat yang kapitalis, liberalis? Bagaimana? Bung Karno menjawab, “Bukan”. Tetapi masyarakat yang sosialis religius. Masyarakat Pancasila adalah masyarakat sosialis religius”.¹⁰⁰⁾

Lantas pernyataan selanjutnya, sebetulnya apakah yang dimaksud masyarakat Pancasila sosialis religius tersebut? Masyarakat Pancasila Sosialis religius bukanlah masyarakat religius sosialis, sebab dalam pengertian religius sebetulnya sudah mengandung hakekat sosialisme yakni memberikan bantuan pelayanan kepada sesama. Dan ini sudah barang tentu diajarkan oleh agama, sementara bangsa kita adalah bangsa yang percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebaliknya sosialisme belum tentu percaya pada Tuhan.¹⁰¹⁾ Secara lebih terformulasi cita-cita pokok tentang masyarakat Pancasila sosialis religius pernah juga dikemukakan dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1975, antara lain Soeharto menjelaskan, masyarakat Pancasila adalah

masyarakat yang sosialis religius dengan ciri antara lain; **pertama**, tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme dan imperialism karenanya harus bersama-sama dihapuskan dari yang kedua menghayati hidupnya dengan kewajiban, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada tanah air, sayang pada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena Pancasila menetapkan dua sifat individu dan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan, monodualistis sifatnya, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selalu ada segi keseimbangan. Selalu ada keserasian antara kebersamaan dan individu dan jiwa serta semangat sosialis religius itu bisa dikendalikan. Pandangan ini menurut Soeharto, harus terdapat di mana-mana, disemua kehidupan Indonesia, kalau kita konskwen mengakui bahwa Tuhan menciptakan manusia.

B. Soeharto dan Demokrasi

Pertama kali demokrasi modern masuk ke negeri kita sebagai input kultural, ia masuk sebagai nilai dalam sub kultur perjuangan nasional, dan sejak semula telah menimbulkan persoalan yang rumit dalam mencari perpaduannya dengan nilai-nilai kerakyatan yang hidup dalam masyarakat kita. Demokrasi harus di Indonesiakan, dan ini agaknya yang masih merupakan beban berat dalam pemikiran politik kita, hingga kita sering menilai kegagalan suatu sistem politik sebagai bersumber pada penerapan konsepsi yang keliru. Yang tidak khas Indonesia. Demikianlah misalnya kegagalan sistem politik dalam menjawab tantangan keadaan tahun 50-an sering dianggap sebagai bukti dari penerapan demokrasi yang kebarat-baratan yang liberal. Ketika kemudian konsepsi baru yang memasukkan unsur “terpimpin” dalam demokrasi gagal juga kitapun mencoba merumuskan konsepsi pengganti yang lebih murni, lebih mencerminkan Pancasila.

Dan agaknya begitulah beberapa pengalaman empiris yang pernah menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia bertahun-tahun sebelum aksi G 30 S/PKI menjadikan kita semakin hati-hati dan waspada dalam menjatuhkan pilihan yang tepat terhadap suatu format sistem politik. Tentu dari pertarungan demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia

inilah yang demokrasi yang bercirikan secara khusus kepribadian bangsa Indonesia. Pengejawantahan kepribadian tersebut telah terformulasi dalam Pancasila. Dari situlah yang kemudian dijadikan titik tolak lahirnya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam pemikiran Soeharto, sebelumnya jugalah merupakan pengkristalisasi terhadap ide dasar yang telah ada dalam UUD 1945. Lebih jauh ia menegaskan:

“Demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam UUD 1945. Demokrasi Pancasila berarti, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong royong”.¹⁰²⁾

Terlebih lagi penghayatan terhadap nilai-nilai kultur Jawanya yang senantiasa melihat setiap persoalan yang dalam konteks pemahaman mikrokosmos sebagai bagian dari alam (makrokosmos) semakin memperkokoh visinya, bahwa setiap bentuk persoalan harus diselesaikan lewat pendekatan keharmonisan dalam rangka lahirnya sebuah konsensus. Itulah sebabnya sebuah upaya mufakat dalam musyawarah senantiasa menjadi titik tekan yang paling menonjol dalam operasionalisasi demokrasi Pancasila. Asas kekeluargaan menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat modern baik dalam lapangan politik, ekonomi maupun sosial. Sebaliknya jikalau tanpa asas kekeluargaan perjuangan hidup dalam masyarakat modern acapkali membuat manusia berhadapan dengan manusia, bangsa berhadapan dengan bangsa dalam suatu persaingan dan pertarungan yang malahan memerosotkan derajat manusia sendiri. Dalam asas ini terletak jaminan keselarasan perorangan dan kepentingan masyarakat. Di dalamnya juga dapat dicegah penindasan melalui saluran ekonomi maupun lewat jalan politik. Di dalamnya juga terkandung sikap dasar bahwa kepentingan dan keselamatan bersama yang didahulukan, bukan kepentingan

kelompoknya sendiri, walaupun kelompok itu besar. Kelompok yang besar maupun kecil pada akhirnya dan secara sadar menundukkan diri pada kepentingan bersama yang diambil setelah bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Karena Pancasila menempatkan keselarasan antara perorangan dan masyarakat lingkungannya, maka harus dapat berkembang penghargaan terhadap hak-hak pribadi dengan segala kesempatan untuk mengembangkan kepribadian dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, namun sekaligus dengan penuh kesadaran ditundukkan secara sukarela kepada kepentingan umum.

Oleh karena itu konsepsi demokrasi Pancasila menurut Soeharto¹⁰³⁾ bukanlah ditentukan oleh kemenangan jumlah suara, bukan ditentukan oleh paksaan kekuatan melainkan kebulatan mufakat yang dikedepankan sebagai hasil hikmah kebijaksanaan. Di sini jelas bahwa tidak memperbolehkan satu golongan a priori mempertahankan atau memaksakan kehendak atau pendirinya. Sudah barang tentu didalamnya juga menolak bentuk kediktatoran baik itu dictator perorangan, dictator militer, dictator klas, jelas semuanya pasti menolak liberalisme, menolak dictator mayoritas terhadap minoritas. Kendati demikian tidak berarti prinsip demokrasi Pancasila memiliki kelemahan dalam mekanisme pengambilan keputusan apabila seluruh kepentingan rakyat didahulukan dan diutamakan serta menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran sebagai ukuran maka kebulatan mufakat pastilah terjadi.

Bertolak dari obsesi situasi politik yang demikianlah kenapa pemilu 1971 juga masih memberi kelonggaran dan peluang yang banyak terhadap keterlibatan partai-partai politik untuk turut andil dalam pengambilan keputusan. Sepuluh partai politik tersebut diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara musyawarah namun kenyataan justru sebaliknya. Setelah terpasang selalu enam belas tahun pemerintahan tanpa pemilu seakan-akan momentum pemilu 5 Juni 1971 dijadikan pengulangan adu kebenaran ideologis sebagaimana terjadi tahun 1955. Kekhawatiran terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi dikemudian hari inilah yang agaknya telah terantisipasi oleh Soeharto, agar partai yang ada disederhanakan saja (gagasan di Pasar Klewer-Solo). Gagasan itupun akhirnya menjadi produk pembangunan politik yang paling menonjol bagi Soeharto guna semakin meneguhkan kiatnya membangun orde demokrasi Pancasila dalam masa orba. Sebab dengan perampingan

eksistensi partai-partai politik dari sepuluh menjadi tiga tersebut akan mudah ditemukan cara-cara serta mekanisme yang terbaik menggiring keluar setiap kemelut yang berkepanjangan. Melalui musyawarah maka semua pihak yang berkompeten diberi hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, dengan tentu berpedoman bahwa hasil musyawarah tersebut jangan sekali-kali diingkari.

Dalam konsepsi demokrasi Pancasila menurut Soeharto memang tidak memberi ruang dan tempat terhadap kehadiran oposisi sebagaimana dikenal di Barat. Lebih lanjut Soeharto menegaskan:

“Memang kehidupan demokrasi Pancasila tidak mengenal golongan oposisi seperti dikenal sistem demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila hanya mengenal musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan-perwakilan baik di DPR maupun MPR. Sekalipun demikian demokrasi Pancasila tetap menjunjung tinggi hak-hak demokrasi seseorang warga negara yang penggunaannya harus tetap diabdikan kepada kepentingan yang lebih luas kepada masyarakat, kepada rakyat dan negara”.¹⁰⁴⁾

Apa yang kemudian muncul pada tahun 1980 yang menyebut dirinya sebagai kelompok petisi 50, dianggapnya sebagai hal yang inkonstitusional. Bahkan Soeharto mengecam itu sebagai orang-orang yang rumangso bisa nanging ora bisa romangso. Mengira pendapat orang lain tidak benar sehingga keluar pendapatnya itu salah. Sampai-sampai apa yang telah kita usulkan lewat orde baru itu, dengan kekuatan sosial politik telah menyimpang dari UUD 1945 dan Pancasila. Itulah namanya rumangsa biso nanging ora biso. Merasa mengerti tetapi pada dasarnya tidak mengerti Pancasila dan UUD 1945.

Walaupun demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi, namun hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kebebasan. Selanjutnya Soeharto menjelaskan:

“Sesuai dengan ajaran Pancasila, kebebasan perlu dikembangkan bukan saja karena masyarakat Indonesia Adalah masyarakat yang demokratis tetapi kebebasan itu diperlukan untuk melahirkan kreatifitas dan kritik itu harus benar-benar tertuju untuk menyelamatkan pembangunan itu sendiri”.¹⁰⁵⁾

Oposisi dalam pengertian sebagai pihak pengkritik ini baginya boleh-boleh saja asal dengan syarat ia adalah oposisi yang loyal.¹⁰⁶⁾

Tapi terhadap apa yang menyebutnya kelompok petisi 50 sangat tidak ia sukai karena apa yang diperbuat hanya mengkritik saja mau menang sendiri. Dalam demokrasi Pancasila tetap ada tempat yang terhormat bagi hak untuk menyampaikan pendapat dan berbeda pendapat. Akan tetapi juga mendapat tempat yang sama terhormatnya bagi tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah memelihara keselamatan bangsa melaksanakan pembangunan untuk menikmati hari esok yang lebih baik. Perbedaan pendapat boleh beradu dengan alasan bukan berada dengan kekuatan. Oleh sebab itu, melanjutkan gagasan di pasar Klewer, untuk menyederhanakan partai tidak lain sebagai buntut bahwa penggunaan kekerasan fisik menjadi trade mark rakyat yang punya orientasi ideologis yang berbeda tersebut. Kebijakan 1973 menciutkan 10 partai menjadi tiga partai saja tidak lain juga dimaksudkan untuk itu. Kondisi ini sangat memungkinkan karena kekuasaan Soeharto mulai berangsur menguat ditopang mesin politik barunya yakni ABRI/TNI, Birokrasi dan Golkar begitu dominan. Di sisi lain konsolidasi partai-partai politik hasil fusi masih rapuh serta sangat mudah dikontrol oleh Soeharto.

Dengan kenyataan demikian tadi, janganlah kiranya menurut perspektif Soeharto ada sebagian rakyat yang senantiasa ingin mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan isu kurang relevanan demokrasi Pancasila dipraktikkan di Indonesia. Sebagaimana Soeharto tegaskan demikian:

“Karena itu jangan ada lagi diantara kita berlindung dibalik demokrasi untuk menimbulkan keonaran atau dengan dalih menegakkan kehidupan konstitusional tetapi bertujuan untuk merobak Pancasila dan UUD 45. Mengambil sikap atau berbuat demikian akan berarti mengkhianati dan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi itu sendiri”.¹⁰⁷⁾

Berdasarkan pada pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah dilindungi UU, itu berarti cara-cara lain yang menyimpang dari ketentuan UUD 45 tidak dapat diterima dan tidak dapat dibiarkan karena pasti akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat yang jelas tidak menguntungkan bagi usaha pembangunan. Lebih dari akibat-akibatnya di masa kini, pembangkangan terhadap konstitusi jelas

merupakan awal dari rangkaian kekalutan kehidupan kenegaraan kita di masa nanti. Apa yang terjadi pada tahun 1976 dengan salah satu contoh kongkritnya Sawito Kartowibowo melakukan aksi menentang kekuasaan Soeharto, bermuara pada dibuikannya tokoh ini selama 8 tahun penjara.

Menurut Soeharto dalam Munas I Golkar tahun 1973 dikatakan dalam sistem negara Pancasila kehidupan partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain jelas dijamin. Sebab eksistensi atau kehadiran mereka merupakan sesuatu kebutuhan yang mutlak sebagai wadah penyaluran aspirasi-aspirasi rakyat dan sarana pembinaan kesadaran politik masyarakat dan bernegara, kesadaran untuk mempertahankan dan melaksanakan pandangan hidup bangsa, kesadaran dan perbuatan untuk melaksanakan program-program nasional bersama. Oleh karena itu kesadaran politik bukan berarti fanatisme golongan. Dengan demikian partai politik bukan sekedar alat untuk memenangkan pemilihan umum bukan sekedar alat untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan.¹⁰⁹⁾

Sebab itu pemilihan umum sebagai elemen fundamental sebuah negara bersistem demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum tidak boleh diartikan sebagai sebuah tujuan melainkan alat untuk menyehatkan kehidupan demokrasi. Betapapun Pemilu bukan satu-satunya piranti untuk menyehatkan demokrasi, namun pemilu harus dijadikan sarana yang penting untuk mewujudkan keyakinan hati nurani rakyat. Sebab dengan cara itu rakyat secara langsung bisa memilih wakil-wakil mereka setiap lima tahun sekali.

Menanggapi kritikan terhadap cara-cara Soeharto memperlambat obsesi penyehatan demokrasi dengan lebih banyak menggunakan pendekatan security demi memantapkan stabilitas nasional perlu ada perombakan struktural politik. Selanjutnya dikatakan oleh Soeharto:

Tetapi merombak struktural politik dengan lebih-lebih dengan membubarkan partai-partai politik jelas tidak akan kita tempuh. Tindakan demikian apapun alasannya, bukan langkah yang baik bahkan dapat merupakan benih-benih tumbuhnya diktatur”.¹¹⁰⁾

Kesadaran politik adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengadakan penataan kehidupan sosial politik. Tujuan penataan tersebut adalah untuk tumbuhnya kehidupan demokrasi yang sehat

dan berkembangnya kehidupan konstitusional yang kuat. Indikator tumbuhnya kesadaran politik yang sehat adalah semakin luas keikutsertaan rakyat dan makin tebalnya rasa tanggung jawab bersama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah nasional. Atas dasar asumsi yang demikian inilah partai-partai politik harus bisa berdiri kokoh. Penataan kembali kehidupan sosial politik bukan hanya berarti pembaharuan struktur, akan tetapi juga berarti pembaharuan sikap mental dan orientasi, sikap dan orientasi pembangunan nasional. Sebab itu setiap partai politik dan kekuatan sosial politik lainnya harus mempunyai semangat dan orientasi yang baru yang cocok bagi pembangunan bangsa kita.

Kenyataan seperti diatas itulah yang akhirnya menstimulir akan sebuah keharusan sejarah agar bisa mempersamakan persepsi, seluruh parpoldan Golkar dalam melihat perspektif nilai-nilai ideologis. Kelahiran UU No.3/1985 merupakan wujud kongkrit akan kuatnya obsesi Soeharto membangun sebuah tatanan kehidupan kepartaian dengan metode melenyapkan sebisa mungkin peluang lahirnya bentuk-bentuk perselisihan-perselisihan dan pertikaian-pertikaian yang hanya mempersoalkan garis anutan paham semata. Dengan penyeragaman Pancasila sebagai satu-satunya asas sudah merupakan bukti yang amat mommental betapa Soeharto berusaha keras mengeliminir setiap peluang yang ada guna terulang tragnosis pemilu 1955 dan 1971. Banyak partai dan garis ideologis yang dipegang memang tidak menjanjikan suatu iklim kenyamanan nasional oleh sebab frekwensi gangguan-gangguan stabilitas tak pernah kunjung reda. Akibat kehilangan ikatan emosional partai politik dengan massa pendukungnya tersebut bermuara pada semakin tandusnya mereka memperoleh legitimasi terhadap setiap program yang ditawarkan dalam setiap pemilunya. Tidak heran jikalau rekayasa kondisi ini cuma menguntungkan Golkar semata dan semakin memperteguh posisi Soeharto menindiskan pijakannya.

Sementara itu berkaitan dengan mekanisme demokrasi Pancasila, sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa, kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu, bersidang lima tahun sekali dan bertugas membuat GBHN serta memilih presiden dan wakil presiden untuk jangka waktu lima tahun dan presiden adalah

pelaksana GBHN tersebut, adalah hal-hal penting yang amat konsisten dipegang oleh Soeharto.

Selanjutnya dalam implementasi demokrasi Pancasila ini perlu juga ditinjau bagaimana Soeharto menempatkan militer Indonesia atau ABRI lahir dalam revolusi kemerdekaan, revolusi nasional. Ia merupakan perwujudan spontan dari semangat juang yang berkobar dalam dada para pemuda yang mengangkat senjata melawan setiap usaha yang hendak menggagalkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. ABRI bukan kelanjutan tentara kolonial Belanda (KNIL–Koninklihk Nederlands Indonessch Leger) maupun dari organisasi militer dan para militer yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang selama perang pasifik. Ia tidak dibentuk dari atas, tetapi lahir dari massa rakyat, massa pejuang yang militant secara spontan (*leeve en masse*). Ia mewujudkan suatu bangsa bersenjata (*nation in arms*). Para anggotanya berasal dari beragam lapisan dan golongan masyarakat. Namun secara serentak mampu membela dirinya sebagai suatu kebulatan yang berkepribadian yang utuh sehingga melahirkan visi yang sama dalam memandang dirinya, sebagai kekuatan bangsa yang ikut mendukung dan berjuang dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan. Bukan semata-mata sebagai alat negara. Kenyataan itulah yang menjadi landasan kerohanian dan landasan sejarah yang melahirkan dwifungsi sebagai alat Hankam dan berfungsi sebagai alat Sospol, merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai 45, sebab itu ia sebenarnya, ia sudah lama ada seiring dengan keberadaan negeri ini pula. Sebagaimana dinyatakan oleh Soeharto demikian:

“Peranan ABRI (sebelum diubah dengan TNI, pen.) sebagai alat pertahanan–keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik itu telah dilaksanakan sejak semula, jauh sebelum dikenal dwifungsi”.¹¹¹⁾

Oleh sebab itu bila ada yang mengkritik bahwa dwifungsi ABRI atau istilah saat ini TNI itu selekasnya dikurangi, agar tidak berlangsung lama karena nanti akan menjurus kepada pemerintahan dictator Soeharto berpendapat, bahwa pemikiran tersebut Cuma timbul oleh karena adanya sejarah bangsa dan ikwal kelahiran ABRI. Serta kurang disadarinya kebutuhan dan kepentingan bangsa dimasa depan dan terlebih lebih tidak berpijak pada kepribadian nasional sendiri.

Adanya kenyataan saat itu bahwa dwifungsi ABRI telah diterima menjadi sistem tersendiri dalam kerangka ketatanegaraan dan kehidupan politik bangsa, yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan landasan falsafah Pancasila di UUD '45. Serta diperkokoh secara yuridisial oleh MPR dengan ketetapan MPR IV/MPR/1978 dan UU No.20 th. 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, khususnya pasal 26, 27 dan 28. Ayat 1 dari pasal 28 menegaskan peranan sosial politik angkatan bersenjata sebagai dinamisator dan stabilisator, jelas sudah semakin melemaskan pendapat-pendapat yang mengkonfrontir apa yang disebut dwifungsi tersebut.

Sebab menurut Soeharto¹¹²⁾ mengusahakan hilangnya dwifungsi akan berarti diperlemahnya ketahanan nasional karena akan mengurangi sinkronisasi usaha dibidang ini, terutama ketahanan dibidang politik dan Hankam. Bahkan tidak mustahil jikalau ABRI dipaksakan untuk meninggalkan dwifungsi dan menjadikannya hanya sebagai kekuatan Hankam seperti di negara-negara lain, tidaklah mungkin cepat atau lambat, ABRI akan terasing dari soal-soal perjuangan bangsa dan akan mendorong ABRI akan melahirkan diktator militer.

Sebab itu strategi dasar dalam pemikiran Soeharto dengan orbanya adalah membangun stabilitas dan konsolidasi melalui institusionalisasi dan konstitusionalisasi. Memang benar dalam mempraktikkan strategi diatas acapkali menggunakan titik tekan keamanan (*security*). Alasan dasarnya adalah karena kehidupan bernegara dan bermasyarakat selama orla sudah begitu rancu-nya, sehingga tidak ada alternatif yang tersedia untuk menanganinya, taruhannya terlalu besar untuk ditangani secara lembut dan pelan. Tetapi untuk selanjutnya cara pendekatan dalam memelihara dan meningkatkan stabilitas itu menjadi yang dinamis, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah dan akan terus berubah dengan cepatnya, baik dalam lingkungan domestik maupun internasional.

Tekanan-tekanan yang diakibatkan pada sistem sosial akan menimbulkan disfunction (salah fungsi) pada berbagai sub struktur sistem sosial itu, yang dapat meledak menjadi kekalutan, bahkan revolusi, apabila sistem sosial itu tidak mampu mengkorelasikan disfunction tersebut. Kekalutan terjadi oleh karena pihak yang berkuasa

tidak tanggap terhadap adanya perubahan dan tekanan itu, atau bahkan menentanginya. Keamanan dan stabilitas pada kemampuannya mengenal dan mengadakan pembaharuan-pembaharuan bukan pada kekekalan memelihara status quo.

C. Soeharto dan Ekonomi

Pemikiran strategi Soeharto dalam bidang pembangunan ekonomi Orde Baru-nya, memang lebih banyak mengutamakan pertumbuhan dari pada pemerataan, serta berorientasi keluar ketimbang ke dalam, telah mendatangkan hasil yang nyata yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6% per tahun. Dengan pertumbuhan sebesar itu, menurut penilaian Bank Dunia (*World Bank*) maka pada akhir tahun 2000, pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 1000 dollar AS per tahun atau naik 20 kali lipat dari pendapatan per kapita tahun 1967 yang sebesar 50 dollar AS.¹¹³⁾ Dengan pendapatan GNP sebesar itu berarti Indonesia akan melepaskan diri dari status negara miskin berpenghasilan rendah menuju negara sedang berpendapatan menengah di dunia ini.

Jika dikontekstualisasikan dengan perkembangan hingga tahun 2010 misalnya, menurut laporan Bank Dunia jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 7 juta per tahunnya. Kelas menengah mencapai angka 75 juta dan diestimasikan tahun 2020 dan 2030 akibat bonus demografi mencapai dua kali lipatnya. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2016 tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp47,96 juta per kapita per tahun. Angka ini mengalami kenaikan dari sisi pendapatan per kapita per tahun dari tahun 2015 sebesar Rp45,14 juta dan pada tahun 2014 Rp41,92 juta. Jika dikonversi ke nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), pendapatan per kapita per tahun Indonesia sebesar US\$ 3.605,06. (Detik.com 06 Februari 2017). Betapa lompatan pendapatan ini sangat luar biasa jika dibanding saat Soeharto mulai memerintah tahun 1967 yang hanya US\$ 50.

Mengutip riset IMF, posisi perekonomian Indonesia tahun 2016 berada di peringkat 8 dengan total produk domestik bruto (GDP) US\$ 3028 miliar. Bahkan menurut proyeksi, *PricewaterhouseCoopers* (PwC) jika perekonomian dunia baik dan tetap stabil maka di tahun 2030 & 2050. Indonesia berada di peringkat 5 di tahun 2030 dengan estimasi nilai GDP US\$5.424 miliar dan naik menjadi di peringkat 4 di tahun

2050 dengan estimasi nilai GDP US\$10.502 miliar berdasarkan nilai GDP dengan metode perhitungan *Purchasing Power Parity (PPP)*. Posisi tersebut akan menjadikan Indonesia dengan perekonomian *big emerging market* mengingat posisi Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terkuat di Asia Tenggara.

Kesuksesan itu pula yang mengangkat posisi Indonesia di antara negara-negara lain di dunia ini, memang harus diakui sebagai prestasi paling menonjol yang telah dilakukan oleh Soeharto dengan pemerintahan Orde Barunya. Namun prestasi yang gemilang tersebut menuntut begitu banyak biaya. Antara lain pertama, bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari strategi pertumbuhan adalah semakin lebarnya kesenjangan sosial ekonomi yang telah ada karena dalam strategi ini aspek pemerataan kurang memperoleh perhatian yang layak. Belum lagi dengan kuatnya dukungan peranan birokrasi, menyebabkan segala potensi ekonomi masyarakat terserap ke dalamnya. Implikasinya adalah timbulnya tawar menawar dalam birokrasi. Pihak-pihak yang memiliki posisi bargaining yang kuat atau yang kepentingannya identik dengan kepentingan birokrasi tentu akan memperoleh berbagai fasilitas yang sangat berguna dalam pengembangan bisnisnya. Sementara pihak-pihak yang posisi tawar menawarnya lemah atau bahkan tak memiliki kekuatan sama sekali cenderung tersingkir dari arena ekonomi nasional pada tingkat atas, atau terhempas dari arena lokal pada tingkat bawah. Dengan demikian, strategi pertumbuhan yang disertai dengan gejala birokratisasi telah menciptakan lapisan elite yang relatif kuat secara sosial, ekonomi dan untuk golongan-golongan tertentu juga secara politik disatu pihak sementara dilain pihak terbentang lapisan massa yang tak berdaya.

Sedang biaya kedua dan ini terutama sangat dirasakan dalam beberapa tahun terakhir ini sehubungan dengan adanya resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan serta terus menerus merosotnya harga minyak bumi dipasaran internasional adalah semakin meningkatnya tingkat ketergantungan ekonomi nasional terhadap perkembangan ekonomi internasional. Hal ini merupakan kosekwensi logis dari strategi pembangunan nasional yang sangat berorientasi keluar, di mana ekonomi nasional di integrasikan ke dalam struktur global.

Menghadapi dua masalah ini antisipasi Soeharto adalah dengan mengambil beberapa kebijakan. Dua diantaranya yang sangat populer adalah debirokratisasi dan deregulasi. Kebijakan yang pertama merupakan pengurangan campuran tangan aparat birokrasi dalam pengelolaan dunia usaha terutama BUMN. Sedangkan kebijaksanaan deregulasi adalah dengan pelonggaran peraturan-peraturan yang ada dan dengan demikian diharapkan dunia usaha yang tengah lesu ini terpacu kembali sehingga pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai bisa dipertahankan. Selain itu diharapkan pula bahwa dengan adanya dua kebijakan itu tidak akan ada diskriminasi lagi dalam pemberian kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada. Hal inilah yang sering dikatakan sebagai titik-titik terang adanya perhatian terhadap aspek pemerataan.

Sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini dipilihnya strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar tidak lain adalah untuk secepat mungkin memulihkan kerusakan ekonomi warisan orde lama. Disamping itu, diperlukan legitimasi dari masyarakat untuk memegang komando pemerintahan kendati dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki khususnya kelangkaan sumber dana, maka dibutuhkan strategi yang bisa dengan cepat menstabilkan situasi sosial politik yang pada gilirannya mengharap dukungan investasi dari luar serta merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif rakyat. Pembangunan ekonomi dari Repelita ke Repelita menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang cepat dan ditandai dengan dikeluarkan UU PMA tahun 1967 dan modal dalam negeri dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1968, termasuk ketentuan penting tentang pemutihan modal.

Program ini tampaknya juga ditopang oleh IGGI serta mendapat dukungan dari IMF dan IBRD. Ringkasannya, model pembangunan yang dimodali ini, didukung oleh suatu koalisi yang terdiri dari para perencana (teknokrat) yang kemudian dikenal dengan mafia Berkeley (Widjodjo cs lulusan Berkeley University), penyedia dana (penanam modal besar lokal dan internasional serta pemberi bantuan asing) dan penjaga ketertiban, keamanan nasional dan pembangunan ekonomi. Sebagai syarat yang diminta para pemberi modal adalah adanya stabilitas politik. Ini dapat diartikan, untuk menghindari tuntutan-tuntutan yang

sifatnya kontemporer maka pemerintah harus menekan partisipasi politik masyarakat demi lancarnya modal asing atau swasta beroperasi dalam derap langkah pembangunan. Dari sisi lain Soeharto dengan pemerintahannya, tampaknya memang menghadapi dilema dalam pilihan politiknya. Disatu pihak, ketidakmungkinan untuk membuka partisipasi politik masyarakat yang tentu tidak dikehendaki para pemberi modal. Sementara dilain pihak, mereka juga sadar bahwa tidak bisa hanya bergantung pada cara-cara represif saja, tetapi juga diperlukan legitimasi politik yakni berwujud penerimaan dan pengakuan rakyat atas hak memerintah. Ini diperlukan demi mempertahankan citra demokrasi dan menghindari tuduhan militarism, di tengah-tengah proses pembangunan yang membutuhkan efisiensi dan sentralisasi penggunaan dan penguasaan sumber-sumber.

Apabila diamati, nampak sekali pemerintahan Soeharto ingin menggunakan kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi fungsional sebagai satu-satunya wadah untuk menghubungkan negara dan masyarakat. Kelompok kooperatis ini yang menonjol pada era Orde Baru antara lain, SPSI untuk buruh/pekerja. HNSI untuk para nelayan, HKTI untuk para petani, KNPI untuk pemuda dan Korpri untuk wadah tunggal pegawai negeri. Sementara Kadin dan HIPMI untuk kepentingan para pengusaha. Sepintas, mungkin dapat dikatakan bahwa strategi tersebut lebih memperlihatkan sisi demokrasi dibandingkan praktik pemerintahan yang dijalankan secara otoriter. Kebijakan-kebijakaan yang terlihat di depan publik kerap kali seolah-olah tampak lebih melayani kepentingan masyarakat. Tidak heran stabilitas politik dan fungsi pemerintah tampak solid dalam menyelenggarakan pembangunan. Namun secara kritis, terkooptasinya organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut juga mencerminkan semakin dominannya negara mencengkeram mereka agar tidak tumbuh sebagai kekuatan yang alternatif yang kritis.

Setidaknya ada dua hal yang paling menonjol dari strategi negara seperti ini. *Pertama*, besarnya peranan negara mengakibatkan kelompok-kelompok perwakilan kepentingan tidak merepresentasi kepentingan anggotanya, tetapi tidak lebih sebagai sarana negara untuk mengontrol dan mengendalikan tingkah laku anggota-anggota kelompok perwakilan kepentingan tersebut. *Kedua*, sebagai turunan konsekuensinya, kelompok-kelompok perwakilan kepentingan ini tidak lebih sebagai

corong program pembangunan ketimbang bertindak sebagai kanal aspirasi dari kelompok masyarakat yang diwakilinya.

Betapapun begitu harus diakui memang jikalau model pembangunan ekonomi yang dipilih Soeharto tersebut mampu menstabilkan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat seperti mengendalikan laju inflasi maupun mengurangi defisit neraca pembayaran. Namun dibalik pilar-pilar keberhasilan tersebut melahirkan masalah-masalah yang rawan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan pemerataan yang dirasakan rakyat banyak. Di lapangan sangat terasa meningkatnya kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa.

Tentu tidak salah bila strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan Soeharto tersebut, menyulut keresahan di banyak kalangan terdidik (*well educated*) yang memicu terjadinya ketegangan. Bahkan memacing isu sensitif pada area SARA terkait isu pribumi versus non pribumi, Peristiwa Malari 1974, yang semula hanya terkait masalah penolakan kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei ke Jakarta (14-17 Januari 1974) menemukan momentum dengan kedatangan Ketua *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan alasan untuk demonstrasi antimodal asing.

Trilogi Pembangunan Orde Baru, memang sangat menekankan aspek kemajuan ekonomi. Stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mendorong Soeharto selalu mengambil sikap represif bila ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu kendatipun sebatas demonstrasi yang merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi yang dipilih Soeharto.

Di lapisan pedesaan, modernisasi pertanian khususnya di bidang produksi padi (Bimas, Inmas) berlangsung dengan mengerahkan tenaga-tenaga penyuluh lapangan atau PPL. Mereka tidak saja sebagai pembimbing teknis, namun juga tenaga yang turut mengawal agar kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru sampai pada sasaran yang dituju. Pelaksanaan pembangunan yang dijalankan ini, harus diingat sangat dimungkinkan oleh adanya bonanza minyak (1974–1981). Penerimaan negara dari minyak luar biasa besar. Indonesia tercatat sebagai salah satu anggota OPEC. Harga minyak dunia yang mencapai puncaknya pada tahun 1980 dengan harga US\$35 per barrel jatuh pada tahun 1986 dari \$27 menjadi di bawah \$10

Pada saat itu, negara memperoleh dana pembangunan dari devisa ekspor minyak yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan Orde Baru. Bahkan TVRI sebagai media pemerintah, tepatnya mulai 1 April 1981 dilarang menyiarkan iklan. Pendapatan yang semula diperoleh TVRI lewat slot iklan yang populer disebut “Mana Suka Siaran Niaga” itu beralih ke pengelola tv swasta. Dan sejak itu pula TVRI harus pandai-pandai mengelola dana operasional yang berasal dari tiga sumber: APBN, iuran TV, dan 12,5% perolehan iklan tv swasta. Perkiraan penulis, mungkin pada saat itu keuangan negara masih kuat dan cukup untuk membiayai TVRI.

Meski dapat *blessing* minyak, strategi pembangunan ekonomi Soeharto tetap masih bertumpu pada hutang dan bagaimana mendatangkan modal asing. Akibatnya, hingga runtuhnya Soeharto dari kursi kekuasaan tgl 21 Mei 1998, Indonesia tetap terlilit hutang dan tidak mampu berdikari secara ekonomi.

Gambaran di atas semakin menegaskan bahwa era Soeharto selaku penguasa Orde Baru saat itu, walaupun seolah ingin mendemonstrasikan spirit nasionalisme dan egaliterisme tetapi pada pendaratan program kebijakan ekonominya belum dirasakan oleh seluruh rakyat. Korporatis negara yang hanya memberi kue yang besar kepada lingkaran kekuasaan terdekat, justru semakin membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat semu.

Merajalelah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semua mengarah ke perebutan akses ekonomi dan politik. Implementasi pembangunan ekonomi baik berupa Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahunan) dan Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahunan) kue terbesarnya sangat dinikmati para klientis yang dekat Soeharto, sementara rakyat yang jauh hanya merasakan remah-remah yang tersisa. Tidak heran kesan umum yang terjadi semasa Soeharto pembangunan sangat Jawa centris.

Mengapa strategi pembangunan ekonomi Soeharto tidak leluasa bergerak ke semua lini? Sekurangnya ini dapat dibaca melalui tiga ciri. *Pertama*, struktur kekuasaan negara hadir amat dominan, baik dalam perencanaan ekonomi maupun implementasinya. *Kedua*, rendahnya partisipasi politik masyarakat akibat depolitisasi yang mengkreasi tumbuh dan meluasnya *political party phoby*. *Ketiga*, strategi pembangunan

ekonomi yang hanya bertumpu pada minyak dan hutang luar negeri. Geliat agar berdikari secara ekonomi, sengaja tidak begitu kencang digaungkan agar investasi asing berbondong-bondong masuk dalam dalam skim FDI (*Foreign Direct Investment*) seperti pendirian industri PMA.

Namun, menjelang berakhirnya bonanza minyak tahun 1982, Soeharto mulai merasakan sekurangnya lima kendala pembangunan. *Pertama*, menurunnya kapabilitas negara dalam membiayai dan meneruskan laju pembangunan. Ini dikarenakan akibat resesi ekonomi dunia dan ambruknya harga minyak berkelanjutan. *Kedua*, lemahnya daya saing produk-produk industri Indonesia di pasaran internasional. Dari sisi domestik, akibat rendahnya kualitas, ketidakefisienan, monopoli, oligopoli serta subsidi yang berlebihan. Sementara dari sisi luar, semakin meningkatnya proteksi negara-negara maju terhadap produknya maupun masuknya barang dari luar. *Ketiga*, mata rantai perdagangan dan perizinan yang tidak rasional, lama dan boros (*high cost economy*). *Empat*, hutang dan bunga hutang luar negeri yang semakin membengkak. Dan *kelima*, masih lemahnya penerimaan negara dari pajak.

Inventarisasi kendala di atas hanya menyebut beberapa diantaranya. Publik pun terus mendesak agar dominasi peran negara dikurangi. Munculnya (1) kebijakan INPRES No.5 tahun 1985 yaitu meningkatkan ekspor nonmigas dan pengurangan ekonomi biaya tinggi, (2) Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM) 1986, yaitu mendorong sektor swasta di bidang ekspor dan penanaman modal, (3) Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negeri, (4) Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal serta (5). Paket Kebijakan 15 Januari 1987 tentang peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri menengah ke atas untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Hanyalah contoh bahwa Soeharto pada tataran regulasi berusaha keras membuat iklim usaha sekunder mungkin ditengah semakin merosotnya harga minyak sebagai sumber devisa utama.

Perekonomian Indonesia menurut Soeharto, memiliki tiga masalah yang perlu diperhatikan, ketika pasal 33 UUD 1945 itu¹¹⁴⁾ hendak dilaksanakan. *Pertama*, ekonomi nasional kita harus dibangun atas

dasar usaha bersama akan kekeluargaan. Dus, usaha bersama dan kekeluargaan inilah yang harus menjadi pegangan. *Kedua*, cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, rakyat banyak, yang penting bagi negara harus dikuasai oleh negara. *Ketiga*, air, bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikuasai oleh negara. Untuk apa? Inilah yang sering dilupakan. Jawabnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi (sesuai ketetapan No. XXIII/MPRS/1966), kita harus berpegang pasal 33 ini. Sebab tanpa pedoman ini, yakinlah bahwa mekanisme perekonomian Indonesia akan menemui ketidakselarasan dalam hubungan antarmanusia, majikan dan buruh. Sebab tujuan dasar dari tekad pasal termasuk adalah untuk kemakmuran masyarakat, bukan untuk kesejahteraan orang per orang. Kesejahteraan masyarakatlah atau orang-orang banyaklah yang harus diutamakan. Dan bentuk yang paling cocok adalah koperasi. Filsafat demokrasi ekonomi pada prinsipnya adalah menghargai satu sama lain. Majikan tidak boleh mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan memeras buruh. Sebab jika ini yang terjadi adalah merupakan penghisapan manusia atas manusia yang tidak sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Menurut Soeharto¹¹⁵⁾ hubungan yang terbaik adalah dengan memilih cara hubungan perburuhan Pancasila atau yang kemudian yang disebut *Industrial Peace*, industri yang damai dan perdamaian ditengah industri. Penekanan utama atas relasi buruh dan majikan adalah tri dharma. Tiga pengabdian, *pertama, rumangso melu handerbeni*—merasa ikut memiliki. Sekalipun secara hukum si buruh itu tidak memiliki pabrik tetapi merasa ikut memilikinya sebagai sumber hidupnya maka bisalah suasana diantara kedua belah pihak itu berjalan dengan menyenangkan. Pihak buruh harus merasa memiliki perusahaan itu, tentu terciptanya suasana demikian, jika pihak majikan tidak mengeksploitasi buruh. *Kedua, melu hangrungkebi*, ikut membina sampai perusahaan tersebut adalah sumber hidupnya. Dharma ketiga *mulat sariro hangrasawani*. Supaya selalu mengoreksi—mawas diri.

Tiga dharma inilah menurutnya harus dipegang teguh dalam menciptakan suasana hubungan industrial Pancasila. Dengan demikian pesan yang dikandung dalam pasal 33 tersebut sebagai usaha bersama bisa dipraktikkan dalam koperasi. Juga bisa dalam tataran tertentu dijalankan pada perusahaan-perusahaan swasta (Ingat, harapan Soeharto

agar perusahaan-perusahaan swasta menjual sahamnya ke koperasi dan karyawannya sendiri, 1990). Jenis usaha apapun pada hakikatnya tetap akan bermuara pada terciptanya kemakmuran bagi sebesar-besarnya rakyat banyak kepincangan sosial dan kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional kita. Kepincangan-kepincangan demikian bukan saja tidak menjamin terwujudnya keadilan sosial, malahan merupakan penghambat daripada kesetiakawanan yang menjadi kekuatan penting dalam usaha kita untuk bersama-sama memikul beban pembangunan. Pembangunan tidak selamanya berjalan tenang. Karena acapkali diperlukan perubahan dan perubahan-perubahan sosial yang besar.

Perubahan-perubahan itu mengandung dinamika, karena perubahan itu mengenai tingkah laku, sikap dan tata nilai. Yang penting adalah bagaimana kita memberi tempat yang longgar terhadap perubahan-perubahan ini, agar tetap dapat menyelamatkan pembangunan dan mengendalikan dinamika menjadi kekuatan pembangunan bukan membiarkan tanpa arah sehingga merusak pembangunan dan ketentraman. Jika dikatakan pembangunan adalah revolusi maka revolusi damai yang kita inginkan, agar pembangunan itu benar-benar dapat segera menaikkan tingkat kesejahteraan umum.¹¹⁶⁾

Terhadap bantuan luar negeri Soeharto berpendapat itu hal yang penting, sebab bantuan luar negeri untuk sebuah proyek pembangunan ekonomi memang tak bisa disangkal, merupakan elemen kekuatan dana yang cukup besar. Sebab itu setiap negara termasuk Indonesia pasti memerlukan sebagai salah satu pos penerimaan bagi RAPBN-nya. Berkaitan dengan itulah IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*) dibentuk pada Februari 1967 tidak lain untuk turut membantu perekonomian Indonesia yang sudah ambruk akibat inflasi yang mencapai 600%. Soeharto dengan kebijaksanaannya menerima bantuan luar negeri tersebut dengan syarat-syarat yang lunak.¹¹⁷⁾ Namun tidak dengan sendirinya harus mengaitkan bantuan luar negeri itu dengan syarat-syarat politik, itulah yang sangat ia tak senangi. Cara-cara Belanda sebagai ketua konsorsium IGGI menggunakan bantuan luar negeri untuk menekan politik, dirasakan telah melewati batas. Masalahnya bukan lagi soal hak-hak asasi yang juga menjadi kepekaan dan kerisauan kita, akan tetapi sikap dan cara urusan tersebut telah dieksploitir, sehingga dirasakan sebagai tekanan dan sangat menyinggung harga diri kita.

Sikap sok tahu, menggurui dan arrogant Belanda memang sangat berbeda dengan negara-negara Skandinavia yang juga memberi bantuan pada Indonesia, tetapi yang juga menjunjung tinggi peri kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial namun tidak menunjukkan sikap arrogant dan menggurui terhadap negara berkembang. Kendati yang mengkaitkan bantuan ekonomi dengan masalah hak-hak asasi barangkali bukan hanya Belanda, kebijaksanaan tersebut rupanya telah merasuk sebagian besar negara-negara barat. Hak asasi mulai menjadi issue sentral bagi dunia barat, setelah berakhirnya perang dingin.

Negara seperti Indonesia yang berjuang membebaskan bangsanya dari sistem penindasan kolonial, tak bisa lain kecuali juga amat peka kadar martabat serta makna kebahagiaan dan kesejahteraan hidup rakyat. Indonesia sangat memahami bahwa issue hak-hak asasi kini menjadi program negara-negara barat. Namun yang dipersoalkan dan digugat Indonesia bukanlah sikap dasar terhadap hak asasi sebagai bagian integral dari makna martabat dan kesejahteraan manusia, akan tetapi adanya kecenderungan untuk menggunakan issue tersebut sebagai senjata baru negara-negara barat mendikte negara-negara berkembang. Mungkin karena sebagai bekas negara jajahannya, sikap dan cara-cara Belanda memasalahkan issue tersebut terhadap Indonesia, seringkali memberikan kesan berlebihan, menggurui dan arrogant. Sementara cara-cara negara lain misalnya Jepang, cenderung menghormati dan menghargai martabat dan harga diri Indonesia.

Sebab itu menolak bantuan luar negeri yang terlampau mengkaitkan dengan hal-hal yang bersifat politis adalah pola strategi pemikiran Soeharto, dengan asumsi Indonesia dalam peran geopolitik kawasan dan potensi pasar masih cukup dipertimbangkan oleh kekuatan ekonomi dunia lainnya semisal Jepang dan AS. Inilah yang juga memperteguh keyakinan bahwa dengan tiadanya bantuan luar negeri via IGGI napas pembangunan ekonomi akan tetap jalan terus. Keputusan yang diambil Soeharto tanggal 22 Maret 1992 yang lalu tersebut, juga berhasil menciptakan sebuah momentum baru.

Namun demikian setelah IGGI dibubarkan dibentuklah CGI (Consultative Group on Indonesia) dengan keanggotaan sama minus Belanda yakni 17 negara Barat plus beberapa lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, ADB, dan lain-lain. FAO, WHO, UNFPA,

WFP, UNHCR, UNESCO, UNIDO, ILO, IAEA, IFAD, NIB, UNICEF, IDB, Kuwaid Fund dan Saudi Fund. Sebab biang keroknya adalah Jan Pronk (ketua IGGI yang berasal dari Belanda) yang mengecam tindakan Indonesia akan pembunuhan para pengunjung rasa di Timor Timur (Pembantaian Santa Cruz atau Insiden Dili) pada tahun 1991.

Pembubaran konsorsium negara pendonor tersebut menurut Soeharto adalah momentum guna semakin memperkuat bangkitnya dan meluasnya kesadaran bangsa tentang keharusan mandiri dalam pembangunan. Sikap mandiri disadari bahwa itu mempersyaratkan sejumlah implikasi. Tuntutan utama adalah harus semakin mau dan sanggup bekerja keras, ulet dengan sikap hemat, sederhana, lebih produktif dari konsumtif. Setia kawan harus ditransformasikan menjadi sikap bersama sebagai bangsa yang bermasyarakat majemuk untuk bersama-sama mengusahakan kemajuan.

Pada perkembangan selanjutnya ketika CGI juga ikut-ikutan sebagai instrumen penekan politik, dan membuat Indonesia tidak leluasa merencanakan serta melakukan proses pembangunan, dibawah penerus Soeharto yakni Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden ke-6, CGI pun dibubarkan tepatnya pada 6 Februari 2007.

4. Soeharto dan Politik Luar Negeri

Pengalaman masa lalunya yang hanya sebagai seorang prajurit di medan tempur, sangat kurang membekali lahirnya ide-ide segar tentang politik luar negerinya. Ia baru ditarik kedalam kancah persoalan luar negeri tatkala perjuangan Trikora mulai berkobar dan selama politik petualangan Soekarno–Ganyang Malaysia. Politik Soekarno dengan poros Jakarta–Phnom Penh–Peking–Pyongyang dan politik teman seperjuangan antara Indonesia dan RRC, telah menimbulkan kecurigaan Soeharto. Belum lagi kejadian-kejadian dalam dunia ketiga juga melandasi pemikirannya sewaktu negara Asia Afrika mengadakan konferensi di Indonesia, guna menunjukkan kepada dunia akan hak mereka turut campur dalam masalah-masalah internasional. Walaupun demikian perhatian utama Soeharto tetap pada kondisi domestik terkait bidang stabilisasi dan rehabilitasi. Perhatiannya bukan sekedar retorika yang berkedok menyelamatkan kemanusiaan dengan kata-kata yang muluk dan melambung tinggi. Namun dengan mengetuk kesadaran

rakyat bahwa Indonesia harus mau terlibat aktif dalam masalah-masalah internasional.

Soeharto yang dilahirkan di Kemuso, Yogyakarta tersebut, memang dikenal sosok yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan gagasan-gagasan politik luar negerinya dan terkesan sangat menahan diri. Perjalanan keluar negerinya baru terjadi pada tahun 1961 sewaktu menyertai kunjungan dinas Nasution ke Eropa Barat.¹¹⁸⁾ Bagaimanapun, tak lama kemudian setelah dilantik menjadi presiden penuh tanggal 28 Maret 1968 perjalanan ke luar negeri menjadi sesuatu yang bersifat rutin. Sosialisasi dan adaptasi terhadap berbagai kalangan di luar negeri tersebut, seolah memaksa dirinya untuk tampil sebagai negarawan yang punya kekhasan tersendiri. Terbukti dengan lahirnya gaya diplomasi yang berciri keindonesiaan, yakni diplomasi batik.¹¹⁹⁾ Diplomasi batik yaitu menerima tamu-tamu asing dari segala lapisan dengan memakai pakaian batik. Memakai kemeja batik khususnya tamu-tamu dari Asia. Melengkapi kekurangan yang dimiliki dalam penguasaan masalah-masalah luar negeri, ia menunjuk Adam Malik¹²⁰⁾ yang menggantikan Dr. Soebandrio. Kendati Adam Malik dan Soeharto berbeda dari sisi latar belakangnya, yang satu adalah veteran pejuang-jurnalis yang pemberani dari Pematang Siantar bermarga Batu Bara, dan yang kedua adalah seorang prajurit kelahiran Jawa namun sama dalam segi realisme dan pragmatism. Visi yang sama inilah kemungkinan yang membuka ruang keselarasan dalam menangani masalah-masalah luar negeri.

Sebagai penegak Pancasila dan UUD 1945, Soeharto dengan Orde Barunya, memulai langkah pertama dengan mengubur konsepsi Oldefos dan Nefos yang memilah-milah dunia kedalam golongan *old established forces* yang jelek dan *new emerging forces* yang baik. Ia bubarkan politik berporos dengan Peking (sekarang Beijing) yang telah mendapat pukulan mematikan pada tanggal 30 September 1965. Sebagaimana tercermin lewat pernyataan politik menteri luar negerinya:

“Bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, dan bahwa politik luar negeri haruslah mengabdikan kepada kepentingan bangsa bukan sebaliknya, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa politik luar negeri mestilah ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam hubungan ini politik luar negeri Indonesia akan ditunjukkan pada perlunasan kerja sama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dan dunia luar, baik timur

maupun barat selama kerja sama itu tidak merugikan kepentingan Indonesia”.¹²¹⁾

Pedoman baku garis-garis besar politik luar negeri Orde Baru telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 5 Juli 1966 dalam Tap No. XII/MPRS/1966 yang berintikan: *pertama*, bebas dan aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. *Kedua*, mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Yang mana terlebih dulu diwakili dengan pidato menlunya tanggal 5 Mei 1966 di depan MPRS. Isi penting dari pidato dan Tap MPRS tersebut mengisyaratkan satu pesan yakni penyelesaian masalah Asia oleh bangsa Asia. Namun jika ini dijabarkan berarti langkah-langkah mendesak pemulihan hubungan dengan Malaysia (dan Singapura) serta reorientasi hubungan dengan (terutama) negara-negara tetangga lain.¹²²⁾ Terbukti politik konfrontasi menentang Malaysia bulan Agustus 1966, menyusul kemudian pemulihan hubungan diplomatik pada tanggal 31 Agustus 1967, beberapa hari kemudian hal yang sama juga dilakukan dengan Singapura. Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menduduki posnya di PBB, setelah absen selama kurang lebih selama 2 tahun.

Rumusan dasar politik luar negeri dalam Tap MPRS tahun 1966 tersebut, kemudian disempurnakan dalam GBHN hasil ketetapan MPR tahun 1973. Intinya, bahwa hubungan Indonesia dengan dunia Internasional haruslah dituntun oleh prinsip-prinsip antara lain, pertama, terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikan kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. Kedua, mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pengembangan ketahanan nasional masing-masing serta memperkuat wadah dan kerja sama antara negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. *Ketiga*, mengembangkan kerja sama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional.

Sekalipun telah digariskan demikian, Soeharto secara implisit mengulang kembali pandangan terhadap pemikiran strategis politik luar negeri Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pidato kenegaraannya menjelang HUT kemerdekaan tahun 1967 di depan DPRGR. Soeharto lebih jauh menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan pada doktrin Pancasila dan UUD 1945. Dan seterusnya politik luar negeri hendaklah bebas dan aktif, hendaklah mengabdikan kepada kepentingan nasional dan memberikan sokongan dan bantuannya pada setiap usaha mempercepat pembangunan dunia yang adil dan makmur. Dalam rangka ini, kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan diri manapun datangnya hendaklah ditolak dengan tegas. Akhirnya, perhatian utama diletakkan pada politik luar negeri yang realistik dan pragmatis. Realistik dalam arti kata memberikan perhatian pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam konstelasi dunia sekarang. Pragmatis dalam arti kata menjalankan politik yang bersungguh-sungguh, berguna dan menguntungkan bagi kepentingan nasional dan kemanusiaan, tanpa mengabaikan aspek-aspek ideologi bangsa Indonesia yaitu moral Pancasila.

Dalam perjalanan selanjutnya, Indonesia sebagai pendiri Gerakan Non Blok yang benihnya telah ditaburkan sejak KAA 1955 di Bandung menegaskan garis politik luar negerinya secara jelas. Bahwa Indonesia tidak menginginkan politik netral maupun netralisme, hanya karena ingin berteman dengan setiap orang.¹²³⁾ Menurut Soeharto,¹²⁴⁾ kita tidak terpengaruh tangan ataupun mengikuti arah angin. Sebaliknya Jakarta menekankan akan kebebasannya dalam menentukan pendiriannya berhubungan dengan masalah-masalah dan kejadian-kejadian internasional dan membantu atau berusaha dalam mengambil tindakan-tindakan yang dianggapnya baik guna menimbulkan perdamaian di dunia.

Pragmatism Indonesia dengan berhati-hati berpegang pada konsep netralisasi tetapi bukan sebagai pengakuan terhadap kelemahan atau ketidakmampuan menghadapi tekanan-tekanan dari luar. Sebaliknya, Indonesia menginginkan melihat Asia Tenggara berkembang dengan secepat mungkin menjadi satu daerah yang stabil dan aman, sanggup menentang pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Ini hanya mungkin sebagaimana dirumuskan oleh menlunya Adam Malik, jika bangsa-bangsa di Asia Tenggara, inisiatif sendiri atau kolektif membangun

kekuatan ideologi, sosio ekonomi, politik dan militer dalam satu kawasan secara bersama-sama. Strategi ini bisa jadi merupakan instrumen ampuh menghadapi segala tantangan atau sebagai apa yang dikatakan Soeharto 'ketahanan nasional dari setiap negara atau lingkungan'.

Jikalau komitmen tersebut dipegang teguh, sejatinya tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar Dasa Sila Bandung. Apa yang menjadi concern Soeharto tak lain merupakan pengejawantahan dari semangat Dasa Sila tersebut. Sehingga apapun aral yang muncul dalam implementasi haluan berpikir semacam itu, tidak sedikitpun menggoyahkan keyakinan dan kebenaran garis politiknya. Lebih jauh di forum PBB tanggal 28 Mei 1970 ia menegaskan:

"Indonesia yakin, bahwa kami mempunyai prinsip-prinsip yang kuat sejalan dengan itu, saya menunjuk pada kenyataan bahwa Dasa Sila (Sepuluh Prinsip) Bandung telah disetujui oleh semua negara Asia Afrika lima belas tahun yang lalu. Semenjak itu Indonesia berpendapat selama ini prinsip-prinsip itu secara bersungguh-sungguh dan akan menghadapi setiap percobaan. Tidak dapat diragukan bahwa Indonesia akan terus menjunjung Dasa Sila Bandung, dan tetap akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak terikat. Ketidakterikatan Indonesia sesungguhnya akan menjamin sifat politik luar negerinya yang bebas aktif, dan politik bebas dan aktif tidaklah berarti bahwa kita berpangku tangan dalam menghadapi masalah-masalah Internasional".¹²⁵⁾

Selanjutnya obsesi itu menggiring Indonesia, untuk tidak begitu saja bisa lepas tangan akan kondisi-kondisi buruk yang terjadi di sekitarnya. Implikasi dari semua itu adalah turut terlibatnya Indonesia mengambil peran aktif dalam penyelesaian masalah-masalah internasional. Dikirimnya Pasukan Garuda ke Kongo (1973), terlibat TNI sebagai komisi pengawas Internasional (ICCS) untuk gencatan senjata di Vietnam (1976), menjadi mediator pertikaian tentang konflik Kamboja (JIM-1989) serta pengiriman pasukan Garuda XII (1992) ke Kongo, Garuda XIII (1992) ke Somalia, Garuda XIV (1993-1995) ke Bosnia hingga terakhir Garuda XVIII (1997) ke Tajikistan sebelum Soeharto lengser tahun 1998 adalah beberapa contoh saja untuk menyebut sekian aktivitas yang segaris dengan aktualisasi pemikiran politik Orde Barunya Soeharto. Tradisi pengiriman pasukan perdamaian ini pun terus dilanjutkan oleh pengantinya hingga semasa

Presiden Joko Widodo tahun 2017 masih mengirim pasukan Garuda XXV ke Lebanon.

Beberapa kenyataan yang disebut di atas, sebetulnya lebih mengacu terhadap reorientasi serta pelurusan ke rel yang benar garis pemikiran politik yang selaras dengan doktrin Pancasila dan UUD 1945. Garis berpikir yang terlalu mengeblok perlu diluruskan, betapapun sulit dilakukan. Hadirnya Tap No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan penyebaran dan pengembangan doktrin dan ajaran-ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme misalnya, kendati kurang mengundang simpati negara sosialis komunis mutlak harus diambil agar Indonesia tidak semakin terperosok dalam lembah keberpihakan. Memang disadari betul bahwa pada mulanya sulit bagi Soeharto menuangkan kekonsistenan gagasan garis berpikir politik luar negerinya yang bebas aktif, dalam kondisi yang serba sulit tersebut. Lebih jauh Soeharto menegaskan:

“Sungguh tidak gampang melaksanakan politik luar negeri yang demikian ini. Lebih-lebih dalam menghadapi tarikan-tarikan dari kiri dan kanan, dalam menghadapi tekanan-tekanan secara kasar, terang-terangan maupun terselubung sembunyi-sembunyi. Kita memang pernah mengalami masa di mana kita agak bergeser ke kiri. Kita juga pernah tergoyah agak condong ke kanan. Kita juga pernah mengalami masa nasionalisme yang ekstrim di mana kita menolak segala sesuatu yang berasal dari Barat, keluar dari PBB dan lain-lain tindakan yang berbau keradikal-keradikalan. Namun semuanya itu segera diluruskan kembali oleh bangsa kita”.¹²⁶⁾

Paling kurang ada dua hal yang menjadi aksentuasi dalam pidato kenegaraan Soeharto tanggal 16 Agustus 1975 berkaitan dengan paradigma berpikir tentang politik luar negerinya. Pertama, penekanan pentingnya usaha-usaha Indonesia dalam mengkonsolidasikan dan memperbaiki ‘rumah tangga sendiri’ sebagai sesuatu yang mendasar. Kedua, penekanan dan pentingnya Indonesia mengambil bagian dalam menciptakan dunia yang lebih damai, lebih dapat dimengerti terutama di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Konsekuensi logis akan tekad yang demikian tadi memaksa Indonesia untuk memainkan peranan penting dalam penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini. Peranan tersebut kemudian terbukti telah dicapainya satu keputusan yang bulat oleh kepala-kepala Pemerintahan ASEAN untuk menghadiri KTT I di Bali tanggal

23–25 Maret 1976. Dalam kesempatan ini dicapai suatu semangat kerja sama regional dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang dilakukan dengan satu konsensus bersama. Lebih daripada itu keberhasilan konsensus ini tidak lain karena operasi diam-diam yang dilancarkan di belakang layar melalui pendekatan-pendekatan pribadi oleh Soeharto. Sebagaimana dikesankan Perdana Menteri Lee Kuan Yew kepada pihak tuan rumah demikian:

“Saya berpendapat bahwa udara yang nyaman di Bali ini akan mempunyai pengaruh menenangkan pada pembesar-pembesar dan menteri-menteri yang telah payah, tetapi setelah saya sampai kemarin, saya mendapatkan bahwa tuanlah yang telah memasukkan ketenangan dan kebijaksanaan bermusyawarah kedalam persidangan menteri-menteri kita. Dengan demikian perbedaan-perbedaan pendapat telah dapat diatasi, sebelum kepala-kepala pemerintahan tiba, ini yang membikin saya yakin bahwa perundingan kita di Bali akan berhasil dan positif”.¹²⁷⁾

Kendati masih mengalami kegagalan dalam mewujudkan konsep ZOPFAN (*Zone of Peace Freedom and Neutrality*) pertemuan tersebut semakin meyakinkan negara tetangga bahwa Indonesia selaku negara besar di kawasan ini lebih mengutamakan hidup bertetangga baik ketimbang mengulangi petualangan politik masa lalu. Sebab itu jikalau, ketahanan nasional yang diutamakan oleh sesuatu negara ASEAN, Soeharto berharap agar itu dilihat dalam konteks pertahanan dalam negeri sesuatu bangsa itu sendiri bukan sebagai ancaman terhadap negara tetangga. Lebih jauh Soeharto mengatakan:

“Justru karena itulah maka kita perlu terus menumbuhkan ketahanan nasional masing-masing nasional yang gilirannya akan mewujudkan ketahanan regional pula. Ke dalam, ketahanan nasional adalah kemampuan untuk melampaui dengan selamat proses perubahan masyarakat yang diperlukan, dengan tetap mempertahankan kepribadiannya sendiri. Dan keluar, kemampuannya bertahan terhadap segala bentuk ancaman dari luar. Karena itu pula, ketahanan nasional mencakup penguatan unsur-unsur penting daripada pembangunan suatu bangsa secara utuh yang meliputi ketahanan dibidang politik, ketahanan dibidang ekonomi, ketahanan dibidang sosbud, dan ketahanan dibidang militer. Karena ketahanan nasional bertolak dari kebutuhan pembinaan yang terus menerus daripada proses pembangunan bangsa, maka titik berat

masalah-masalah yang diharap pada sesuatu masa atau tahapan akan ditentukan oleh keadaan dan kebutuhan khusus bangsa-bangsa itu sendiri”.¹²⁸⁾

Pada KTT II (1977) di Kuala Lumpur, beberapa penyempurnaan-penyempurnaan dilakukan. Namun pada KTT III (1987) kembali suatu solidaritas bangsa-bangsa Asia Tenggara dipertaruhkan karena kondisi domestik Philipina amat keruh. Terjadi serangkaian kegamangan (keragu-raguan) di kalangan sementara pemimpin ASEAN untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut, karena faktor keamanan. Dalam keadaan demikian inilah, ketegasan sikap Soeharto untuk tetap menghadiri KTT, adalah akan memberi kekuatan moril tersendiri bagi pemerintahan Corazon Aquino (yang setahun sebelumnya baru merebut kekuasaan dari Presiden Ferdinan Marcos melalui *the People Power Revolution*) dan kepala pemerintahan ASEAN lainnya, untuk benar-benar menunjukkan kepada dunia akan kesetiakawanan dan solidaritas ASEAN. Jadi menurut Soeharto,¹²⁹⁾ jangan sampai justru pada saat ada salah satu anggota menghadapi kesulitan maka kita cuci tangan. Kalau kita cuci tangan itu artinya tidak ada solidaritas. Dan sikap solidaritas harus dibuktikan. ASEAN harus menunjukkan kepada dunia bahwa disinilah letak kesetiakawanan ASEAN terhadap anggota yang tengah menghadapi kesulitan. Terhadap sikap Indonesia yang berani mengambil resiko ini PM Singapura Lee kembali memberikan pendapatnya:

“Kalau saja para kepala pemerintahan mendengarkan nasehat yang diberikan aparat keamanan mereka, maka kini mereka tidak akan berada di Manila. Tetapi mereka mengabaikan itu. Dan Presiden Soehartolah yang mengambil inisiatif pertama untuk hadir di Manila. Keputusan itu diambil Presiden Soeharto karena komitmennya untuk memelihara solidaritas itu”.¹³⁰⁾

Buntut dari pilihan yang penuh risiko tersebut memang tidak murah harganya. Selain gagalannya sebuah reputasi idealisme politik juga taruhan nyawa seluruh pemimpin ASEAN yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi karena ledakan bom oleh sekelompok ekstremis pengacau NPA (*New People Army*). Sebab itu untuk menghindari segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, Soeharto memerintahkan untuk mengirim pasukan fregat KRIW. Zakaria Yohanes dan Kapal Tanker sekaligus perbekalan KRI Sorong sebagai satuan pengaman KTT tersebut. Tak

urung ini, disebagian kalangan pengkritik dinilai sebagai manuver pengamanan pribadi dan pemborosan anggaran yang berlebihan.¹³¹⁾ Soeharto menangkis kecaman tersebut dengan mengatakan:

“Baik bagi Indonesia maupun bagi ASEAN secara keseluruhan, satuan tugas demikian mempunyai arti. Sebab gagalnya KTT ASEAN, itu tidak akan membuat malu Presiden Corazon Aquino, tetapi juga membuat malu ASEAN secara keseluruhan. Karena tanggung jawab itulah, maka kita mengirimbkan satuan tugas. Jadi bukan untuk mengamankan saya semata. Tanggung jawab RI, untuk menyukseskan KTT ini berat, karena Indonesialah yang mengambil keputusan pertama untuk bersedia hadir dan berangkat ke Manila”.¹³²⁾

Setelah Irian bisa diselesaikan dan menjadi provinsi ke-26 (kemudian tahun 2003, seiring era Otonomi Daerah, Irian Jaya dimekarkan menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat), masih ada satu lagi peninggalan kolonial yang masih belum dapat terselesaikan—bekas jajahan Portugis sebelah timur dari pulau Timor. Tidak disangsikan lagi jika Jakarta berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan pemerintah Portugis di Lisbon dalam masalah dekolonisasi daerah yang terpencil dan kurang sesuai dengan zamannya lagi. Kepentingan Indonesia di Timor-Timor bukanlah ungkapan kerasukan wilayah belaka.¹³²⁾ Kepentingan itu memperlihatkan kekuatiran yang mendalam terhadap kemungkinan ancaman terhadap keamanan republik yang mungkin timbul dari perubahan politik yang tak menentu di koloni yang berdampingan. Dalam situasi global yang masih diwarnai kecemasan perang dingin tersebut, wajar jikalau ada sejumlah kesangsian di pihak Soeharto dengan orde barunya terhadap munculnya suatu negara merdeka yang akan menggantikan kekuasaan Portugis. Kekuatiran tersebut terbukti dengan munculnya suatu gerakan politik radikal yang mendapat dukungan massa besar pada Mei 1974 dalam mana identitas dan orientasi ideologis merupakan sesuatu yang terlarang di Indonesia. Gerakan politik ini yang menyebut dirinya sebagai Front Revolusi bagi Kemerdekaan Timor-Timor (Fretelin), menuntut kemerdekaan sejak awal dan menyeluruh sifatnya. Retorik radikalnya, akronim yang sengaja disamakan dengan Frelimo di Muzambik dan hubungannya dengan sayap kiri baik di Portugis maupun koloninya di Afrika menimbulkan ketakutan luar biasa pihak Jakarta.

Sebab itu Indonesia kemudian mengambil sikap bahwa perlu ditumbuhkan suatu partai klien yang berusaha berintegrasi, dengan Pancasila Indonesia.¹³³⁾ Dukungan Indonesia jatuh pada Asosiasi Demokrasi Populer Timor (Apodeti) yang dibentuk akhir Mei 1974, Tidak lain dimaksudkan sebagai respon keprihatinan mendalam atas keamanan nasional. Namun sayang, reaksi Indonesia tersebut ditanggapi semakin kokohnya situasi internal wilayah koloni tersebut yakni dengan munculnya bentuk koalisi perjuangan antara UDT (Persatuan Demokratik Timor) yang konservatif dengan partai Fretelin ini. Tapi dalam perkembangan selanjutnya terjadi keretakan koalisi ini akibat perselisihan antara keduanya dalam hal pengambil alihan kekuasaan (secara sepihak Fretelin memproklamkan kemerdekaan Timor-Timor tanggal 28 November 1975). Dengan Apodeti yang kemudian mendapat dukungan dari faksi yang lainnya yaitu UDT. Kota, Trabalista. Karena merasa tersisih maka koalisi yang terakhir tersebut minta bantuan kepada Indonesia.¹³⁴⁾

Sebagaimana garis strategis pemikiran politik luar negeri Soeharto yang ingin memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan kawasan Pasifik, tentu saja permohonan minta bantuan tersebut ditanggapi secara positif. Indonesia segera mengirim sukarelawan-sukarelawan yang ingin membantu saudara-saudaranya di Timor-Timor.¹³⁵⁾ Sungguhpun begitu, pengiriman sukarelawan-sukarelawan Indonesia telah menimbulkan protes dunia internasional, juga dalam PBB terutama oleh mereka yang dalam hal lain ingin mendesak hak mereka untuk campur tangan dalam masalah-masalah luar negeri dengan gandalih pembebasan nasional. Indonesia telah dihukum sebagai aggressor oleh dewan keamanan PBB, utusan istimewa pun dikirim ke daerah yang diperselisihkan itu, dan masalah tersebut pidato akhir tahunnya tahun 1975, dalam mana baru saja titik klimaks konflik tersebut menyatakan:

“Sebab itu kita dukung proses dekolonisasi yang wajar, tertib dan damai. Melalui proses dekolonisasi yang demikian kita akan mengakui dan menghormati pendapat disana mengenai masa depan mereka sendiri. Melalui proses dekolonisasi demikian, kitapun akan menyambut dengan hangat keinginan rakyat di sana untuk berintegrasi dengan kita.... Apapun yang telah dan diputuskan Badan Dunia itu, kita tidak akan mungkin mengingkari kenyataan objektif dan rasa keadilan rakyat didaerah Timor-Timor harus

diberikan kesempatan untuk menetapkan hari depannya secara wajar dan di Indonesia tidak dapat dan tidak mungkin berpangku tangan dalam menghadapi kemelut di wilayah tersebut, karena telah mengganggu dan dapat membahayakan keutuhan wilayah negara ini”.¹³⁶⁾

Walaupun begitu tindakan tersebut, tidak bisa dibilang operasi militer yang berhasil, karena perlawanan awal dari pendukung setia Fretelin yang sangat kuat tetapi keseimbangan sumber-sumber militer dan tidak adanya dukungan luar terhadap Fretelin menyebabkan penggabungan bagian timor pulau itu dalam wilayah Indonesia tak diragukan lagi. Suatu pemerintahan sementara yang dipimpin oleh ketuanya Apodeti yang diakui Indonesia dibentuk di Dili pada tanggal 17 Desember 1975 dan pada pertengahan Februari 1976 pulau tersebut ditegaskan dibawah kontrol Indonesia. Dan tanggal 21 Mei 1976, secara resmi Timor-Timor disahkan oleh DPRD setempat sebagai bagian internal Republik Indonesia. Tetapi di manapun di dunia ini telah berhembus angin perubahan yang juga mempengaruhi Indonesia.

Namun integrasi Timor-Timur ke Indonesia tersebut kemudian dicoreng dengan insiden 12 November 1991 di Santa Cruz-Dilli. Pada saat itu berlangsung demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Indonesia bersamaan dengan prosesi penguburan rekan mereka, Sebastião Gomes. Prosesi pemakaman tersebut disertai pula aksi gelar spanduk yang meminta penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, dengan menampilkan gambar pemimpin pro-kemerdekaan Xanana Gusmao. Info yang beredar menyebut bahwa pada saat prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Maka tercatatlah 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang sebagai korban. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia.

Meskipun rejim Soeharto berusaha menutup-nutupi, faktanya dunia internasional bereaksi sangat keras. Ini lantaran insiden tersebut disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat; Amy Goodman dan Allan Nairn; dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman untuk *Yorkshire Television* di Britania Raya. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada seorang wanita Belanda untuk

menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan pengeledahan bugil terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video tersebut digunakan dalam dokumenter *First Tuesday* berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor*, ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992. Tayangan tersebut kemudian disiarkan ke seluruh dunia, hingga sangat mempermalukan pemerintahan Indonesia. Di Portugal dan Australia, yang keduanya memiliki komunitas Timor Timur yang cukup besar, protes keras (https://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_Dili).

Upaya pelurusan berita menjadi sia-sia. Diplomasi gagal meyakinkan komunitas internasional yang terlanjur sudah percaya dengan tayangan tersebut. Begitu beratnya merebut hati orang Timor, yang mayoritas Katolik tersebut, akhirnya ketika BJ Habibie menjadi Presiden ke-3, dimunculkan opsi jajak pendapat penentuan nasib orang Timor-Timur tetap sebagai warga Indonesia dengan otonomi khusus atau mau memisahkan diri.

Ketika pada 30 Agustus 1999, tidak kurang 365.501 warga Timtim ikut memilih dalam kegiatan referendum yang dilakukan di 700 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Disaksikan sekitar 4000 pemantau asing maupun langsung dari PBB. Hasilnya, hanya 21,5% rakyat Timtim menerima Otonomi Khusus, seperti yang ditawarkan Habibie. Sisanya, 78,5% menolak tawaran tersebut artinya ingin merdeka.

Lepasnya Timor Loro Sae sebagai negara baru dengan nama Timor Leste, adalah antiklimaks apa yang selama ini telah diperjuangkan oleh Soeharto sejak pra integrasi tahun 1976. Trilyunan rupiah untuk membangun Timor-Timur mengejar ketertinggalan sebagai provinsi ke 27 semasa Soeharto, tidak berarti apa-apa setelah penerusnya BJ Habibie kompromi dengan tekanan internasional agar dilakukan referendum sebagai solusi politik final.



PERBANDINGAN PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO DAN SOEHARTO

5

5.1 Faktor yang Mempengaruhi

Ada dua pengaruh yang amat kuat memberikan kontribusi bertumbuhnya kepribadian Soekarno dalam mengekspresikan pemikiran-pemikiran politiknya. *Pertama*, adalah pengaruh dari Eropa. Dimulai tatkala setemat ELS (*Europeesche Legere School*) ia kemudian melanjutkan studinya di HBS (*Hogere Burger School*) Surabaya selama lima tahun (1915–1921). Disinilah dimulai penggodokan awal melalui proses pendidikan menengah yang secara langsung maupun tak langsung membekalinya pengetahuan politik yang memadai. Perkenalannya terhadap teori marxisme yang diajarkan C. Hartough seorang guru di HBS misalnya, hanyalah sumbangan pendahuluan yang mengharapkan komplementasi lanjutan. Tidak mengherankan jikalau dalam perkembangan selanjutnya Soekarno amat berkemauan keras memperlengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari para pemikir besar baik dari kalangan liberalis maupun sosialis. Interaksi dan persahabatannya dengan tokoh-tokoh *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging*, A. Baars, DMG Koch, Semaun dan lain-lain dalam organisasi politik yang bercorak radikal kekiriannya ini, turut pula memberikan pengaruh dalam bagaimana Soekarno menanggapi situasi sosial yang ada saat itu. Proses sosialisasi ini mau tak mau terinteraksi dalam diri Soekarno, yang selanjutnya

berpengaruh atas terbentuknya karakteristik Soekarno yang radikal dalam memperjuangkan setiap konsep pemikirannya. Kenyataan awal yang terlanjur dibangun ini semakin terpola, sehingga melahirkan kerenggangan yang sengaja tercipta antara Soekarno dengan masyarakat sekitarnya. Akibatnya, Soekarno yang amat progresif tersebut sangat sulit untuk bisa direspon secepatnya oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan tak jarang, justru masyarakat terdidik sekalipun harus berulang-ulang kali mencari penjelasan agar bisa memperoleh pemahaman yang pas dengan apa yang sebetulnya dimaksud Soekarno tersebut.

Pengaruh *kedua*, adalah berasal dari akar budaya Jawa. Kendati R. Sukemi dan Idayu ayah dan ibunda Soekarno berasal dari kultur yang tidak sama, namun sosialisasi pendidikan yang mereka tempuh untuk anaknya tersebut adalah satu visi. Hal ini terjadi karena lingkungan sosial yang mendominasi kehidupan mereka adalah lingkungan sosial yang mendominasi kehidupan mereka adalah lingkungan Jawa. Sehingga proses interaksi dan penanaman nilai-nilai kepribadian amat erat kaitannya dengan lingkungan distal di mana mereka hidup saat itu. Tidak mengherankan jikalau ceritera-ceritera epos Ramayana dan Mahabharata, cukup banyak memberi andil dalam pembentukan karakter individu bagi kebanyakan anak-anak pedesaan Jawa, sebab ceitera-ceritera tersebut senantiasa diabstraksikan lewat pagelaran-pigelaran wayang yang sudah pasti menjadi tontonan utama kebanyakan orang Jawa. Soekarno pun tak bisa terhindar dari pengaruh kultur semacam itu. Lebih-lebih posisi sosial orang tua yang mendidik masa kecil Soekarno menempatkan ia dalam kedudukan yang khas, sebab setiap ada penghelatan apapun mereka pasti berkesempatan untuk hadir dalam menyaksikan tontonan wayang tersebut. Dan lakon-lakon wayang ini pula turut menyuburkan tumbuhnya rasa percaya diri yang kuat terhadap pribadi Soekarno apalagi dengan seringnya Soekarno melakukan identifikasi-identifikasi sifat dengan tokoh-tokoh wayang yang diperankan Ki Dalang.

Selanjutnya ada alasan khusus, mengapa orang tua Soekarno menitipkan anaknya di rumah HOS Cokroaminoto, tidak lain adalah agar Soekarno bisa tumbuh dalam pembentukan kepribadian yang terbina dan terkontrol. Sebab selain kawan baik orang tuanya, Cokroaminoto juga sangat terkenal pada zamannya sebagai seorang politisi pejuang yang punya karisma dan mampu membangkitkan motivasi perjuangan

bagi anak-anak muda. Meskipun 'Sang Guru' Cokroaminoto adalah Sarekat Islam (SI) namun Soekarno tak pernah masuk dalam organisasi ini. Organisasi yang pertama kali dimasuki adalah organisasi Tri Koro Darmo (1915) dari sinilah langkah awal tersebut mulai ia titih, yang kemudian terus berkembang sesuai dengan pertambahan usianya. Semasa mahasiswa di Bandung ia memasuki organisasi studi klub (Algamenee Studie Club) yang kemudian dilanjutkan masuk dalam Partai Nasionalis Indonesia (1927) sebagai aktivis yang langsung terjun di lapangan. Kendati demikian, orang yang paling mengesankan dalam perkembangan kepribadian, intelektual dan integritasnya dalam bidang politik perjuangan tetaplah ia katakan HOS Cokroaminoto. Partisipasi aktifnya mengikuti berbagai kegiatan politik tokoh SI yang juga dikenal sebagai 'raja Jawa yang tak dinobatkan' tersebut juga memberikan sumbangsih yang berarti bagi berkembangnya kemampuan analisis serta adu argumentasi dengan lawan-lawan politiknya.

Sementara penggantinya lain lagi. Obsesi Soeharto muda hanya satu yaitu ingin keluar dari kemelut ekonomi yang menghimpit dan tidak ada jalan lain kecuali bekerja. Demikianlah akhirnya setamat sekolah menengah tahun 1939, ia kemudian bekerja sebagai pembantu klerek di sebuah bank desa (Volks Bank). Meskipun pekerjaan ini tak ia senangi namun ia tetap berusaha keras menekuni walaupun akhirnya harus ia tinggalkan seraya berusaha mencari pekerjaan yang lain. Oleh karena kecerdasan dan ketegapan badan anak muda ini, kemudian ia dengan mudah dapat diterima di sebuah sekolah militer di Gombang (Jawa Tengah) tahun 1940.

Masa kanak-kanak Soeharto memang agak suram jikalau dibandingkan dengan Soekarno. Soeharto tumbuh dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya yang kurang harmonis, oleh sebab perceraian yang dilakukan. Ajaran dan didikan etika moral banyak diberikan oleh pamannya sendiri, selain tentu juga dari ayah anda yang memang penganut ajaran kebatinan. Dalam suasana perkembangan kepribadian yang memprihatinkan inilah, Soeharto kemudian tumbuh menjadi pribadi yang tabah dan sederhana dalam menerima perjalanan nasib hidup. Sisa-sisa kedisiplinan yang pernah diturunkan dari orang tuanya. Ia pegang teguh sampai kemudian ia menjadi seorang kader dan militer. Pembentukan dasar-dasar kepribadian inilah yang akhirnya menghadirkan perwatakan individu yang tangguh dalam menghadapi

setiap persoalan-persoalan yang rumit. Ada tiga hal ajaran ‘aja’ yang amat mengesankan Soeharto hingga saat ini yaitu aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh (jangan kagetan, jangan heran, jangan mentang-mentang). Dan inilah yang kemudian menjadi pegangan hidupnya serta menjadi penegak diri dalam menghadapi soal-soal yang bisa mengguncangkan dirinya.

Berbeda dengan Soekarno, politik bagi Soeharto adalah sesuatu yang asing. Pergulatan hidup yang ia jalani hanya berkisar pada olah persenjataan saja. Sehingga praktis, selain sisa-sisa ajaran kebajikan dan filsafat hidup yang minat terhadap perkembangan politik yang terjadi dalam arti turut aktif mengemukakan gagasan-gagasan tentang pemikiran-pemikiran politik kebangsaan sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno pendahulunya. Konsentrasi utama Soeharto, banyak tersita oleh tugas-tugas kemiliteran semata sehingga keterlibatannya dalam perdebatan gagasan tidak ada. Kalaupun akhirnya Soeharto terlibat dalam percaturan politik praktis itupun disebabkan karena jabatan ketentaraan Soeharto yang secara *ex officio* memang mengharuskan peran yang demikian tadi. Dalam kasus peristiwa 3 Juli 1946 misalnya di mana atasan langsung Soeharto Mayor Jendral Sudarsono yang bermaksud melakukan penggulingan terhadap pemerintahan Soekarno yang sah berhasil ia gagalkan secara bijaksana tanpa melepaskan sebutirpun tembakan. Dalam peristiwa ini, untuk pertama kalinya Soeharto diseret ke kancah politik sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya, namun diakui atau tidak ia telah menunjukkan keahliannya dalam bidang diplomasi serta memperoleh reputasi sebagai seorang yang keras kepala, susah untuk dikendalikan.

Kecermatan Soeharto dalam melihat jauh kedepan ‘tanda-tanda zaman’ terhadap kejadian 30 September 1965, juga tidak terlepas dari kemampuannya yang tajam dalam menganalisa situasi politik yang ada. Peristiwa 1965 itu tidak lain juga merupakan refleksi ulang apa yang terjadi pada bulan September 1948. Ada ketegangan politik yang memuncak dengan terlebih dulu diawali dengan perselisihan-perselisihan kecil didalam negeri. Sebuah metode perebutan kekuasaan, yang juga ditandai dengan penculikan pihak lawan, kerja sama yang erat dengan perwira-perwira berhaluan progresif revolusioner dengan komunis, penumpasan yang cepat terhadap pengacau dengan kesatuan-kesatuan anti komunis yang kuat dan selanjutnya ditutup dengan

sebuah episode pembunuhan yang besar-besaran dalam pertentangan komunis dengan anti komunis. Semua itu berhasil Soeharto antisipasi dengan sebuah kesigapan respon yang amat jeli. Disinilah letak ketrampilan Soeharto yang terlatih dalam mencandra situasi, suatu bukti kuatnya dampak disiplin belajar dan berlatih oleh batin yang ia geluti semasa usiamuda. Meskipun Soeharto tidak amat menonjol dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran politik, tetapi ia cukup piawai dalam menemukan penyelesaian masalah-masalah politik dengan berpegang pada filosofi, *alon-alon waton klakon*—pelan tapi pasti.

B. Persamaan-persamaan Pemikiran Soekarno dan Soeharto

Soekarno dan Soeharto memiliki persamaan pemikiran paling kurang dalam dua hal yaitu terhadap ideologi Pancasila dan perspektif demokrasi. Cara pandang mereka tidak hanya mirip dalam teks teoritikal tapi juga dalam implementasinya. Ideologi Pancasila menurut Soekarno dan Soeharto misalnya, kendati berbeda dalam rumusan tetapi esensi adalah sama, penekanan-penekanan terhadap sila per sila menunjukkan suatu pertalian yang memang senantiasa terkait satu sama lain. Penjabaran yang ingin dikembangkan pun dalam aplikasinya menyiratkan adanya perpaduan konteks yang tidak saling lepas. Hal ini terbukti dengan suatu indikasi kongkrit, terhadap bagaimana mereka berdua berusaha keras memberikan pemahaman agar Pancasila yang diterima sebagai ideologi negara tersebut bisa ditafsirkan dalam persepsi yang seragam bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baik Soekarno maupun Soeharto dalam setiap pidato-pidato yang mereka lakukan tidak pernah lupa menitipkan pesan akan arti pentingnya ajaran ideologi Pancasila. Sebagai paham kebangsaan. Pancasila harus ditempatkan dalam posisi yang khas. Khas dalam arti tidak boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang bersifat hakiki yakni mengagamakan Pancasila dan mempancasilakan agama. Pancasila menurut mereka, harus diterjemahkan sebagai satu-satunya ideologi bangsa yang bisa mengakomodir segenap kepentingan dalam masyarakat kita. Sebab itu setiap ada usaha untuk menggeser posisi Pancasila sudah dapat dipastikan akan menemui kegagalan. Peristiwa DI/TII, pemberontakan Madiun, Pemberontakan Kahar Muzakar Pemberontakan Amir Fatah dan lain-lain pemberontakan separatis sipil dalam masa Soekarno maupun

gerakan Imron, pemberontakan Aceh, pemberontakan Lampung, peristiwa Tanjung Periuk dan Borobudur dalam masa Soeharto adalah sebagian contoh yang masih merupakan ideologi bernegara yang paling baik diantara yang terbaik.

Persepsi Soeharto tentang Pancasila sebenarnya lebih banyak, repetisi dari apa yang pernah disampaikan Soekarno. Praktis misalnya, penghisapan manusia atas manusia tidak boleh. Suatu keputusan harus diambil dengan musyawarah. Negara Indonesia adalah negara yang bertuhan (sosialis religius) serta perlunya persatuan dan kesatuan bangsa adalah konsep-konsep tentang pemahaman Pancasila yang juga pernah diucapkan oleh pendahulunya, Soekarno. Selanjutnya metode pemasyarakatan terhadap ideologi tersebut, inipun tak banyak perbedaan pula. Dalam masa Soekarno pemasyarakatan ideologi banyak dikembangkan selain lewat pidato-pidato umum juga melalui indoktrinasi-indoktrinasi yang pada hakikatnya adalah pemberian doktrin-doktrin ideologis terhadap masyarakat melalui kursus-kursus maupun pengajaran-pengajaran disekolah-sekolah. Sementara dalam masa Soeharto metode yang ditempuh dalam penanaman nilai-nilai ideologis Pancasila adalah melalui penataran-penataran P4 dan permainan-permainan simulasi selain itu juga dilaksanakan dengan berbagai bentuk pengarahan-pengarahan pejabat. Metode penataran misalnya dimulai secara berjenjang, yakni diawali dengan pola pendukung 17 jam, 40 jam hingga 100 dan 150 jam yang semua itu pernah dipraktikkan dalam masyarakat kita. Terlepas dari berapa banyak dana yang dianggarkan untuk proyek ini, baik indoktrinasi pada masa Soekarno maupun penataran pada masa Soeharto adalah modus operandi yang sama bagi pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Kalau dulu semasa pemerintahan Soekarno ada badan yang secara khusus menangani indoktrinasi yaitu Badan indoktrinasi Nasional dibawah Jawatan Kementrian Penerangan sekarangpun hal yang sama masih ada khususnya yang mengurus penataran-penataran yakni Kantor BP 7 (badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) yang berpusat di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di Indonesia. Pada masa Presiden Joko Widodo (2014-2019), lembaga yang secara khusus mengurus ideologi Pancasila adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP. Yang

dalam perkembangannya tahun 2018 diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebuah Lembaga Nonstruktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Obsesi Soeharto untuk memasyarakatkan Eka Prasetya Pancakarsa (tap MPR No. II/MPR/1978) merupakan penjabaran Panca Krida Kabinet Pembangunan empatnya yaitu butir/krida ketiga yang berbunyi, meningkatkan pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan pemasyarakatan dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian mencoba menarik benang persamaan antara masa Soekarno dan Soeharto dalam hal penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) sungguh adalah tidak sulit.

Baik Soekarno maupun Soeharto menyadari secara eksistensial Pancasila dijadikan ideologi negara Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945, walaupun secara yuridis hal itu baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Proklamasi tidak menyinggung tentang Pancasila, tetapi semata-mata, tetapi semata-mata menjelaskan tentang bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya keseluruh dunia.

Dan proklamasi itu sendiri dijelaskan lebih lanjut di dalam pembukaan UUD 1945. Apabila proklamasi menjelaskan tentang Indonesia telah merdeka sebagai bangsa, Pembukaan UUD '45 berisi penjelasan tentang apa yang dikehendaki oleh proklamasi itu sebenarnya. Proklamasi menghendaki Indonesia yang merdeka di dalam suatu perumahan bangsa yaitu negara merdeka yang bernama Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila. Negara yang berdasarkan Pancasila itu ingin mencapai negara yang adil dan makmur dan ikut membangun perdamaian dunia. Negara Indonesia yang didirikan itu tidak semata-mata mementingkan diri sendiri tetapi secara realistis melihat kenyataan bahwa bangsa kita hidup ditengah-tengah bangsa lain. Atas dasar itu, bangsa kita ingin berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia sebab hanya dengan adanya perdamaian, bangsa-bangsa dapat membangun dan mengejar kemakmuran.

Dengan perkataan lain, negara yang berdasarkan Pancasila juga ingin menciptakan masyarakat yang berpancasila. Dengan demikian Pancasila tidak secara statis sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi bangsa yang selalu diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Sebagai ideologi, yang merupakan tuntutan dalam perjuangan, Pancasila memang digali dari pandangan hidup bangsa. Dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa karena secara historis ia sudah terdapat didalam kehidupan bangsa kita sepanjang sejarahnya. Pada suatu saat periode tertentu sila yang satu lebih menonjol daripada sila yang lainnya. Namun keseluruhan dari sila-sila Pancasila merupakan suatu pandangan hidup dan merupakan suatu kebulatan.

Soekarno dan Soeharto mengakui bahwa terpilihnya ideologi Pancasila adalah sangat tepat. Hal ini dibuktikan oleh sejarah. Makin lama makin panjang hidupnya bangsa berdasarkan Pancasila itu, makin dirasakan betapa tepatnya Pancasila itu sebagai Ideologi bangsa. Pembuktian tepat tidaknya Pancasila itu memang tidak dapat diukur dari suatu perhitungan matematis, tidak juga dapat dihitung dari segi perhitungan biasa, tetapi dirasakan dan diyakini oleh bangsa dan perjalanan hidupnya. Pembuktian merupakan tindakan yang diperlihatkan oleh bangsa kita ketika ada perlawanan bersenjata ataupun kudeta yang mencoba menggantikan dasar negara dengan ideologi lainnya.

Dengan ideologi ini pula menurut Soekarno dan Soeharto, bangsa yang beraneka ragam suku dan kebudayaannya dapat hidup dengan serasi. Suatu ideologi apabila dirasakan tidak tepat oleh masyarakat akan kehilangan kekuatannya. Rakyat tidak akan mau secara suka rela mempertahankan sesuatu kalau hal itu tidak dirasakan sebagai panggilan hidupnya. Kalau mau mempertahankan Ideologi itu secara ketat, karena kuatir rakyatnya akan mengadakan reaksi terhadap ideologi yang dibawa oleh penguasa seperti di negara-negara komunis, maka hanya ada satu saja untuk mempertahankan ideologi yang baru itu agar berakar di tengah-tengah masyarakat, yaitu melalui kekerasan tanpa mengenal ampun. Ketakutan masyarakat merupakan sebab untuk tunduk dan mengikuti ideologi yang baru diperkenalkan.

Sekarang yang masih tersisa dalam tanda tanya adalah kenapa baik Soekarno maupun Soeharto tidak mengambil ideologi lain yang sudah mapan di luar negeri sehingga tidak perlu membiayai sosialisasi

nilai-nilai Pancasila yang secara ekonomi sangat mahal tersebut? Mendekatkan akan penafsiran-penafsiran jawaban atas pertanyaan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengambil ideologi yang sudah mapan belum tentu biayanya murah. Sebab pada tahap awal juga perlu uji coba. Akan diterima atau ditolakkah ideologi impor tersebut. Suatu ideologi tepat disuatu negara belum tentu tepat diterapkan di Indonesia. Itu sebabnya ideologi yang bermutan lokal yang digali dari nilai-nilai lokal bangsa itu akan lebih relevan dan tepat untuk bangsa Indonesia. Tragedi Madiun 1948, memaksakan Soekarno untuk bertindak tegas bahwa komunisme bukanlah ideologi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, sebab itu komunisme tidak boleh secara radikal memaksakan kehendaknya. 2. Ideologi mana yang tepat bagi dirinya sendiri tergantung kepada bangsa itu sendiri. Kebudayaan apa yang dikembangkan oleh bangsa itu sejak masa sejarahnya, cita-cita masyarakat mana yang mereka kehendaki sangat tergantung pada sejarah bangsa. 3. Dari sekian ideologi yang telah pernah ada tampak kekurangan-kekurangannya, baik liberalisme, fasisme, komunisme maupun sosialisme. Ideologi itu berkisar pada manusia dan masyarakat. Dilihat dari kedudukan manusia dalam mengandung kekurangan didalam pertumbuhannya. Kekurangan-kekurangan dari ideologi itu tidak usah ditiru. Melihat realita semacam ini kemudian kita menyadari bahwa ideologi Pancasila dipilih dan dipertahankan oleh kedua pemimpin bangsa Indonesia ini tak lain karena ideologi Pancasila memiliki kekhasan tersendiri. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa pemilihan ideologi Pancasila bukanlah atas dasar keunggulan bangsa tetapi karena diciptakan dan dibina berdasarkan atas pandangan hidup bangsa. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas berpartai di Indonesia juga tak lain dimaksudkan untuk bisa mengakomodir sedemikian banyak kepentingan yang melingkupi bangsa ini agar bisa diartikulasikan secara bersama-sama seluruh bangsa ini dengan berbagai corak latar belakangnya.

Persamaan kedua adalah tantang perspektif Soekarno dan Soeharto terhadap Demokrasi. Mereka sependapat jikalau demokrasi adalah sesuatu yang mutlak bagi pranata negara ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, malah ada pula yang tidak berhasil sama sekali. Tapi sungguhpun kurang atau tidak berhasil tidak dapat begitu saja mengesampingkan demokrasi. Apa yang mendasarkan tindakannya yang berlawanan dengan tuntutan demokrasi itu pada kepentingan negara

sebagaimana yang terjadi di India misalnya, ada yang dengan keputusan dari atas menumbuhkan *basic democracy* (demokrasi dasar) seperti Pakistan beberapa tahun silam, ada yang sekedar mengesampingkan hak-hak manusia karena tuntutan keadaan darurat seperti Filiopina semasa Marcos dan lain-lain. Sekelumit contoh tersebut, menunjukkan kepada kita bahwasannya mekanisme demokrasi betapapun universal sifatnya, ia harus secara cermat di pahami secara kondisional bagi tiap-tiap negara.

Menurut Soekarno, demokrasi harus direlevansikan dengan kepribadian bangsa. Sebab, kendati ia masuk sebagai nilai dalam sub kultur pergerakan nasional dan kemudian menimbulkan persoalan yang rumit dalam mencari perpaduannya dengan nilai-nilai kerakyatan yang hidup dalam masyarakat kita, bagaimana demokrasi harus di Indonesiakan. Bila Soekarno maupun Soeharto telah berhasil dalam proses pemribumisasian demokrasi ini. Soekarno keluar dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya sementara Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya. Tambahan kata terpimpin dan Pancasila dibelakang demokrasi tersebut menempatkan mereka dalam kategori yang unik, sebab klasifikasi demokrasi model demikian ini hanya ditemukan di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan jikalau banyak ahli yang membahas sistem politik demokrasi di Indonesia termasuk klasifikasi sistem politik yang lain daripada yang lain.

Ada beberapa variabel indikator yang memungkinkan kita bisa merentang tali persamaan atas pelaksanaan demokrasi ciptaan Soekarno dan Soeharto. Pertama, terhadap eksistensi partai politik. Partai politik sebagai sendi utama demokrasi harus ada. Demokrasi hanya bisa terwejawantah jikalau keberadaan partai-partai politik sebagai piranti agregasi dan artikulasi segenap kepentingan masyarakat itu diakui. Keduanya sependapat, jikalau kehadiran partai yang terlalu banyak itu hanya akan menggiring negara kepada situasi nasional yang keruh dan tidak aman. Ketidak stabilan baik politik, ekonomi maupun tertib sosial itu menjadi mungkin, oleh karena adanya demikian banyak kepentingan dan hasrat yang mustahil terakomodir secara keseluruhan. Kekawatiran ini beralasan atas dasar pengalaman sejarah yang memang benar membuktikannya. Keterpaduan gerak perjuangan sulit diupayakan, sehingga pada gilirannya melahirkan serangkaian klik dan pertikaian yang tak kunjung reda. Akibatnya, cita-cita nasional membangun

kehidupan yang tentram terabaikan. Mengantisipasi kondisi yang demikian itu Soekarno muncul dengan ide., kubur semua partai. Partai-partai politik yang semula dalam masa demokrasi liberal berjumlah empat puluh tersebut, kemudian berhasil dikerdilkan menjadi cukup sepuluh buah. Berdasarkan Penpres No. 7 tahun 1959 maka partai-partai politik yang berhasil disederhanakan itu meliputi PNI, NU, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Perti PKI dan Parkindo.

Sementara Soeharto mempunyai strategi tersendiri dalam melihat kehadiran partai-partai politik. Demokrasi Pancasila yang dikembangkan Soeharto menuntut restrukturisasi tersendiri terhadap eksistensi partai-partai politik. Meskipun Soeharto tidak mengubur tetapi esensinya tetap sama dengan apa yang diperbuat Soekarno pendahulunya yakni dengan mengusulkan untuk melebur saja partai-partai politik yang sealiran menjadi satu kelompok saja. Demikianlah akhirnya gagasan tahun 1971 di Pasar Klewer (Solo) tersebut berhasil terjustifikasi lewat UU No. 5/1975 tentang partai-partai politik yang semula dalam pemilu 1971 berjumlah sepuluh buah yaitu IPKI, Partai Murba, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Golkar, NU, PNI, Permusi dan Perti berhasil di simplementasi menjadi tiga yaitu PPP, Golkar dan PDI. Dengan demikian praktis, partai politik sebagai tiang legalitas sebuah sistem politik demokrasi pada masa demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila kurang memainkan peranan yang berarti sebagaimana seharusnya fungsi partai politik. Sebab figur Soekarno bagi demokrasi terpimpin maupun figur Soeharto bagi demokrasi Pancasila masih tetap menjadi personifikasi yang amat menentukan bagi terlaksananya mekanisme demokrasi masing-masing corak tersebut.

Variabel kedua adalah soal kebebasan pers. Kendati mereka, Soekarno dan Soeharto menyadari bahwa kebebasan pers atau mengeluarkan pendapat adalah elemen terpenting bagi berkembangnya proses demokrasi, tapi dua-duanya masing menekankan aspek *controlling* (pengawasan) yang berlebihan, sehingga tidak mengherankan jikalau perkembangan pers dikontrol sedemikian ketat. Pers pada masa Soekarno, dikenal sebagai alat revolusi nasakom (Tap MPRS No II/MPR/1960) esensinya tidak jauh berbeda dengan masa Soeharto di mana pers pada masa ini harus diarahkan sebagai penyebar informasi pembangunan dan tegaknya wibawa ideologi Pancasila (UU pokok

Pers tanggal 12 Desember 1966) dan ini berarti bahwa baik Soekarno maupun Soeharto berpegang teguh pada asumsi bahwa pers tidak boleh anti pada kemauan rezim yang berkuasa. Dengan demikian kedudukan pers sebagai institusi penyalur aspirasi opini/pendapat. Terkebiri karena pada masa Soekarno maupun Soeharto pers tidak hanya diawasi tapi harus pula dibina secara konsisten oleh pemerintah secara langsung (cq. Departemen Penerangan), agar supaya isi pemberitaan yang dilaporkan betul-betul tidak menyimpang dan harus selaras dengan kehendak penguasa. Jika hal ini di langgar akan mengakibatkan pembredeilan terhadap surat kabar/majalah yang bersangkutan. Terbukti dengan banyaknya contoh surat kabar yang harus menemui ajalnya karena alasan tidak seiring dengan garis kebijaksanaan pemerintah. *Pedoman, Indonesia Raya, Marhaen, Nusantara, Jakarta Times, Abadi, Express, Sinar Harapan, Prioritas* dan lain-lain adalah sedikit contoh yang menegaskan betapa kedua rezim tersebut amat keras dalam mengontrol ruang gerak media massa.

Kebebasan mimbar akademik pun tak banyak mengalami perubahan. Baik pada masa Soekarno maupun Soeharto dikenal pula adanya larangan-larangan berpidato/mengemukakan hasil-hasil penelitian yang berdasarkan fakta yang sebenarnya. Larangan mengajar bagi beberapa dosen perguruan tinggi antara lain di Bandung, Medan, Jember, Jakarta tanpa alasan kecuali bahwa mereka tidak sesuai dengan revolusi/pembangunan, anti manipol dan sebagainya adalah bukti sejarah yang tidak mudah dihapuskan. Pendek kata, sebenarnya pada masa Soekarno dan Soeharto kini, suasana telah diusahakan oleh pihak penguasa sedemikian rupa sehingga ketakutan. Sifat menyesuaikan diri, malah mengiyakan saja apa yang dikatakan penguasa tumbuh dengan subur. Tanpa ada lagi kekuatan yang mampu memperbaiki.

Manifestasi kebudayaan (Manikebu) yang dilancarkan oleh kalangan cendekiawan dan sastrawan sebagai reaksi atas Manipolnya Soekarno memberikan isyarat bahwa konsep-konsep alternatif terhadap pemecahan masalah sangat sulit diharapkan untuk bisa diterima oleh pihak penguasa. Terbukti kemudian banyak diantara penandatanganan manifestasi tersebut harus diamankan untuk sementara oleh pihak keamanan dari sel tahanan. Pada masa Soekarno memberikan reaksi negatif terhadap setiap keputusan politik sudah dapat dipastikan bahwa mereka membuka pintu bagi dirinya untuk dituduh sebagai pengganggu

atau penghambat jalannya revolusi. Sekarang kondisi itupun seolah telah melembaga secara kuat, kendati tidak terwujud seperti manifestasi-manifestasi, kini terhadap pernyataan-pernyataan keprihatinan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan pengkritik pemerintah seperti LSM-LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Petisi-petisi Group, organisasi-organisasi pembela hak-hak asasi dan lain-lain juga sering mengalami nasib serupa dengan masa Soekarno. Metode Cekal (cegah tangkal) yang dilakukan oleh penguasa masa sekarang ini terhadap banyak kaum cerdas pandai juga semakin memperjelas pengamatan kita bahwa ruang menyuarakan nurani kebenaran ilmiah secara terus terang pun di dunia luar juga mengalami kesulitan kesulitan. Dalam situasi yang demikian ini sangat sulit diharapkan adanya dialog/tukar pikiran yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Sehingga praktis yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Sehingga praktis meskipun ada dialog tapi kenyataan dialog tersebut hanya sekedar formalitas, yang terjadi di lapangan adalah justru monolog dalam mana dialog yang dilakukan digiring sebagai sarana pemberian-pemberian pemahaman-pemahaman agar rakyat tahu maksud pemerintah dan nyaris tukar pikiran yang dimaksud hanya dilakukan satu arah (*one way*).

Variabel ketiga, oposisi sebagai kekuatan pengimbang sama-sama tidak diakui keberadaannya. Kekuatan-kekuatan di luar pemerintah harus bisa menempatkan diri mereka bukan sebagai rival tapi harus sebagai mitra (*opponent*) dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, mekanisme siapa mengawasi siapa tidak banyak memperoleh peluang untuk menjalankan misinya. Negara demokrasi menurut mereka adalah negara kekeluargaan, sehingga harus ada kepala keluarga yang bertanggung jawab dan berkuasa penuh atas keluarga tersebut. Baik Soekarno maupun Soeharto adalah personifikasi kepala keluarga sebuah rumah tangga “Indonesia”. Anggota masyarakat (yang juga sebagai anggota keluarga) tidak boleh melakukan kegiatan tanpa minta restu dan petunjuk dari seorang bapak. Bapak sebagai kekuatan sentral sebuah keluarga batih tidak boleh disepelekan. Anak yang membangkang tidak boleh dilihat sebagai oposial dalam sebuah rumah tangga, melainkan mereka harus bisa dimengerti sebagai anak yang nakal yang memerlukan pengajaran dan didikan ekstra agar tidak menjadi anak brandal yang berlebihan.

Baik Soekarno maupun Soeharto berpendapat bahwa mereka yang nakal tersebut perlu diamankan untuk sementara waktu, agar tidak mempengaruhi yang lain. Oleh sebab itu dikenal akan adanya banyak tahanan-tahanan politik yang perlu dikarantinakan. Pulau baru adalah salah satu tempatnya. Dengan langkah yang arief demikian diharapkan mereka akan sembuh dan kembali bisa hidup di tengah-tengah anggota keluarga yang lain secara baik-baik. Soemitro Djoyohadikoesoemo, Syahrir, Yusuf Muda Dalam, Subandrio, Amir Syarifuddin Prawiranegara, HR. Darsono hingga Ali Sadikin dan lain-lain adalah contoh anggota masyarakat yang masih dan pernah dikarantinakan politikan oleh penguasa pada masing-masing masyarakatnya. Dalam keadaan demikian sebenarnya tidaklah pada tempatnya berbicara tentang demokrasi. Sebab makna luhur demokrasi adalah diakuinya kepelbagian baik dalam pendapat, pikiran, sikap dan tingkah laku serta menjunjung tinggi tegaknya kebebasan sebagai pilihan hidup setiap manusia yang paling asasi.

C. Perbedaan-perbedaan Pemikiran Soekarno dan Soeharto

Soekarno dan Soeharto mempunyai dua perbedaan pemikiran yakni dalam melihat persoalan-persoalan ekonomi dan masalah-masalah politik luar negeri. Dalam perbandingan konsep pemikiran ekonomi dan politik luar negeri ini mereka tidak saja mencerminkan kelonggaran perbedaan konsep, tapi lebih daripada itu juga merefleksikan sebuah prototipe kepribadian yang amat kontras.

Pemikiran ekonomi Soekarno, hanya bisa jelas kita pahami jikalau kita merelevansikannya dengan semangat nasionalisme yang melatar belakang. Sebab menurut perspektifnya nasionalisme adalah inspirasi yang amat penting bagi tumbuhnya kesadaran akan hak milik. Bumi, tanah air dan kekayaan rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah, aktualisasi pemikiran nasionalisasi ia lakukan, demi satu tekad untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang pada gilirannya dimiliki oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat banyak. Implikasi dari langkah politik ini tentu saja demikian, berbuntut lahirnya sejumlah kecaman-kecaman pedas dari pakar-pakar ekonomi terkait upaya nasionalisasi yang justru kontra produktif dan memperburuk iklim investasi yang diharapkan datang dari pihak luar, lantaran sebuah kegamangan jangan-

jangan dalam ketidakstabilan politik di kemudian hari langkah serupa juga diperbuat oleh pemerintah Indonesia selanjutnya.

Disamping itu derap pembenahan ekonomi, belum sepenuhnya terimplementasi karena pertikaian ideologis masih banyak mewarnai situasi masa demokrasi parlementer, lebih-lebih pada demokrasi terpimpin. Praktis obsesi-obsesi yang tertuang dalam strategi-strategi pemikiran ekonominya banyak sekali menemui kegagalan. Pesan-pesan sentral yang disuarakan dalam renungan-renungannya hanya mampu melahirkan serangkaian ketidak berhasilan oleh sebab tidak diimbangi oleh pembantu-pembantu yang piawai dalam bidang restrukturisasi perekonomian negara. Bahkan pakar ekonomi Soemitro Joyohadikusumo misalnya, ia malah diasingkan karena partainya (PSI) terlibat dalam upaya pemberontakan tahun 1958, tentu ini memberi petunjuk betapa Soekarno amat terbebani dengan persoalan-persoalan yang pelik. Padahal langkah strategis penataan perekonomian adalah sangat penting, prinsip manajemen modern yakni *the right man on the right place* belum begitu populer *right man on the right*. Orientasi orang-orang yang dipilih masih dominan ke kepentingan partai, dalam arah ini akhirnya iklim perekonomian negara masih tetap suram, sebab rakyat marhaein masih dalam taraf hidup yang tak ubahnya dengan masa penjajahan.

Dalam pemahaman dwi tunggal Soekarno–Hatta tentang masalah perekonomian terdapat persepsi yang amat kontradiktif. Menurut Soekarno masalah politik harus menempati prioritas yang teratas dari pembangunan nasional dan apabila masalah politik telah selesai maka masalah ekonomi akan terselesaikan. Namun menurut Hatta justru sebaliknya, pembangunan ekonomi harus diutamakan sehingga terjadi perbaikan ekonomi bangsa dan negara. Walaupun menurut Soekarno kemerdekaan adalah sekedar jembatan emas menuju terwujudnya sila kelima dari Pancasila tapi jembatan selama lima tahun pertama kemerdekaan diperoleh, belum banyak yang bisa dilewatkan. Sistem perekonomian pada waktu itu (1945–1950) masih merupakan ekonomi perang gerilya terhadap penjajahan yaitu pemilikan yang belum jelas sebab masih banyak yang dimonopoli Belanda.

Sebagaimana dicatat dalam bagian terdahulu, jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal (1950–1959) juga sangat tidak

memungkinkan adanya pembangunan perekonomian yang berarti. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh Soekarno juga terjadi masa kini. Akibat ulah tersebut Indonesia memperoleh pula keuntungan-keuntungan finansial. Namun apa yang diperoleh tersebut juga semakin tak berarti karena kestabilan politik tidak ada. Periode 1957–1959 banyak sekali pemberontak-pemberontak separatis yang menuntut pembagian yang adil antara daerah dan pusat. Bagi Soekarno ini sebuah tantangan besar yang harus direspon super hati-hati. Maka lahirlah apa yang dinamakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rentetan dari semua itu melahirkan sejumlah jargon-jargon yang pada intinya memulangkan semua persoalan-persoalan baik ekonomi maupun politik dalam satu tangan. Dikenallah Ekonomi Terpimpin, Sosialisme Terpimpin dan Kepribadian Nasional (USDEK).

Dalam pidato 17 Agustus 1959 yang dinilai sebagai penjelasan resmi tentang Dekrit tersebut juga diungkapkan persoalan-persoalan apa yang dihadapi bangsa ini. Tentang pembentukan Dewan Perancang Nasional, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, penyelesaian Irian Barat dan lain-lain. Tak ketinggalan disinggung pula masalah ekonomi yang meliputi masalah kesejahteraan rakyat, pengawasan atas kepentingan ekonomi yang telah menjadi milik bangsa Indonesia, penolakan ekonomi liberal, pelaksanaan ekonomi terpimpin dan lain-lain. Bahkan sesuatu yang menarik, pidato yang berjudul “Penemuan kembali revolusi kita” ini diterima sebagai manifesto Politik yang kemudian diproses dalam sidang umum MPRS disahkan menjadi sebuah ketetapan No. I/MPRS/1960 tentang Garis-garis besar haluan negara. Sebagaimana isi UUD 1945 bahwa Presiden adalah pelaksana GBHN yang unik ini. Oleh Soekarno di permak lagi lewat pidato tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul baru Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan nasional (Resopim) untuk kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpinnya.

Sesuatu yang mengejutkan diulangi lagi oleh Soekarno dengan politik gunting uang di mana uang nominal Rp100,- dan Rp500,- dinilai hanya separuhnya. Begitu pula deposito di Bank sebesar Rp25.000,- ke atas dibekukan senilai hanya 10% dari nilai tukar resmi. Sementara itu Dewan Perancang Nasional yang terbentuk telah mengumumkan Rencana Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun dan tahun takwim anggaran di mulai 1 Januari 1961. Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun ini (Delapan tahun dalam istilah Jawa sama

dengan satu windu mungkin ini dijadikan alasan kenapa Soekarno memakai angka delapan tahun sebagai periode tahapannya) terdiri atas dua komponen:

Pertama, proyek-proyek A yang diharapkan langsung meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, sasaran-sasaran adalah produksi sandang dan pangan, perbaikan infra struktur, perbaikan pendidikan dan macam-macam proyek khusus. Kesemuanya mencakup 333 proyek. *Kedua*, proyek-proyek B diharapkan dapat membiayai proyek A umpamanya peningkatan sektor Pertamina dan mineral serta alokasi dana dari sektor lain untuk membiayai proyek A tersebut diatas. Proyek B meliputi minyak, karet dan lain-lain, sedang proyek A mencakup pendidikan, pekerjaan umum, transportasi, kesehatan dan keperluan-keperluan dasar lainnya.

Namun dalam perjalanan selanjutnya banyak aktifitas pembangunan perekonomian yang tak dimengerti oleh Soekarno (karena latar belakang pendidikannya) sehingga mengakibatkan kendornya pengawasan dan terjadi kemerosotan (apalagi disertai dengan pembangunan proyek-proyek mewah sebagai simbol politik pembangunan Hotel Indonesia, pembangunan gedung Canefo dan lain-lain). Setelah dikritik kalangan luas Soekarno kembali dengan sebuah jawaban kongkrit muncul sebuah kebijaksanaan ekonomi bulan Maret 1963 dengan istilah Deklarasi Ekonomi (Dekon). Konsep ini dibuat untuk memperbaiki ekonomi walaupun konsep itu sesungguhnya juga tidak begitu jelas, bahkan Dekon sebenarnya tidak akan membiarkan penyelesaian akhir dari seluruh kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Catatan serangkaian kegagalan dalam bidang perekonomian Soekarno, makin panjang hingga rencana pembangunan semesta berencana delapan tahun belum tuntas betul Soekarno tumbang dengan mewariskan jutaan dollar utang (2.400 juta US dollar) serta kemerosotan ekonomi yang amat parah.

Soeharto sebagai penggantinya adalah figur pribadi yang amat realistis. Kemiskinan masa kecilnya, memberikan bekal kesadaran yang dalam terhadap kemampuan mengapresiasi setiap rupiah nilai uang. Soeharto dalam kebijaksanaan mampu mendudukan persoalan ekonomi pada tempatnya yang layak. Bahwa ada pertalain yang ruwet antara persoalan ekonomi dan politik telah berhasil ditemukan.

Stabilisasi politik dan ekonomi dianggap sebagai hal yang tak bisa dipisah-pisahkan. Jikalau Soekarno menempatkan politik sebagai panglima, maka Soeharto justru sebaliknya menempatkan ekonomi dalam posisi prioritas tapi dengan mempertahankan kemantaban situasi sosial politik. Kebijakan tersebut dinamakan Catur Karya, Empat Tugas. Empat tugas itu antara lain meliputi, satu, memperbaiki taraf hidup rakyat terutama yang menyangkut sandang dan pangan. Kedua, mengadakan pemilihan umum. *Ketiga*, meneruskan politik luar negeri yang bebas aktif. *Keempat*, meneruskan perjuangan menentang imperialism dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Obsesinya terhadap penataan perekonomian tersebut dimungkinkan oleh sebab Soeharto berhasil merekrut orang-orang universitas sebagai tulang punggung kemana arah kebijaksanaan ekonomi akan ditiupkan. Tindakannya yang paling berani adalah mengangkat mantan pemimpin pemberontakan dan penentang gigih Soekarno, Prof. Sumitro Joyohadikusumo sebagai menteri perdagangan tahun 1968. Secara politik pengangkatan orang yang sebelumnya sangat tidak populer yang telah diasingkan sampai sesaat sebelum ia mendapat penghormatan yang demikian, dengan jelas menunjukkan bagaimana Soeharto sedang memanfaatkan program pembangunan ekonominya sebagai suatu simbol politik baru yang efektif untuk mengesahkan tindakannya yang berani. Hal ini juga menjadi ukuran dari perhatiannya dalam membangun perekonomian, agar segera pulih dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan..

Kembalinya Soemitro dan beberapa bekas muridnya Wijoyo Nitisastro, Muh. Sadly, Ali Wardhana, Emil Salim dan RADIUS Prawiro membuat tim perencana ekonomi Soeharto, jauh lebih kuat dan menakutkan dunia terutama negara-negara Barat. Bahkan pada tahun 1969 tim ini berhasil menghentikan hiperinflasi yang diwariskan Soekarno dan dengan demikian memungkinkan negara untuk menstabilisasi sistem moneter. Pada tahun yang sama ini juga dimulai tahapan penting pembangunan lima tahun (Repelita) menggantikan konsep pembangunan semesta berencana delapan tahunnya Soekarno. Iklim dunia usaha agak dilonggarkan sehingga memberikan peluang adanya investasi asing yang bisa masuk. Tentu saja pemikiran strategis ini, tak pernah kita jumpai semasa ekonomi terpimpin, sebab modal asing waktu itu senantiasa dilihat sebagai bentuk lain dari neo

imperialism yang bertujuan menyedot keuntungan sebanyak-banyaknya dan memperlak Indonesia yang berpenduduk banyak ini sebagai pasaran hasil produknya.

Akibatnya penggunaan teknologi industri maju, serta produk yang berorientasi ekspor memperlicin langkah kepada tahapan yang serba mengejar pertumbuhan dan pemerataan diabaikan. Namun begitu jauh sebelumnya, perdebatan panjang mengenai pembaharuan ini pernah dilakukan dalam sidang MPRS tahun 1966. Dalam mana menetapkan perlu adanya demokrasi ekonomi, yang berbeda dengan sistem *free fight* liberalism yang menjurus pada eksploitasi orang dan bangsa lain dan juga tak sama dengan sistem etatisme di mana negara dan aparat ekonomi negara menguasai sepenuhnya dan menekan serta mematikan daya dan kekuatan kreatif dari satuan-satuan ekonomi yang berada diluar sektor negara.

Warisan hutang luar negeri yang begitu banyak tersebut, tak bisa dipecahkan dengan sempurna dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Soeharto ada empat hal yang perlu diperhatikan: *pertama*, harus bisa dijalankan peranan yang tepat pada kekuatan-kekuatan ekonomi (*market forces*) maka pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama dan lebih luas lagi kepada semua tenaga-tenaga kreatif baik negara maupun swasta, dalam maupun luar negeri, untuk mengambil bagian dalam menunjukkan ekonomi Indonesia. *Kedua*, pemerintah akan menciptakan anggaran seimbang. *Ketiga*, akan dijalankan suatu pengkreditan yang ketat, tetapi dapat dikendalikan dengan baik, dengan menggunakan sistem perbankan. Empat akan menciptakan suatu hubungan yang sempurna antara ekonomi dalam negeri dan dunia internasional, melalui suatu nilai pertukaran uang yang relatif stabil, dengan begitu membangkitkan satu dorongan untuk membalikkan arus yang menurun dari neraca pembayaran.

Selanjutnya Soeharto mengumumkan serangkaian peraturan-peraturan yang bertujuan merangsang PMA, mengekang inflasi memperkecil pengawasan pemerintah dan nilai-nilai yang semua bermuara pada terciptanya anggaran belanja yang berimbang. Proyek mercusura yang tidak ekonomis dan proyek-proyek prestise dalam rezim lama dihapuskan. Tindakan-tindakan luar biasa Soeharto dan para pembantunya tersebut akhirnya menunjukkan hasil dengan menekan

inflasi dari 650% menjadi 4,24% tahun 1969. Soeharto orang yang penuh dedikasi tersebut telah memindahkan tongkat komando militer ke tongkat komando ekonomi.

Betapapun begitu kritik terhadap kebijaksanaannya tak juga lenyap. Proyek TMII (Taman Mini Indonesia Indah) misalnya dikemas sebagai proyek pemborosan sebab dibangun tatkala kita baru sembuh dari luka yang parah serta saat-saat Soeharto menginstruksikan hidup mengencangkan ikat pinggang. Longgarnya peraturan PMA juga menggiring tingkat penggunaan industri padat modal makin besar sementara tenaga kerja yang diserap amat sedikit sehingga laju industri tak banyak diimbangi oleh lajunya penyerapan tenaga kerja. Praktik monopoli keluarga Cendana terhadap berbagai bidang usaha juga banyak dilontarkan, begitu pula penanganan terhadap penyimpangan masalah pertanian lebih banyak didiamkan karena menyangkat kolega-koleganya sendiri. Kasus Pertamina, tata niaga cengkeh, jeruk dan kasus bank Duta agaknya dilihat oleh Soeharto sebagai pernik-pernik variasi gangguan yang berskala kecil, karena tak banyak mempengaruhi kestabilan ekonomi yang telah dibangunnya.

Terhadap masalah bantuan luar negeri bagi Soekarno dan Soeharto memang tak bisa disamakan. *Go to hell with American aid*-nya Soekarno amat berbeda dengan pemutusan hubungan bantuan ekonomi dengan Belandannya Soeharto. Soekarno mengacuh tak acuhkan bantuan luar negeri seraya dilanjutkan dengan langkah-langkah yang amat destruktif. Sebab dengan keluar dari PBB membuat organisasi tandingan, membentuk model olimpiade sendiri, jelas amat merugikan serangkaian kerja sangat penting dari negara-negara Barat lainnya dan Indonesia makin terkucil. Sementara Soeharto lain, pemutusan bantuan ekonomi dengan kelompok IGGI (dalam hal ini Belanda) tidak berarti memutuskan segala ikatan kerja sama yang lain tetapi lebih berupa pada penegasan akan jati diri kita sebagai bangsa yang merdeka, dan tak perlu digurui dengan persoalan-persoalan yang kita sadari sudah dimengerti dan dipahami. Bantuan ekonomi adalah bantuan untuk ekonomi, ia tak boleh dicampuri dengan syarat-syarat politik yang merugikan. Ini yang menjadi landasan. Seiring dengan itu Indonesia tetap berasumsi bahwa menjalin kerja sama dalam rangka persahabatan dengan negara-negara didunia tetap hal yang utama.

Catatan yang kedua adalah menyangkut pemikiran tentang politik luar negeri. Penampangan spektrum politik luar negeri diantara dua pribadi ini jelas-jelas menunjukkan satu pertalian yang amat paradoksal. Soekarno dengan langgamnya yang amat agresif, bergaya dalam pentas politik internasional dengan petualangan politik yang penuh sensasional. Tidak mengherankan jikalau karakteristik kepribadiannya yang demikian tadi, turut memberi corak atas peran politik bagaimana yang hendak dimainkan figur si Putera Fajar ini. Keteguhan atas komitmen awalnya tahun 1920-an tentang perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme tetap ia pegang kuat-kuat seperti halnya konsep Nekolim yakni Neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme. Nekolim tahun 1960-an versi lain dari apa yang pernah di gariskan pada masa awal-awal terjunnya ia dalam pentas politik. Kalau dulu ia ingin mengenyahkan bentuk fisik secara profan namun sekarang adalah melenyapkan format imperialisme dalam bentuk dominasi-dominasi hegemoni politik dan ekonomi. Obsesi tersebut tampak terang sewaktu demokrasi dipimpin sedang jaya-jayanya. Memang harus diakui jikalau konsep pemikiran politik luar negeri Soekarno meriah berkibar pada masa terakhir tadi, sebab pada periode sebelumnya peluang untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran politik luar negerinya tak banyak menemui jalan, dan praktis serangkaian gagasan-gagasan terbentur lewat angka bentuk kecaman belaka.

Menurut Soekarno, ada tiga kelompok yang amat kuat pengaruhnya dalam bidang ekonomi yang harus diwaspadai didunia ini. Yaitu kelompok ekonomi Amerika dengan anggota Eropa dan Afrika. Serta yang ketiga kelompok ekonomi Cina dengan pengaruh Asia dan Australia. Antisipasi yang amat apriori inilah yang kemudian melahirkan serangkaian jawaban-jawaban riil sehingga muncul gagasan-gagasan politik luar negeri Indonesia yang amat eksklusif. Kenyataan-kenyataan ini tentu saja didukung oleh sejumlah fakta, bahwa dunia menurutnya telah terpilah-pilah akibat persaingan pengaruh ideologis. Ideologi demokrasi disatu pihak berbenturan dengan pengaruh ideologi komunis Soviet dan ideologi komunis Cina dilain pihak. Soekarno yang mengklaim dirinya sebagai warga dunia dan pemimpin bangsa Asia Afrika yang baru bangkit tentu dengan dukungan arroganisme tak mau juga ketinggalan. Berbekal pengalaman sebagai ketua KAA tahun 1955, proyek ambisius Soekarno kian tak terkendali lagi. Setelah mempelopori

berdirinya gerakan Non Blok tahun 1961, dalam forum yang sama ia juga mengkritik doktrin ortodok. Gerakan Non Blok itu sendiri dalam mana merupakan pencerminan pandangan konservatif Jawaharlal Nehru, Naser dan Tito. Menurut mereka GNB sudah merupakan jawaban yang tepat bagi persaingan perang dingin antara Amerika dan Soviet. Namun menurut Soekarno tidak hanya sebatas perjuangan ideologi dan senjata nuklir dua adi kuasa saja, ancaman tersebut. Melainkan lebih dari pada itu. Ada konflik lain Soekarno menambahkan, yaitu konflik antara kekuatan yang baru bangkit dan kekuatan dominan yang lama yang satu mendorong kepalanya tanpa belas kasihan melalui lapisan bumi yang telah memberinya darah kehidupan, sedang yang lain berjuang tanpa lelah untuk mempertahankan semua yang ia dapat coba guna menahan jalannya sejarah. Pandangan konvensional non blok selama ini mendasarkan ciri pada asumsi bahwa negara-negara pasca kolonial yang bertindak sebagai kekuatan ketiga, tak hanya menghindari dari lilitan gurita perang dingin tetapi juga akan berperan sebagai sarana konsolidasi dan mediasi yang mampu meredakan ketegangan internasional. Tapi dalam pikiran Soekarno hal tersebut amatlah muskil karena sistem internasional dalam penafsiran Soekarno merupakan dua pihak yang menggambarkan semua konflik endemik antara keadilan dan ketidakadilan tanpa adanya kemungkinan untuk hidup berdampingan.

Sebab itu perlu ada revisi, dunia yang secara politik menurutnya terbagi atas kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit (*New Emerging Forces–Nefos*) dan kekuatan-kekuatan lama yang telah mapan (*Old Established Forces–Oldefos*) yang pertama meliputi bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin dan yang kedua adalah yang mencakup negara-negara sosialis di tambah negara progresif kapitalis. Indonesia progresif dinamis yang militan ditugasi sejarah untuk melawan dan mengacaukan kekuatan penindas. Dan lebih daripada itu Soekarno juga menuntut peranan penting dalam konstelasi internasional dan berusaha menyokong tuntutan ini melalui kunjungan kenegaraan dan peristiwa internasional lainnya. Demikianlah akhirnya Nefos ini melembaga yang melahirkan satu kesepakatan menampilkan jati dirinya dalam bentuk Ganefo (*Games of Emerging Forces*) yang diselenggarakan November '63 di Jakarta. Hal mana sebetulnya adalah event tandingan terhadap Asian Games. Sebagai kelanjutannya dibentuk pula Canefo (*The Conference of the New Emerging Forces*), sebagai penjabatan lebih jauh dari GNB. Dengan

konsep pemikiran semacam ini sebetulnya Soekarno telah berhasil menentang arus pemikiran yang berkembang saat itu yang membagi dunia dalam blok Timur dan blok Barat menjadi Oldefos dan Nefos.

Namun begitu harus diakui bahwa dalam periode Soekarno juga terjadi pengebirian atas doktrin politik luar negeri bebas aktif. Peneguhan atas penilaian ini tampak sekali dalam bagaimana Soekarno membangun hubungan multilateral yang agak ke kiri dengan poros Jakarta–Pnompenh–Pyongyang–dan peking. Akibatnya tentu saja berimplikasi bahwa ini merupakan langkah yang merugikan kepentingan bangsa karena arus ideologi komunis deras mengalir ke Indonesia. Koeksistensi hidup damai yang dirindukan tercoreng pula oleh ketersigungan diri yang meletup, akibat tuduhan tak beralasan Malaysia dalam masalah pemberontakan di Brunei Desember 1962. Lebih daripada itu sebenarnya Soekarno juga menilai bahwa perjuangan rakyat Serawak, Brunei dan Sabah adalah membenci penghisapan manusia atas manusia. Tanggung jawab tampak teruji disini. Dalam hal lain dengan Malaysia juga diabaikan oleh kecemburuan diterimanya Malaysia sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, yang mana dinilai sebagai hasil sokongan Inggris dan Amerika. Di mata Soekarno dua negara ini tak lebih dari kaum imperialis modern yang ingin memakai tangan Tungku Abdul Rahman untuk menghisap negara-negara lain disekitarnya. Kampanye ganyang Malaysia ini menjadi mungkin, oleh karena adanya realokasi kekuatan setelah Soekarno berhasil menyelesaikan pengembalian Irian Barat secara tuntas tahun 1963. Perjuangan konsep politik luar negeri belum sempat sepenuhnya terealisasi Soekarno harus menelan pil kegetiran akibat tersingkirnya ia dari panggung kekuatan.

Sebagaimana telah disinggung dimuka, Soeharto dalam garis pemikiran politik luar negerinya memang amat kontras dengan Soekarno pendahulunya. Bekal pengalaman yang sangat minim terhadap masalah-masalah internasional seolah memaksa Soeharto harus tampil lebih moderat dan mengekang diri. Politik Soeharto terkenal begitu sederhana dan terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang sangat mendesak. Soeharto juga tidak pernah menyatakan keinginannya untuk dipanggil sebagai pemimpin dari dunia ketiga dan lebih-lebih sebagai pemimpin dari kekuatan-kekuatan yang sedang muncul (Nefos). Pengendalian diri yang sungguh-sungguh ini secara jujur telah

membikannya dihormatidan dihargai oleh negarawan-negarawan dan rakyat-rakyat seluruh dunia.

Soeharto sadar betul bahwa pada masa-masa lalu telah terjadi penyimpangan terhadap ajaran politik luar negeri yang digariskan oleh UUD 1945. Dalam kondisi seperti itulah Soeharto hadir untuk meluruskan kembali praktik pemikiran politik luar negeri yang bebas aktif pada rel yang sebenarnya. Kendati demikian ketika arah kebijakannya diterpa isu penerimaan isu penerimaan bantuan luar negeri yang hampir seluruhnya berasal dari Barat, semakin menyemarakkan kritikan bahwa Indonesia di bawah Soeharto telah menyeleweng dan digiring ke arah kapitalisme liberal. Namun demikian kecaman itupun di balas bahwa Jakarta mempunyai hak untuk menerima pinjaman-pinjaman dan bantuan dari manapun dan dari lembaga-lembaga keuangan internasional selama tidak mengikat secara militer dan politik.

Catatan penting politik luar negeri masa Soeharto memang tak banyak gagasan spektakuler yang bisa ditawarkan dalam percaturan politik dunia. Hampir (kalaupun ada) hal-hal spesifik yang dikerjakan tak lain hanya merupakan tindak lanjut atautkah rekoreksi belaka. Taruhlah misalnya ASEAN yang berdiri tahun 1967 dengan Adam Malik Menlunya sebagai motor hanyalah merupakan pengembangan versi lebih luas dari apa yang disebut konfederasi Maphilindo tahun 1963 (doktrin Manila) yang berintikan pentingnya menjalin usaha kerjasama regional tanpa campur tangan negara-negara besar, sehingga dengan demikian dapat bekerja ke arah pembangunan satu zona netral di daerah Asia Tenggara. Bukankah konsep Zophon yang dihasilkan dalam pertemuan para menlu ASEAN tahun 1971 juga mencakup item itu juga? Pembekuan hubungan diplomatik dengan Cina juga cukup dinilai sebagai adanya follow up dari apa yang disebut pembersihan secara total anasir-anasir Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI. Praktis dilihat dari lensa romantika petualangan politik, politik luar negeri dibawah Soeharto kurang sensasional dan emosional. Inilah yang membuat lega dan tentram tidak hanya tetangga-tetangga Indonesia dan dunia, tetapi juga oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang telah menjadi korban dari satu politik negeri sebuah rezim lama yang penuh dengan petualangan dan kekeruhan.

Aksentuasi pemikiran politik luar negeri Soeharto lebih banyak berorientasi untuk menjalin persahabatan di dunia atas dasar keuntungan bersama, saling harga menghargai dan saling hormat menghormati tanpa campur tangan dalam urusan negara masing-masing. Dalam pemahaman yang demikian ini, Soeharto menegaskan bahwa, politik luar negeri yang bebas aktif tidak menerima penggabungan satu sama lain, dan tidak juga dengan fakta-fakta militer yang saling bertentangan, dan keyakinan agama. Tanpa mengabaikan masalah-masalah kolonialisme, apartheid, politik kuasa-kuasa besar dan perbedaan-perbedaan yang ada antara negara-negara non blok, Soeharto menandakan agar masalah bersama yang dihadapi dapat diselesaikan dengan penuh pengertian dan cara-cara damai.

Pemahaman akan ko eksistensi yang penuh perdamaian inilah yang hadir secara menyeluruh mewarnai corak garis pemikiran politik luar negeri Indonesia. Penampangan spektrum politik luar negerinya banyak dilihat dari pidato-pidato Soeharto yang amat mengedepankan kesetiakawanan dan perasaan sentimental . Soeharto juga sedang mencitrakan diri, agar Indonesia dibawah kendalinya tidak terkesan ekspansionis.

Dalam hal penanganan masalah Timor-Timor misalnya Soeharto terkesan amat berhati-hati sekali, agar masalah tersebut bisa dilihat oleh negara anggota ASEAN sebagai masalah kemanan domestik. Sekaligus ingin memberi pesan kepada negara tetangganya bahwa Indonesia bukanlah negara yang haus wilayah negara lain. Tidak mengherankan jikalau operasi militer yang dijalankan sukarelawan Indonesia ingin dikesankan sebagai aksi untuk membantu saudara-saudara membantu saudara-saudara sesama manusia keluar dari kemelut dekolonisasi Portugal. Walaupun masalah sensitif ini belum sepenuhnya tertuntaskan dalam masa lima belas tahun perjalanan integrasinya di forum PBB berambisi keras ingin memperbaiki citra buruknya ini dengan langkah-langkah perdamaian bagi penyelesaian konflik disekelilingnya. Jakarta informal Meeting (JIM), kesediaan mengirim pasukan untuk kepentingan operasi PBB serta tindakan-tindakan ingin menjadi mediator penyelesaian kepulauan Parcel dan Spratley di laut Cina Selatan, umumnya lebih bisa diterjemahkan dalam korelasinya dengan prestasi luar negeri yang ingin lebih mengutamakan upaya-upaya perdamaian.

Betapapun pandangan filosofis jawanya yang mengakar kuat bahwa ia adalah sebuah mikrokosmos bagian dari makromos yang ingin menyelaraskan antara kepentingan dunia yang profan dan kepentingan diatas yang berbau spiritual dan transendental, tapi sesuatu yang mengganggu kedaulatan negara harus diutamakan. *Sedumuk batuh, senyari bumu, pehing dada wutahing ludiro mati sun lakoni* yang berarti kalau seorang dihina dan tersinggung perasaannya dan warisan dari leluhurnya diganggu, maka akan dibela sampai titik darah yang penghabisan. Inilah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa lain yang ada dalam pembukaan UUD 1945 sebagai semangat cita-cita nasional yang kuat ia pegang dalam aktualisasi politik luar negeri. Kemampuannya memilih pembantu-pembantu handal dalam masalah-masalah internasional inilah yang mampu menghapus suatu anggapan umum bahwa Indonesia di bawah Soeharto miskin pengalaman politik luar negeri akan tidak dihiraukan dalam for a internasional. Meski dalam langgam jawa yang amat *low profile* tanpa retorika yang meletup-letup, Indonesia mau tak mau telah diakui paling tidak dikawasan regional ASEAN sebagai pemegang peranan penting dalam masalah-masalah internasional, bahkan dalam akhir kepemimpinannya yang keempat dunia mempercayainya sebagai ketua Gerakan Non Blok dalam KTT GNB 1-6 September 1992 di Jakarta untuk tiga tahun mendatang.

D. Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto Dalam Dichotomi Tradisional dan Modern

Sungguh tak bisa dielaki jikalau latar belakang pendidikan dua tokoh ini amat patut dipertimbangkan sebagai referensi. Kekuatan pemikiran sekaligus keberhasilan politik Soekarno, sebagian penting terletak pada kemampuannya melihat realita dan menyelami jiwa masyarakatnya secara tajam. Kejadian ini memang tak bisa terlepas dari pendidikan yang diperolehnya. Dari segi pendidikan tinggi, secara formil ia menekuni serta mendalami ilmu-ilmu pasti (Sekolah Tinggi Teknik-Tehnische Hoogeschool di Bandung). Corak pendidikan Barat yang demikian ini tak memungkinkannya mengenal lebih jauh dibangku kuliah segi-segi politik, ekonomi, sosial, sastra, kebudayaan dan lain-lain dari Eropa. Sehingga pengetahuan tentang semua itu ia peroleh secara otodidak. Selain itu pula ia tidak pernah bersekolah atau berkunjung ke

Eropa (Belanda) selama zaman kolonial. Selama studi baik di Surabaya maupun di Bandung ia senantiasa tinggal di rumah-rumah para tokoh perintis kemerdekaan antara lain Tjokroaminoto, seorang tokoh yang kemudian hari banyak menyumbang andil dalam kematangan pemikiran-pemikiran politiknya. Semua itu memberi petunjuk bahwa ia lebih banyak mengetahui keadaan atau realitas masyarakatnya dari pada orang Eropa. Ia juga salah seorang dari enam mahasiswa pribumi (Hindia Belanda) yang berhasil duduk di Sekolah Tinggi Teknik tersebut. Dalam masa ini pula petualangannya dengan penulis-penulis besar Eropa sudah kian merasuk. Karya-karya Bauer, Brailsford, Engels, Jaures, Kautsky, Marx dan Troelstra sudah menjadi bacaan yang amat disukai. Dalam lilitan situasi sosial yang masih kuat diikat ketradisionalan Jawa, Soekarno telah banyak mengawali kiatnya dengan obsesi-obsesi modernitas yang acap kali bingung ditanggapi lingkungan eksternalnya.

Gagasan-gagasan spektakulernya ibarat pijaran api yang amat sulit dipahami akan memerangi apa. Ide sintetis Nasionalis, Islamisme dan Marxisme misalnya sungguh suatu yang sukar dimengerti sebagai sebuah ide yang bisa diterima secara umum. Konsekwensi sampai akhir hayatnya ide yang cemerlang tersebut belum juga mampu terimplementasi secara utuh. Dalam klasifikasi pemisahan nilai tradisional-modern inilah Soekarno amat terkesan sebagai sosok yang berhasil keluar dari ikatan primordial sempit menuju situasi non primordial dengan melepaskan diri dari keterkungkungan tradisional Jawa sekaligus karya-karya pujangga agungnya sekitar kraton. Keterkaitan terhadap lingkungan yang lebih luas serta merta menjadi keinginannya yang paling menonjol. Dalam mana sesuatu bangsa harus dilihat sebagai bagian dari warga dunia yang bisa melintasi batas-batas negara dalam kemampuan menawarkan ide. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keangkuan Soekarno mempertahankan konsistensi paradigma berpikir ini secara keras. Konsep Nasakom misalnya adalah sebuah butiran hasil kontemplasi berpikir yang sudah terlanjur ditawarkan sejak usia muda hingga titik akhir hidupnya tanpa mau dikompromi sedikitpun. Kepada Soeharto, Soekarno pernah berkata: “Har, saya ini sudah diakui sebagai pemimpin dunia, konsep Nasakom sudah saya jual kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Sekarang saya harus membubarkan PKI di mana, Har saya harus menyembunyikan muka saya”.

Berbeda dengan Soeharto, perjalanan usia hidupnya memang tidak segemilang Soekarno. Soeharto dibesarkan dalam keluarga broken home, pas-pasan dan bukan dari golongan ningrat. Masa mudanya banyak dilewati dengan semangat ketekunan ajaran orang tuanya. Tak heran jikalau dunia (sebelum jadi Presiden) baginya terlimitasi dalam sebuah keagungan akan falsafah-falsafah hidup yang berasal dari karya-karya besar pujangga kraton. Dominasi letusan pemikirannya amat sarat dengan istilah-istilah seputar Serat Centini (oleh Sri Susuhunan V) yang memuat dialog-dialog dalam mana diungkapkan pandangan, sikap, serta ajaran mengenai hidup manusia, hubungannya dengan diri sendiri, dengan sesama, hubungan suami istri dan mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, Joko Londhang dan Kalatida, buku yang ditulis R. Ng. Ronggowarsito. Nitisastro (zaman Surakarta), Suluk Sela (zaman Demak), Wedhatama atau Serat Wedhatama Karya Mangkunegara IV, Wulangreh serta karya-karya Pangeran Samber Nyawa.

Dari dua karya tulisnya, butir-butir Budaya Jawa Hanggayuh Kasampurnaning Hurip, Berbudi Bawa Leksana Ngudi Sejatining Becik (1987) serta oto biografinya Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (1989), tidak lain hampir sebagian besar berisi dengan sejumlah kompilasi kutipan-kutipan kata-kata filosofis orang-orang sekitar kraton. Cipta hening misalnya yang berarti pikiran yang jernih bersih adalah nama yang diberikan Arjuna, ketika Arjuna sedang bertapa dibukit Indra Kila. Kisah ini ia dapatkan sekitar tahun 1030 pada zaman Erlangga Raja dari kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Demikian pula zaman Jayabaya yang dikenal sebagai Zaman Kencana I, dalam mana berhasil menghasilkan dua pujangga besar Empu Panuluh dengan karya klasiknya Naskah Baratayudha tidak luput sebagai salah satu sumber inspirasi serta referensi dan pemikiran-pemikiran yang ia paparkan akhir-akhir ini.

Petikan-petikan pemikiran dari zaman pra modern (zaman Jayabaya yang mistik) hingga zaman Islam Demak seolah mendaulat kiblat pemikiran Soeharto demikian kerasnya sehingga dalam pembagian anasir dichotomy tradisional modern, amatlah akurat jikalau ia dimasukkan dalam kriteria primodialistik dan terkesan agak tertutup dengan penelaahan karya-karya Barat yang liberalis-sosialis. Ini bukti bahwa pandangan-pandangan serta pemikiran-pemikiran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, kerohanian, kebangsaan, kekeluargaan dan kebendaan baik dalam bagian pituduh (*Guidance*) maupun wowaler (*Prohibitions*) tak

satupun terkatip dari sumber barat. Semuanya ia gali dari ajaran leluhur sebagai bagian tak terpisahkan dari serangkaian pengalaman hidupnya. Dengan demikian amatlah bisa dipahami jikalau semua cetusan pemikiran yang sempat terlantar sarat dengan makna-makna yang setiap orang perlu barang sementara waktu untuk mengertinya.

Fanatisme terhadap model musyawarah mufakat sebagai ciri demokrasi Pancasila kukuh ia pertahankan dalam mana mengabaikan alternatif lain (*Votting*) dalam sistem pengambilan keputusan betapapun hal tersebut konstitusional juga. Dalam hal ini ia amat tertutup untuk bisa segera menerima langgam pengambilan keputusan diluar kepribadian khas Indonesia. Trade mark musyawarah mufakat seakan sesuatu pilihan yang tak mudah ditawar-tawar. Persepsi terhadap decision making pemungutan suara, ia kecam sebagai bukti kurang mampu menciptakan mufakat lewat musyawarah dalam mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat dan kesanggupan mengorbankan kepentingan dari dan golongan untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar terutama kepentingan bangsa dan negara. Dalam session ini kemiripan dengan Soekarno memang ada. Tatkala ideologi Pancasila diajukan sebagai dasar negara Indonesia, Soekarno juga mengecam Ki Bagoes Hadikoesomo yang kukuh mempertahankan ide golongannya (Islam) dengan tak mau memperdulikan hak hidup golongan non Islam. Di mana letak dan pengorbanan diri sekelompok orang demi kepentingan negara dan bangsa? Soekarno menanyakan.

Proyek Mercusuar sebagai aktualisasi petualangan politik luar negeri Soekarno dinilai Soeharto sebagai proyek-proyek prestisius dan tidak ekonomis. Berlawanan dengan sifat khas Soeharto yang realistik dan pragmatis, penuh dengan pertimbangan dalam mana sebagai garis yang menuntun semua aktifitasnya. Lebih daripada itu kemiskinan masa kecilnya amat memberikan suatu keinsyafan yang dalam bagaimana menghargai uang untuk kepentingan yang tak ada gunanya. Ia tahu menghargai bagaimana besarnya nilai sekeping uang yang sudah didapatkannya. Dan tak pernah ia mempunyai seorang dermawan yang kaya raya, keluarga yang mampu atau teman-teman yang mau mengongkosinya, setelah ia meninggalkan sekolah menengah pertama, keluarganya tak mampu mengeluarkan dasar pijakan terbentuknya kepribadian politik Soeharto yang lugas fleksibel, penuh perhitungan dan kehati-hatian.

Apa yang terungkap dalam lintasan waktu dikemudian hari juga banyak diwarnai oleh persoalan-persoalan disepertaran ekonomi. Jarang bisa ditemui pidato Soeharto tanpa mempersoalkan masalah-masalah ekonomi, mempersoalkan masalah-masalah keuangan negara yang rumit sampai-sampai masalah ongkos naik becak. Pidato-pidatonya penuh dengan data-data ekonomi dan statistik yang sederhana sekalipun suram sungguh suatu pengungkapan yang amat membosankan bagi sidang masyarakat pendengar. Dalam segi ini Soeharto memang bukan seorang orator yang dapat membangkitkan semangat, hal mana sesuatu yang kontras dengan Soekarno. Sebab itu bagaimanapun Soeharto harus mampu menemukan cara-cara lain untuk berkomunikasi dengan rakyat. Saluran-saluran itu ia temukan lewat alat komunikasi semacam partai politik, pers, organisasi-organisasi sosial atau profesional lainnya dan temu langsung dengan rakyat.

Keberhasilan atau kegagalan Soeharto dalam bidang ekonomi sebagaimana juga akan ikut menentukan bagaimana sikap rakyat, sampai sejauh ini ia telah berhasil melegitimasi sebagian besar langkah-langkah politiknya dengan menggunakan hal-hal yang dicapai dalam bidang ekonomi. Mungkin ini juga merupakan salah satu dari beberapa bidang di mana dapat ditarik garis perbedaan yang tajam antara Soeharto dan pendahulunya Soekarno. Soekarno dalam serangkaian masa berkuasanya lebih menonjolkan obsesi kepuasan dibidang petualangan politik sehingga slogan politik sebagai panglima berkibar di mana-mana. Sementara Soeharto orang yang berkarakter low profile ini lebih mengedepankan serangkaian kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang ekonomi moneter guna menciptakan Indonesia yang penuh dengan kemantapan dibidang ini. Bidang lain mungkin adalah kenyataan di mana Soeharto mempunyai militer (ABRI) dari Golkar sebagai dasar kekuatan politik, sedang Soekarno tidak pernah mengandalkan organisasi sosial/politik tertentu sebagai landasan pendukung utama.

Dalam hubungan sistem nilai yang dianut tampak sekali bahwa Soekarno, masih terlampau percaya akan sebuah kekuatan mitos bahwa dia adalah sosok pribadi yang memang pernah diwangsitkan oleh ibunya akan menjadi pemimpin besar suatu bangsa, tak perlu mencarinya. Karena itu ia senantiasa dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa dirinya adalah pengayom, pelindung. Seorang bapak yang harus melindungi anak-anaknya. Atas dasar itu pula pijakan

terhadap salah satu kekuatan politik tak banyak diacuhkan, karena semua golongan pasti menerimanya sebagai pemimpin. Hal yang tentu saja berbeda dengan kepribadian Soeharto, betapapun ia naik ke panggung kekuasaan karena memperoleh dewi fortuna, ia amat sadar jikalau pada masa kecilnya tidak diwangisitkan sebagai pemimpin, tentu saja ini memberi dasar ia harus banyak bersikap hati-hati dan waspada terhadap kelompok-kelompok orang yang kurang senang atas sukses politiknya tersebut.

Ia menghadapi semua masalah-masalah itu dengan berpegang pada prinsip yang dapat menciptakan konsensus antara pihak-pihak dan kepentingan-kepentingan yang bersaing. Lebih banyak terdapat musyawarah dalam gaya kepemimpinan Soeharto daripada memperlihatkan pelaksanaan kekuasaan. Dan terutama pendekatannya secara pragmatis mengelakkan kekecewaan dan tergo-poh-gopoh drastis yang menimbulkan kekecewaan dan kritik dari orang-orang yang berkeinginan baik dan yang tidak baik. Terhadap posisi sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini Soeharto pernah mengatakan pada tahun 70 sewaktu mengadakan pertemuan dengan kalangan tokoh mahasiswa demikian: “bagi saya, kepresidenan adalah pekerjaan berat. Engkau tahu bahwa pada mulanya, saya enggan menerimanya. Saya menerimanya hanya karena rakyat mendesakkannya pada saya”.

Jelas apapun alasannya Soekarno dan Soeharto dalam penampilan pribadi serta ragam lahirnya pemikiran-pemikiran politik nampak sekali perbedaan-perbedaan dalam pertentangan nilai-nilai ketradisional dan kemodernan ini. Soekarno yang fasih dalam tujuh bahasa secara aktif dengan gelar doktor honoris causa lebih dari dua puluh buah, memang dalam pengungkapan ide-ide pemikiran tidak tetandingi oleh Soeharto. Petualangan-petualangannya dengan menyikat sebagian besar karya-karya besar awal abad ini dari penulis-penulis terkenal di dunia jelas pula memberi nilai lebih dalam mencandra bagaimana sebetulnya karakteristik si Putera Fajar ini. Sementara Soeharto adalah profile pribadi yang tenang. Betapapun ia seorang militer, senyum simpulnya senantiasa tak pernah habis ia tawarkan dalam berbagai kesempatan.

Terlepas dari perasaan suka atau tidak suka, nampaknya sangatlah sukar untuk tidak memberikan apresiasi yang tinggi kepada Soeharto bahwa sampai sekian jauh tingkah laku dan gaya politiknya telah

berhasil mengemudikan pilar-pilar politik Indonesia yang sukar diramalkan. Paling tidak ada tiga hal yang mendukung sebuah kesuksesan Soeharto. *Pertama*, Soeharto telah mampu memanfaatkan program pembangunan ekonominya sebagai suatu simbol politik baru yang efektif dan sekaligus sebagai legitimasi paling penting bagi pemerintahannya. *Kedua*, disintegrasi yang terus menerus diantara kekuatan-kekuatan politik sipil dan ABRI telah memberikan ruang dan kebebasan bergerak di bidang yang lebih luas. *Ketiga*, pendekatan jalan tengahnya, falsafah sentrismenya, yang menandainya sebagai seorang pemimpin yang lebih mengutamakan kestabilan daripada perubahan radikal, nampaknya juga telah membantu.

Mengikuti seluruh alur pembahasan diatas tentu saja penulis tidak bermaksud secara lekas menggolongkan dua pribadi ini dalam pelukan pemihakan yang sedemikian ekstrim. Secara simultan tidak bisa sepenuhnya sebuah dichotomy tradisional modern ini dijatuhkan. Sebab, kepribadian manusia yang tertimpa oleh waktu senantiasa menampilkan pasang surut yang juga tak seragam. Dalam hal pengungkapan lahirnya pemikiran-pemikiran politik tentu saja ide-ide politik Soekarno terkesan modern dan amat menyenangkan dengan istilah-istilah yang tak membosankan, Resopim, Oldefoes, Neffos, Conefo, Tahun Vivire Pericolosa (1964), Jarek, Laksana Malaikat yang menyerbu dari Langit (1960) dan lain-lain istilah yang mengundang orang untuk ingin tahu. Berbeda dengan istilah Soeharto langgam bahasanya seolah tak pernah beranjak dari itu ke itu, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, pembangunan nasional, Pancasila, GBHN dan kata-kata umum yang klise dan sangat membosankan bagi setiap orang yang Cuma sambil lalu mau mendengar.

Dengan uraian yang demikian kita kembali ke pertanyaan semula tadi apakah Soekarno lebih modern ketimbang Soeharto? Jawabannya tentu saja tidak semudah orang melihat air dalam minyak. Ada unsur-unsur tertentu yang bisa mengklasifikasikan Soekarno agak modern, hal yang sama dimiliki pula oleh Soeharto. Demikian pula terhadap Soeharto ada hal-hal tertentu yang membuat penilaian umum, Soeharto itu amat tradisional dengan keteguhan konsep-konsep kejawaan yang diwarisinya. Hal yang sama dimiliki pula oleh Soekarno karena rasa percayanya atas ceritera-ceritera mitos sebagai pemimpin rakyat di masa depan.



PENUTUP: MENEBAK TITISNYA RAMALAN

6

Mengikuti dan mencermati alur pembahasan yang telah penulis lakukan di depan, sangat terasa bahwa orisonalitas lahirnya gagasan berpikir semata-mata tidak mengandalkan kaidah metodologis tetapi intuisi politik semata. Soekarno misalnya ketika membuat keputusan Indonesia keluar dari PBB, tidak perlu pertimbangan bahwa kelak Indonesia akan terisolasi dari percaturan politik internasional. Logika seperti itu dieliminasi dari cara berpikirnya yang rasional. Ia lebih nyaman dengan intuisi sebagai penggerak keberanian di luar nalar, untuk bermain dalam wilayah *high risk* termasuk resiko dikucilkan.

Baginya, memimpin negara baru merdeka dari kolonialisme jauh lebih prestis ketimbang menjadi antek kolonialisme-imperialisme dalam baju PBB. Strategi dan komunikasi politik, terus dioptimalkan agar negara-negara baru itu merasa memiliki *dignity* atau martabat yang setara dengan negara lain. Maka sang Putra Fajar, demikian ia disebut menjelang kelahirannya mengambil inisiatif agar negara-negara Asia-Afrika bersatu untuk menunjukkan kepada dunia sebagai poros kekuatan yang harus diperhitungkan.

Keberanian dalam bermanuver dalam pentas politik internasional ataupun domestik seakan meneguhkan bahwa Soekarno adalah sosok yang ditunggu kedatangannya untuk Indonesia yang penuh mitos. Lama diyakini bahwa apa yang diramalkan oleh Jayabaya terkait datangnya sang Ratu Adil ibarat seteguk air ditengah dahaga yang berkepanjangan.

Soekarno sedang meneguhkan sebuah ramalan bahwa raja itu telah datang untuk Indonesia yang tertindas. Keyakinan itu semakin membumbung tatkala, Tjokroaminoto yang dikenal sebagai raja Jawa yang tak pernah dinobatkan (istilah Dahm) tak banyak memiliki pengaruh absolut dalam perkembangan pemikiran politik Soekarno muda, walaupun ia tetap tokoh yang mengesankan bagi Soekarno.

Kungkungan budaya Jawa tradisional yang terefleksi pada ajaran-ajaran wayang epos Mahabarata yang merakyat di hampir seluruh kalangan, tidak sedikit menanamkan sebuah kepercayaan diri akan tampilnya pemimpin yang revolusioner (sebagaimana diriwayatkan ibunya) pendobrak zaman, untuk memperlihatkan kepada rakyat sinarnya dari kemudian yang berseri-seri dan terang cuaca, beserta cara-caranya mendatangkan hari kemudian yang penuh dengan janji-janji itu.

Lompatan berpikir yang *out of the box*, membuktikan keberanian melawan arus yang jika tidak lihai dimainkan bisa melemparnya dan tercincang ibarat serpihan daging yang dilumat habis lawan-lawan politiknya. Gagasan tentang Nasakom atau Nasamar adalah ide yang bertitik tolak untuk mengusir imperialisme secara bersama-sama (gotong royong) oleh karena musuh yang dihadapi rakyat baik itu yang berhaluan nasionalis, agama (Islam) dan komunis (marxis) adalah satu bangsa-bangsa barat.

Tapi spirit perjuangan yang mendorong terciptanya kohesifitas bangsa yang plural secara ideologis, kemudian direduksi pada tataran pragmatis. Seolah-olah Soekarno sedang mengajarkan sinkretisme politik yakni menggabungkan tiga ideologi menjadi satu kesatuan yang irasional. Kebutuhan Soekarno sebagai pemimpin politik adalah menggerakkan keragaman potensi rakyat demi satu langkah perjuangan yang satu kendali, latar belakang boleh berbeda, tetapi menghadapi musuh yang notabene imperialis berwajah Barat harus satu. Kesatuan kata kunci yang harus dipahami dalam konteks kebersamaan. Paradigma berpikir yang demikian inilah yang tak banyak dipahami orang lain di luar dirinya.

Terpatri pada diri Soekarno sejak muda jika Barat adalah musuh kaum nasionalis karena menjajah. Barat diplot sebagai musuh Islam karena dianggap membawa misi Kristenisasi. Padahal Belanda politik dan misi zending itu dua hal yang berbeda. Namun terlanjur distigma

bahwa baik kaum zending maupun penjajah sama-sama orang Belanda dianggap merekapun musuh bersama. Baratpun musuh kaum komunis karena mereka datang dengan ide-ide kapitaslis.

Marhaein adalah nasionalisasi konsep proletar yang dikenal barat. Menghendaki hilangnya tiap – tiap kapitalisme dan imperialisme. Ide ide cemerlang dengan penjelasan-penjelasan yang tuntas dari Soekarno semakin memperkukuh keyakinan rakyat bahwa dialah sebenarnya sosok yang ditunggu-tunggu itu. Sehingga tatkala pemerintahan ala domkrasi parlementer ia tumbangkan dan ganti dengan model Demokrasi Terpimpin dengan Ekonomi Terpimpinnya Soekarno pun tak mendapat reaksi perlawanan yang berarti sekalipun mereka adalah kaum cerdik-cendika lulusan universitas Eropa yang ternama.

Ingatan kolektif bangsa ini kuat menempatkan Soekarno milik rakyat dan simbol persatuan di atas keragaman suku, agama, golongan, ras dan juga aliran politik. Ia juga personifikasi simbolik pengayom seluruh rakyat, miskin atau kaya, komunis atau bukan, dan apapun ideologi politik. Secara eksplisit, ia tampilkan dirinya bukan pimpinan partai politik apapun.

Sementara, Soeharto yang suksesinya merebut tampuk kekuasaan dari Soekarno masih diperdebatkan konstitusional atau inkonstusioal adalah sosok flamboyan dengan ide-ide pemikiran politik yang kering. Ia sangat lihai dalam menyembunyikan ambisi-ambisi politiknya. Kemampuan Soeharto, lebih diorientasikan kepada tendensi ke arah profesionalisme menegerial semata. Latar belakangnya yang senantiasa bergelut dengan olah keprajuritan dan memimpin anak buah selama dinas di kemiliteran, secara langsung atau tidak semakin membentuk sebagai sosok militer yang profesional dalam olah kepemimpinan organisasi. Maka jika ditelusuri lebih detil terkait perbandingan diwilayah ideologi Pancasila, ekonomi, demokrasi sampai politik luar negeri, Soeharto menurut hemat penulis, tidak satupun muncul suatu gagasan yang orisinil khas Soeharto.

Pada keempat hal tersebut, kesan publik Soeharto lebih banyak menduplikasi atau paling jauh melakukan eksplorasi terkait ide-ide lama yang sudah ada. Sesuatu yang bersifat ide orisinalitas atau inovatif, agaknya tidak terlalu menonjol. Pemikiran – pemikiran yang digagas senantiasa diupayakan untuk kembali ke sumber dasarnya.

Kemampuannya dibidang sinkretisasi dan eksprementasi amat sedikit (jikalau tak boleh dikatakan tidak ada) dalam ke empat elemen komparasi di atas.

Setiap tindakan hampir selalu dicarikan fondasi konstitusionalitatifnya. Pancasila yang termanifestasi dalam Eka Prasetia Panca Karsa menjadi obsesinya yang paling ambisius untuk dimasyarakatkan. Pengalaman pahit masa lalu seolah menjadikan ia selalu berpikir hati-hati dan penuh pertimbangan. *Yitno Yuwono leno keno* (siapa waspada akan selamat, siapa lengah akan kena bahaya). Itulah yang senantiasa ia pegang dalam setiap pergumulan dan implementasi politiknya.

Lebih daripada itu, ada kesadaran diri bahwa ia memang tampil dalam pentas politik Indonesia secara kebetulan, tidak diriwayatkan. Pelan tapi pasti perjalanan waktu memberi evaluasi, ada yang senang dan ada yang tidak. Keyakinan inilah yang dipegangnya, sehingga ia perlu memperoleh dukungan legitimasi. Pilihannya jatuh ke Golkar sebagai alat pemberi legitimasi politik sipil terbesar, sementara ikatan emosionalnya tetap ia pertahankan dengan ABRI/TNI sebagai sumber legitimasi kekuatan militer dan pegawai negeri sipil sebagai sumber legitimasi di sektor birokrasi. Dengan bertumpu pada tiga kekuatan politik tersebut secara otomatis berimplikasikan pada semakin kokohnya ia dalam mengoperanalisasikan ide-ide politik yang berorientasi pembangunan.

Dalam penilaian umum Soeharto memang berkesan sebagai pribadi developmentalis integralis sebagai ciri-ciri kemodernan di mana berbeda dengan Soekarno yang lebih mengesankan diri sebagai seorang pemikir yang *politically integrals* (orang yang cenderung mempolitisir segalanya demi sebuah cita-cita persatuan).

Kedua tokoh ini Soekarno dan Soeharto, memang kerap kali dijadikan jawaban simbolik terhadap nubuatan sosok-sosok *linuwih* (powerful) yang pantas memimpin negeri ini pada eranya masing-masing. Mengobarkan semangat nasionalisme dengan orasi yang memukau emosi publik adalah khas model komunikasi politik Soekarno. Tapi dengan cara lebih bersahaja, namun bisa membuat musuh mati langkah adalah strategi politik tingkat tinggi yang hanya dimiliki Soeharto yang terkenal dengan *'the similing general'*.

Apapun kekurangan dan kelebihan dari Soekarno yang sipil dan

Soeharto yang militer, keduanya tetap berjasa besar dalam memandu Indonesia. Kekuasaan yang begitu merangkak mereka raih, ternyata berujung antiklimaks. Keduanya justru tumbang oleh derap langkah dan teriakan histeris mahasiswa yang lantang melucuti kesalahan-kesalahan memimpin yang mereka lakukan. Mahasiswa sebagai kekuatan anomik yang tidak pernah sejak awal mengkonstruksi pretensi politik tertentu, ternyata jika bersatu secara massif bisa menumpas kaum despotik yang ambisius secara politik. Kekuasaan itu jahat jika disalahgunakan. Kekuasaan itu tinggi faedahnya, jika digunakan tepat sasaran.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR KUTIPAN

Daftar Kutipan 1

1. Onghokham, Soekarno: Pemikiran atau Politikus? dalam Benard Dahm, Soekarno dan perjuangan kemerdekaan (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. X.
2. Alfian, Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 1.
3. Nazaruddin, Syamsudin (ed) Soekarno: pemikiran Politik dan kenyataan Praktik (Jakarta, Rajawali Pers, 1988), hlm. XI.
4. Herbert Feith, Pemikiran Politik Indonesia 1945–1965 Suatu Pengantar, dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta: Gramedia 1982), hlm. 220–224.
5. Roeders O. G, The Smilling General President Soeharto of Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1969) dalam Terjemahan Anak Desa Biografi Presiden Soeharto (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 2.
6. Syamsuddin, Op Cit hlm. VIII.
7. Alfian, Op Cit hlm. 113.
8. Roeders, Op Cit hlm. 2.
9. Pengantar dalam, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (Jakarta: Lamtoro Gung Persada, 1989), hlm. IX–X.
10. Syamsuddin, Op Cit hlm. XIII.
11. Vernon van Dijke, Dalam Miriam Budiardjo: Jurnal Ilmu Politik I (Jakarta: Gramedia 1988), hlm. 1.
12. Ibid hlm. 1.

13. David E, Apter, Pengantar Analisa Politik (Jakarta: LP3ES 1987) hlm. 210–211
14. Budiardjo, Op Cit hlm. 5.
15. Jack C. Plano (etc), Kamus Analisa Politik (Jakarta: Rajawali Pers, 1982) hlm. 173–174.
16. James Drever, Kamus Psikologi (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 56.
17. Fred I Greenstein, Personality and Politics: Problem of Evidencem inference and conceptualization (Essex–England, Colchester: University of Essex 1969) hlm. 3.
18. Plano, Op Cit hlm. 150.
19. Plano, Op Cit.
20. Syamsuddin, Op Cit hlm. XII.
21. James A Bill, Comparative Politics: *The Quest for Theory* (Columbus, Ohio: Charle Emiril Publishing Company A Bell & Howell 1973), hlm. 50, 51.
22. Deliar Noer, Ideologi, Politik dan Pembangunan (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), hlm. 6.
23. Alfian, Op Cit hlm. 3.

Daftar Kutipan Bab II

1. Prof. Dr. C.A Van Peursen, *Tubuh, Jiwa Roh: Sebuah Pengantar dalam Filsafat Manusia* (Jakarta: BPK–Gunung Mulia, 1988), hlm. 83.
2. Ibid.
3. Fred I Greenstein, *Personality and Politics: Problem of Evidence, inference and conceptualization* (Essex–England, Colchester: University of Essex 1969) hlm. 28.
4. James Drever, *Kamus Psikologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 56.
5. Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 150.
6. Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 303–304.
7. Ibid, hlm. 145–178.
8. Plano, Op Cit.
9. Greenstein, Op Cit, hlm. 63.
10. Anonim Bahan Kuliah Kepribadian Politik (Makassar: Tanpa tahun), hlm. 7.
11. Ibid, hlm. 8.
12. Sanapiah Faisal, *Dimensi-dimensi Psikologi* (Surabaya: Usaha Nasional, Tanpa tahun), hlm. 97.
13. Nazaruddin Syamsudin, *Soekarno Pemikiran Politik dan kenyataan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. XI.
14. Greenstein, Op Cit, hlm. 6.
15. Sumadi, Op Cit, hlm. 105–109.

Daftar Kutipan Bab III dan Bab IV

1. Soekarno, Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Dalam Suluh Indonesia Muda Th.1926. Dimuat lagi dalam Di bawah Bendera Revolusi, Jilid I (Jakarta: Panitia Penerbitan Di bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 2.
2. Ibid, hlm. 5.
3. Ibid, hlm. 3.
4. Bernard Dahm, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan (Jakarta: LP3ES, 1987) hampir secara menyeluruh isi buku ini memuat proses Sinkritisme sebagai model berpikir khas Jawa.
5. Ibid, hlm. 93.
6. Ibid, hlm. XIV.
7. Ibid.
8. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 127–128.
9. Rex Mormatimer, Indonesia Commonism Under Soekarno: Ideology and Politics 1959–1965 (Ithaca and London: Cornell University Press, 1974) dalam Bab II The PKI and Political System hlm. 77–140.
10. Nazaruddin Syamsuddin, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 153.
11. Ibid hlm. 143 sumber kutipannya dari M. Nasir, Capita Selexta (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
12. Ibid.
13. Ruth T. Mc Vey, The Rise of Indonesia Commonism (New York: Cornell Univ. Press, 1965) hlm. 363.
14. Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. (Jakarta: Gunung Agung, 1986) hlm. 54.
15. Soekarno, Marhein dan Proletar dalam fikiran Rakyat 1933 dimuat dalam Dibawah Bendera Revolusi atau disingkat DBR jilid I, hlm. 253.
16. Soekarno, Indonesia Menggugat (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989) hlm. 129.
17. Cindy, Op Cit, hlm. 86–87.
18. Soekarno, Op Cit, hlm. 254.
19. Op Cit.
20. Soekarno, Non Cooperation Tidak Bisa mendatangkan Massa Aksi dan Machsvorming? dalam DBR, hlm. 193.
21. Ibid.
22. Soekarno, Sekali lagi Tentang Sosio Nasionalism dan Sosio Demokrasi, dalam DBR Jilid I hlm. 187.
23. Cindy Adam, Op Cit, hlm. 105.

24. Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi yang Otentik dan Perumusan Pancasila yang otentik (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983) hlm. 11.
25. Soekarno, lahirnya Pancasila dalam Buku Pengembangan Pancasila di Indonesia (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979) hlm. 142 atau hlm. yang sama juga dimuat dalam Herberth Feith and Lance Castles Indonesia Political Thingking 1945–1965 (Ithaca and London: Cornell University Press, 1970) hlm. 40–49.
26. Ibid, hlm. 133.
27. Ibid, hlm. 142.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid, hlm. 145.
31. Ibid.
32. Ibid.
33. Ibid.
34. Ibid.
35. 30 tahun Indonesia Merdeka, (Jakarta: Sekretarian Negara, 1980) hlm 53.
36. AWM. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila (Jakarta: CSIS, 1985), hlm. 99.
37. Herbert Feith, The decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca: Cornell University, 1962), hlm. 464.
38. John D. Legge, Soekarno: Sebuah Biografi Politik (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 325- 329.
39. Soekarno, Sekali Lagi Tentang Sosio Nasioanlisme dan Sosio Demokrasi Dalam DBR hlm. 187.
40. Soekarno, ibid, hlm. 171.
41. Soekarno, Op Cit, hlm. 155.
42. Herbert Feith dan Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia, 1945–1965 (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 64.
43. JW School, Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan negara–negara sedang berkembang, terjemahan RG. Soekadio (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 150–151.
44. Alfian, Op Cit, hlm. 137.
45. Soekarno, Loc Cit.
46. Alfian, Op Cit, hlm. 137.
47. Soekarno, Indonesia, Op Cit, hlm. 109.
48. Ibid.
49. Ibid.
50. Soekarno, Op Cit, hlm. 172.
51. Ibid.
52. Ibid.

53. Ibid.
54. Soekarno, Pancasila sebagai Dasar Negara (Jakarta: Inti Idayu Pers, 1985), hlm. 151.
55. Howard Palfrey Jones, Indonesia The Possible Dream (Singapura: Gunung Agung (s) PTE LTD, 1980), hlm. 319.
56. Ganis Harsono, Cakrawala Politik Soekarno (Jakarta: Inti Idayu Pers, 1985), hlm. 161.
57. Cyndi Adam, Op Cit, hlm. 449.
58. Soekarno, Indonesianisme dan Pan Asianisme dalam DBR hlm. 75–76.
59. John, Op Cit, hlm. 280.
60. Presiden Soeharto, Amanat Proklamasi I (1945 -1950) (Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno, 1985), hlm. 87–110.
61. John, Op Cit, hlm. 287.
62. Herbert Feith, The Decline, Op Cit, hlm. 199.
63. Michael Leifer, Politik Luar Negeri Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 54.
64. Ganis, Op Cit, 55.
65. Ganis, Op Cit, 56.
66. Ganis, Op Cit, 61.
67. Op Cit.
68. Legge, Op Cit, hlm. 311, 321.
69. Leifer, Op Cit, hlm. 120.
70. Legge, Op Cit, hlm. 334.
71. Leifer, Op Cit, hlm. 69.
72. Ganis, Op Cit, hlm. 99.
73. Ibid.
74. Leifer, Op Cit, hlm. 69.
75. Soekarno, Pidato Soekarno pada hari Kemerdekaan RI tahun 1961 (Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno, 1985).
76. Ganis, Op Cit, hlm. 134.
77. Ibid, hlm. 149, 150.
78. Ibid, hlm. 177.
79. Leifer, Op Cit, hlm. 104.
80. Ganis, Op Cit, hlm. 178.
81. Zhigniew K. Brzezinski, dikutip dalam Deliar Noer, Ideologi, Politik dan Kebudayaan (Jakarta: Yayasan Perkidmanta, 1983), hlm. 106.
82. Soeharto, dalam kata Sambutan, Pandangan Soeharto tentang Pancasila (Jakarta: CSIS, 1984), hlm. XI.
83. Soeharto, Pidato Kenegaraan 16–8–1975.
84. Anonim, Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966.

85. Soeharto, beberapa pokok pikiran mengenai pewarisan Nilai-nilai 45 kepada Generasi Muda Indonesia. (Jakarta: 13-3-1972).
86. Soeharto, Ceramah Peringatan Hari Ulang Tahun Parkindo di Surabaya tanggal 15-11-1969.
87. Soeharto, Pidato pada Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila, 1-6-1968.
88. Soeharto, Amanat Peringatan HUT Ke-25 ABRI di Jakarta 5 Oktober 1970.
90. Soeharto, Butir-butir Budaya Jawa: Hanggayuh Kasampurnaning Hurip Berbudi Bawa Leksana Ngudi Sejatining Becik (Jakarta: Yayasan Purna Bakti, 1990), hlm. 2,4.
91. Soekarno, Sambutan Peringatan Lahirnya Pancasila 1-6-1967 di Jakarta.
92. Ibid.
93. Soeharto, Butir, Op Cit, hlm. 108.
94. Soeharto, Nilai-nilai, Op Cit.
95. Ibid.
96. Soeharto, Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1967.
97. Soeharto, Lahirnya Pancasila, Op Cit.
98. Ibid.
99. Soeharto, Sambutan setelah Sembahyang ied di istiqlal 27- 10-1973.
100. Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hlm. 383.
101. Ibid.
102. Soeharto, Pidato kenegaraan 16 -8-1967.
103. Roeder, Op Cit, hlm. 20.
104. Soeharto, pikiran, Op Cit.
105. Soeharto, Pidato Peringatan Dies Natalis XXV Universitas Indonesia, 15-2-195 di Jakarta.
106. Soeharto, hlm. Oposisi dalam Pikiran hlm. 346.
107. Soeharto, Pidato Kenegaraan 15 -8-1974.
108. Tempo (Majalah Berita Mingguan) 16 Oktober 1976.
109. Soeharto, Pidato Kenegaraan 16-8-1968.
110. Soeharto, Amanat Pelantikan LPU 17-1-1970.
111. Ibid.
112. Ibid.
113. Kompas, Selasa 9 Juni 1992.
114. Soeharto, Pikiran, Op Cit, hlm. 525.
115. Ibid, hlm. 374.
116. Ibid.
117. Ibid, hlm. 398.
118. Roeders, Op Cit, hlm. 326. Kunjungan yang terakhir Soeharto ke Luar Negeri dalam masa penulisan skripsi ini adalah ke Rio de Janeiro medio

Juni 1992 dalam rangka menghadiri Earth Summit (KTT Bumi Brasil).

119. Ibid.
120. Hermewan Sulisty, Biografi Politik Adam Malik dari kiri ke kanan dalam PRISMA edisi khusus 1992 hlm. 88–89.
121. Roeders, Op Cit, hlm. 329.
122. Hermawan, Loc.City., hlm. 90.
123. Reoders, Op Cit, hlm. 336.
124. Ibid.
125. Ibid, hlm. 331.
126. Soeharto, pidato kenegaraan 16 Agustus 1975.
127. Roeders, Op Cit, hlm. 337.
128. Ibid.
129. Soeharto, Pikiran, hlm. 517.
130. Ibid.
131. Ibid.
132. Leifer, Op Cit, hlm. 221.
134. Soeharto, Hlm. Timor–Timur dalam Soeharto Op Cit, hlm. 317.
135. Leifer, Op Cit, hlm. 225.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C. (1986). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- AKSP, Z. (1984). *Individu Dan Pemikiran Politik di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: Yayasan Bina Karir.
- Alfian (1985). *Politik, Kebudayaan Dan Manusia Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Alfian (1986). *Masalah Dan Prospek Pembangunan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Alfian (1986). *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Apter, D.E.(1987). *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Arnold, B. (1959). *Political Theory: The Foundation of Twentieth Century Political Thought*. Princeton–NJ: Princeton University Press, 1959.
- Budiardjo, M. (1982) *Partisipasi Dan Partai Politik* Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (1986). *Aneka Pemikiran Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- Caprara, G.V., Schwartz, S., Capanna, C., Vecchione M. & Barbaranelli, C. (2006). "Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice". *Political Psychology* Vol. 27, No. 1 (Feb., pp. 1-28).
- CSIS (1984). *Pandangan Soeharto Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.

- Dahm, B. (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Darmodihardjo, D. (1983). *Pancasila Dalam Beberapa Perspektif*. Jakarta: Aries Lima.
- Dwipayana G., & Nazaruddin S. (1990). *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968–23 Maret 1973*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Dwipayana G., & Nazaruddin S. (1990). *Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965–27 Maret 1968*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Feith, H. (1973). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University, 1973.
- Feith, H. & Lance C. (ed), (1970). *Indonesia Political Thinking 1945–1965*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Feith, H. & Lance C. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945–1965 (terjemahan)* Jakarta: LP3ES.
- Frederick, W.H, & Soeri S. (1984). *Pemahaman Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Gerangan, W.A (1986). *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Greenstein, Freid I. (1969). *Personality and Politics, Problem of evidence Inference and Conceptualition*. Essex England Colchester: University of Essex.
- Harsono, G. (1985). *Cakrawala Politik Soekarno*. Inti Idayu Pres.
- Holland, L. W. (ed), (1953). *Asian Nationalism and The West*. New York: The Mcmilland Company.
- Ingelson, J. (1983). *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan nasional Indonesia Tahun 1927–1934*. Jakarta: LP3ES.
- James, A. B. (1973). *Comparative Politics, The Quest For Theory*. Columbus Ohio: Charle Emiril Publishing Company A Bell & Howell, 1973.
- Kahin, G.McT (1973). *Nasionalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Karim, M. R., (1983). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Legge, J. (1985). *Soekarno, Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Leifer, M. (1986). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Mahmud, A. (1987). *Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Mortimer, R. (1974). *Indonesia Commonism Under Soekarno, Ideology and Politics 1959–1965*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Mudjanto, G. (1986). *The Concept Of Power Javanese Culture*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhsin, A.H. (1989). *Perang Tipu Daya Antara Bung Karno dan Tokoh–Tokoh Komunis*. Jakarta: Golden Trayon Press.
- Mulyono, S. (1979). *Simbolisme dan Mistikisme Dalam Wayang* Jakarta: Gunung Agung.
- Noer, D. (1983). *Ideologi, Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Perkidmatan.
- Notonegoro, (1984). *Pancasila dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Notosusanto, N. (1983). *Naskah Proklamai Otentik dan Rumusan Pancasila Otentik*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Peursen, J.et.al, (1982). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pranarka, AMW. (1985). *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Raillon, F. (1989). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Rapar, JH. (1988). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rapar, JH (1988). *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roeders, O.G. (1990). *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto* (terjemahan) dari, *The Smiling General, President Soeharto of Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Salim, S. (1984). *Bung Karno Putera Fajar*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sanapiah, F. (tanpa tahun, 1986?). *Dimensi–Dimensi Psikologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sastrosatomo, S., (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Scherer, S.P. (1982). *Keselarasn dan Kejanggalan: Pemikiran- pemikiran Priyayi Nasionalisme Jawa Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- SESKOAD, (1990). *Serangan Umum 1 Maret 1949, Di Yogyakarta Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.

- Soeharto (1989). *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Soeharto, (1990). *Butir-butir Budaya Jawa: Hanggayuh Kasampurning Hurip Berbudi Bawa Leksana Ngudi Sejatining*. Jakarta: Yayasan Purna Bakti Pertiwi.
- Soekarno (1987). *Bung Karno dan Pemuda*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Soekarno (1989). *Bung Karno dan ABRI*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Soekarno (1989). *Indonesia menggugat*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Soekarno (1985). *Amanat Proklamasi I & II*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Soekarno, (1964). *Dibawah bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta: Panitia Penerbitan Dibawah Bendera Revolusi.
- Soekarno, (1985). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Inti Idayu Pres.
- Sudarsono, Y. (1982). *Politik dan Pembangunan: Pilihan Masalah*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sujanto, A. et.al. (1986). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suryabrata, S. (1990). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, N. (1988). *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsudin, N (1984). *PNI dan Kepolitikannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsudin, N. (1989). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Vey, R.T Mc. (1965). *The Rise of Indonesia Commonism*. New York: Cornell University Press, 1965.

Penerbitan Khusus:

- Political Behavior Anual Vol. 1, tahun 1988.
- Jurnal Ilmu Politik I.
- MBM Tempo 16 Oktober 1976.
- Kompas, Selasa 9 Juni 1992.
- Prima Edisi Khusus 1992.
- Seri:047 Protes Kaum Muda (Yosar Anwar).
- Sekretariat Negara, 30 tahun Indonesia Merdeka.
- Kumpulan Pidato Presiden Soeharto.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA PENULIS



Gatut Priyowidodo, Ph.D., dilahirkan tepat pada tanggal 17 Mei 1968 dari seorang ayah bernama Soetikno dan ibu yang bernama Lilik Damitri. Hari hari yang indah, masa kanak-kanak hanya sampai SD (1981) dilewatkan bersama orang tua. Setelah itu penulis melanjutkan studi di Lamongan yakni SMP Negeri 2 (1984) dan SMPP/SMAN 2 (1987). Menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Hasanuddin Makassar (1992) dan Magister Ilmu Sosial dari PPS Universitas Airlangga (1999). Sementara jenjang pendidikan doktornya di bidang Komunikasi Organisasi diselesaikan pada tahun 2013 pada *Northern University of Malaysia* (UUM) di Kedah-Malaysia, dengan judul: “*Communication Patterns in Decision Making: Phenomenography Approach in Malaysia’s and Indonesia’s Political Organizations*”.

Selain sebagai dosen tetap pada Fikom UK Petra Surabaya, penulis juga beberapa kali menerima hibah penelitian dan abdimas dari DP2M Dikti/Kemristekdikti. Pemakalah pada sejumlah Konferensi Internasional seperti:

- *18th AMIC Annual Conference Media, Democracy and Governance: Emerging Paradigms in a Digital Age*, New Delhi, (2009).

- 2nd International Conference on Communication and Media 2010 (i-COME'10): *Communication and Society: Challenges and Engagement*, Melaka, (2010).
- 19th AMIC Annual Conference, *Technology and Culture: Communication Connectors and Dividers*, Singapore, (2010).
- 2011&2012 Shanghai International Conference on Social Science (SICSS), Shanghai-Cina, (2011, 2012).
- International Conference on Humanities and Social Sciences 2011, "Transforming Research for Sustainable Community", Hatyai-Songkla, Thailand, (2011).
- 2nd International Soft Science Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, (2011).
- ICSS 2014 International Conference on Social Sciences, Bucharest , (2014).

Penulis kolom tetap *Mitra Indonesia* (Jakarta) dan artikel disejumlah media massa seperti *Jawa Pos*, *Kompas* (Jatim), *Surabaya Post* (sebelum almarhum), *Padang Ekspres*, *Haluan*, *Singgalang* dan *Berita Metro*. Juga narasumber topik-topik kontemporer di bidang politik, organisasi dan kebijakan publik di Trans7 TV, SBO TV, Radio Suara Surabaya. (email: gatutpriyowidodo@yahoo.com. mobilephone: 081363481533).

Buku yang sudah terbit:

- Kiat Sukses Menghadapi Pembimbing Skripsi & Tesis (Jakarta: *Citra Harta Prima*, 2005).
- Komunikasi Politik dan Komunikasi Organisasi (Yogyakarta: *ANDI*, 2015).
- Model Komunikasi dan Strategi Kebijakan Kesadaran Anti Korupsi (Yogyakarta: *ANDI*, 2017).